

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

AGUSTUS 2026





Laporan Perekonomian

Provinsi Kalimantan Selatan

Agustus 2026

Visi & Misi

Bank Indonesia

Visi Bank Indonesia

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.

Misi Bank Indonesia

- 
1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
 5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
 6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
 7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Visi & Misi

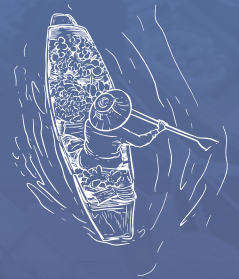
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dapat mempublikasikan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan triwulan II 2026, sebagai perwujudan dari komitmen kami untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia di daerah, sebagaimana diamanatkan oleh UU Bank Indonesia. LPP dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia Provinsi setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang membahas Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Laporan ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (i) merupakan pandangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap dinamika perekonomian di Kalimantan Selatan; (ii) menyajikan informasi terkini mengenai kondisi makroekonomi, keuangan pemerintah, stabilitas sistem keuangan, inflasi, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta prospek perekonomian Kalimantan Selatan ke depan untuk mendukung pembentukan ekspektasi masyarakat yang menjadi pertimbangan penting dalam perumusan berbagai kebijakan di Bank Indonesia; dan (iii) menjadi referensi penting bagi seluruh *stakeholders* dalam melakukan perumusan kebijakan dan keputusan ekonominya.

Pada triwulan II 2026, perekonomian Kalimantan Selatan tetap tumbuh tinggi sebesar 5,28% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,67% (yoy). Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan yang tetap tumbuh tinggi ditopang oleh LU Pertambangan dan LU Konstruksi. Peningkatan kinerja LU Pertambangan seiring dengan tingginya harga batu bara global terdampak konflik Israel-US vs Iran, yang memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produksi ditengah cuaca yang lebih mendukung aktivitas pertambangan. LU Konstruksi mengalami peningkatan didorong akselerasi belanja modal proyek pemerintah daerah dan proyek ekonomi kerakyatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan kinerja LU Pertanian, LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. Perlambatan kinerja LU Pertanian seiring dengan penurunan pertumbuhan produksi padi seiring dengan panen raya padi lokal yang baru akan berlangsung pada triwulan III 2026 dan penurunan produksi getah karet. Penurunan kinerja LU pertanian berdampak pada lebih rendahnya kinerja LU Industri pengolahan dan Perdagangan seiring dengan penurunan bahan baku dan aktivitas perdagangan. Selain itu, berakhirnya konsolidasi berbagai seasonal drivers (Tahun Baru, Imlek, Ramadhan-Idul Fitri) turut menjadi pendorong turunnya kinerja LU Perdagangan.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 yang tetap tumbuh tinggi didorong oleh pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah dan peningkatan kinerja Ekspor. Konsumsi RT tetap tumbuh lebih tinggi seiring dengan perayaan hari raya idul adha dan libur semester sekolah. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah yang tetap tinggi didorong oleh program ekonomi kerakyatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan akselerasi belanja pemerintah daerah. Ekspor tumbuh lebih tinggi dari triwulan I 2026 didorong oleh peningkatan ekspor komoditas batu bara seiring dengan level harga batu bara global yang berada pada level yang tinggi.

Pada tahun 2026, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,6% - 5,4%, melanjutkan tren pertumbuhan di tahun 2025. Prakiraan pertumbuhan positif seiring berlanjutnya aktivitas hilirisasi industri di KI/KEK, berlanjutnya program swasembada pangan dan makin masifnya program ekonomi kerakyatan (a.l MBG dan KDKMP) serta potensi peningkatan aktivitas pertambangan dampak insentif harga batu bara global yang diperkirakan tetap tinggi sepanjang tahun 2026.

Kata Pengantar

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 4,47% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2026 sebesar 4,83% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan historis inflasi Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 2,74% (yoy).

Ke depan, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2026 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2025 dan berada dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Hal ini sejalan dengan harga emas dunia yang diperkirakan meningkat lebih terbatas seiring dengan ekspektasi suku bunga The Fed yang masih *higher for longer* pada tahun 2026. Selanjutnya, harga aneka rokok tidak mengalami kenaikan seiring Harga Jual Eceran (HJE) dan cukai rokok yang tidak mengalami perubahan pada tahun 2026. Tekanan inflasi lebih lanjut diantisipasi melalui program stabilisasi harga pangan termasuk penyaluran beras SPHP, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, dan pemanfaatan pangan lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selanjutnya, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap kemitraan strategis yang terjalin baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan saran dan masukan guna peningkatan kualitas laporan, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelancaran dan kesuksesan kepada kita semua dalam upaya mengembangkan ekonomi Kalimantan Selatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia maju.

Banjarmasin, Agustus 2026
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Selatan

Ttd

Haris Munandar

Direktur Eksekutif

Daftar Isi

Visi & Misi Bank Indonesia	II
Visi dan Misi KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	III
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Grafik	VIII
Daftar Tabel	XI
Cakupan Pembahasan	XII
Infografik Perekonomian	XIII
Tabel Indikator	XIV
Ringkasan Eksekutif	XVI
Daftar Istilah	61
Tim Penyusun	63

BAB I Perkembangan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

1

1.1 Sisi Lapangan Usaha: Sektor Utama Ekonomi	4
1.2 Sisi Pengeluaran	10
BOKS 1 Risiko El Niño terhadap Aktivitas Ekonomi dan Rantai Pasok Strategis Kalimantan Selatan	15
BOKS 2 <i>Unlocking Borneo's Potential: Akselerasi Investasi Berkualitas Melalui Pamor Borneo Investment Forum</i>	19

BAB 2 Perkembangan Inflasi Daerah

23

2.1 Perkembangan Inflasi	25
2.2 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	26
2.3 Pengendalian Inflasi Daerah	27

BAB 3 Pembiayaan Daerah, Serta Pengembangan Akses Keuangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

29

3.1 Pembiayaan Daerah	31
3.2 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	38





BAB 4

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

41

4.1	Perkembangan Sistem Pembayaran di Kalimantan Selatan	43
4.2	Perkembangan Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif	44
4.3	Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	45

BAB 5

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

47

5.1	Kondisi Ketenagakerjaan	49
5.2	Kondisi Kesejahteraan	50

BAB 6

Prospek Perekonomian

55

6.1	Prakiraan Kondisi Makro Ekonomi	57
6.2	Prakiraan Inflasi	58

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan, Kalimantan, dan Nasional	3	Grafik 1.24	Perkembangan Jumlah Penumpang Udara dan Laut Kalimantan Selatan	9
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Sisi Sektoral	3	Grafik 1.25	Perkembangan Bongkar Muat Angkutan Udara dan Laut Kalimantan Selatan	9
Grafik 1.3	Produksi Padi GKP Provinsi Kalimantan Selatan	4	Grafik 1.26	Perkembangan Jumlah Wisnus Kalimantan Selatan	10
Grafik 1.4	Produksi Karet Provinsi Kalimantan Selatan	4	Grafik 1.27	Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Kalimantan Selatan	10
Grafik 1.5	Harga Karet	4	Grafik 1.28	Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Selatan	10
Grafik 1.6	Produksi Tandan Buah Segar (Sawit)	5	Grafik 1.29	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	12
Grafik 1.7	Pangsa Volume Ekspor Batu Bara Kalimantan Selatan Triwulan II 2026	5	Grafik 1.30	Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)	12
Grafik 1.8	Perkembangan Ekspor Batu Bara Kalimantan Selatan	5	Grafik 1.31	Pangsa Sektor PMA dan PMDN Tw-II 2026 Kalimantan Selatan	12
Grafik 1.9	Produksi Batu Bara Tiongkok	5	Grafik 1.32	Realisasi Kredit Investasi Kalimantan Selatan	12
Grafik 1.10	Harga Batu Bara Dunia	6	Grafik 1.33	Pertumbuhan Volume Ekspor Batu Bara	12
Grafik 1.11	Realisasi Ekspor Komoditas HS 15	6	Grafik 1.34	Pertumbuhan Volume Ekspor Komoditas HS 15	13
Grafik 1.12	Perkembangan Ekspor Karet	6	Grafik 1.35	Pertumbuhan Volume Ekspor Karet Alam & Olahan	13
Grafik 1.13	Konsumsi Listrik Industri	7	Grafik 1.36	Distribusi Nilai Ekspor Triwulan II 2026 Berdasarkan Komoditas	13
Grafik 1.14	Hasil Survei Penjualan Eceran Kalimantan Selatan	7	Grafik 1.37	Distribusi Nilai Ekspor Triwulan II 2026 Berdasarkan Negara Tujuan	13
Grafik 1.15	Perkembangan Transaksi e-Commerce	7	Grafik 1.38	Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan	13
Grafik 1.16	Perkembangan Kredit Perdagangan di Kalimantan Selatan	7	Grafik 1.39	Pertumbuhan Volume Impor Luar Negeri	14
Grafik 1.17	Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor di Kalimantan Selatan	7	Grafik 1.40	Perkembangan Volume Impor Mesin dan Peralatan	14
Grafik 1.18	Perkembangan Kredit Multiguna di Kalimantan Selatan	8	Grafik 1.41	Perkembangan Nominal Impor Bahan Kimia	14
Grafik 1.19	Perkembangan Kredit Konsumsi di Kalimantan Selatan	8	Grafik B1.1	Harga Beras	17
Grafik 1.20	Realisasi Belanja Modal APBD Seluruh Pemda di Kalimantan Selatan	8	Grafik B1.2	Luas Karhutla dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan	18
Grafik 1.21	Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha di Kalimantan Selatan	8	Grafik 2.1	Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan	25
Grafik 1.22	Perkembangan Kredit Konstruksi Kalimantan Selatan	9			
Grafik 1.23	Perkembangan Pengadaan Semen di Kalimantan Selatan	9			

Daftar Grafik

Grafik 2.2	Perbandingan Gabungan Kota Inflasi untuk Provinsi se-Kalimantan pada Triwulan II 2026	25	Grafik 3.13	NPL Kredit Korporasi Periode Triwulan II 2026	35
Grafik 2.3	Perkembangan Inflasi Kota Banjarmasin, Tanjung, Kab. Kotabaru, Kab. Hulu Sungai Tengah, dan Kab. Tanah Laut	25	Grafik 3.14	Pertumbuhan Aset, DPK, Kredit, dan LDR Periode Triwulan II 2026	35
Grafik 2.4	Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	26	Grafik 3.15	Pertumbuhan DPK Periode Triwulan II 2026	36
Grafik 2.5	Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	27	Grafik 3.16	Pertumbuhan Giro Pemda, Deposito Pemerintah, dan Tabungan Swasta Periode Triwulan II 2026	36
Grafik 2.6	Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi	27	Grafik 3.17	Pertumbuhan Kredit Periode Triwulan II 2026	37
Grafik 3.1	Distribusi Kredit Konsumsi Periode Triwulan II 2026	31	Grafik 3.18	Pertumbuhan Kredit dan NPL Kredit Periode Triwulan II 2026	38
Grafik 3.2	Pertumbuhan Kredit Konsumsi Berdasarkan Jenisnya Periode Triwulan II 2026	31	Grafik 3.19	Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit Periode Triwulan II 2026	38
Grafik 3.3	Pertumbuhan Kredit Konsumsi Pemilikan Mobil Roda Empat, Truk, dan Kendaraan Roda Enam atau Lebih Periode Triwulan II 2026	32	Grafik 3.20	Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha Periode Triwulan II 2026	38
Grafik 3.4	Pertumbuhan Kredit Konsumsi – Kredit Kepemilikan Rumah, KPR Tipe 22 s.d 70 dan Kredit Pemilikan Rumah Tipe diatas 70 Triwulan II 2026	32	Grafik 3.21	Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Periode Triwulan II 2026	39
Grafik 3.5	Pertumbuhan dan NPL Kredit Konsumsi Periode Triwulan II 2026	32	Grafik 3.22	Distribusi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Periode Triwulan II 2026	39
Grafik 3.6	Persentase Penggunaan Penghasilan RT Periode Triwulan II 2026	32	Grafik 3.23	Pertumbuhan Kredit UMKM Lapangan Usaha Utama Periode Triwulan II 2026	39
Grafik 3.7	Indeks Penghasilan Konsumen & Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini Periode Triwulan II 2026	33	Grafik 3.24	Pertumbuhan Kredit dan NPL Kredit UMKM Periode Triwulan II 2026	39
Grafik 3.8	Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha Ekonomi Utama Periode Triwulan II 2026	33	Grafik 3.25	Penyaluran KUR Berdasarkan Kabupaten/ Kota Periode Triwulan II 2026	40
Grafik 3.9	Komposisi Kredit Korporasi Periode Triwulan II 2026	34	Grafik 3.26	Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Triwulan II 2026	40
Grafik 3.10	Pertumbuhan Kredit Korporasi Sub-LU Pertambangan dan Penggalan Periode Triwulan II 2026	34	Grafik 4.1	Transaksi Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS)	43
Grafik 3.11	Pertumbuhan Kredit Korporasi Sub-LU Pertanian Periode Triwulan II 2026	34	Grafik 4.2	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	43
Grafik 3.12	Pertumbuhan Kredit Korporasi Sub-LU Industri Pengolahan Periode Triwulan II 2026	35	Grafik 4.3	Penarikan dan Setoran Uang Kartal Melalui Bank Indonesia di Kalimantan Selatan	44
			Grafik 4.4	Jumlah <i>Merchant</i> QRIS Berdasarkan Kota/Kabupaten	44
			Grafik 4.5	Jumlah <i>Merchant</i> QRIS Menurut Skala Usaha	45
			Grafik 4.6	Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)	45

Daftar Grafik

Grafik 4.7	Perkembangan Temuan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya	46
Grafik 5.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	49
Grafik 5.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	49
Grafik 5.3	Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja	50
Grafik 5.4	Indeks Penghasilan Konsumen	51
Grafik 5.5	Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	51
Grafik 5.6	IPM Provinsi di Kalimantan dan Nasional	52
Grafik 5.7	Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan	53
Grafik 6.1	Kondisi Negara Mitra Dagang Tahun 2025 dan Prospek Pertumbuhan 2026	57

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Sisi Lapangan Usaha Utama (% , yoy)	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran (%yoy)	10
Tabel 1.3	Perkembangan Realisasi Belanja APBN di Kalimantan Selatan	11
Tabel 1.4	Perkembangan Realisasi Belanja APBD di Kalimantan Selatan	11
Tabel 2.1	Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II 2026 Menurut Kelompok	25
Tabel 2.2	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi pada Triwulan II 2026 (%yoy)	26
Tabel 2.3	Komoditas Utama Penyumbang Deflasi pada Triwulan II 2026 (%yoy)	26
Tabel 3.1	Perubahan Tingkat Pendapatan RT Triwulan II 2026	33
Tabel 3.2	Perkembangan DPK di Kalimantan Selatan secara Spasial Periode Triwulan II 2026 (Lokasi Bank Pelapor)	36
Tabel 3.3	Perkembangan Kredit di Kalimantan Selatan secara Spasial Periode Triwulan II 2026 (Lokasi Proyek)	37
Tabel 5.1	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	50
Tabel 5.2	Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral	51
Tabel 5.3	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	52
Tabel 5.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	53
Tabel 6.1	Risiko PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026	59
Tabel 6.2	Risiko Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026	59
Tabel B1.1	Realisasi <i>Hotspot</i> Bulanan Kalimantan Selatan Mei–Agustus 2026	16
Tabel B1.2	Perubahan Harga Beras Provinsi Kalimantan Selatan Pada Periode El Niño	17
Tabel B2.1	Daftar Proyek Investasi Pamor Borneo Investment Forum 2026	21

Cakupan Pembahasan

Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan berisi kajian mengenai perkembangan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan terakhir sesuai rilis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Badan Pusat Statistik (BPS) dan *tracking* triwulan berjalan pada bulan penerbitan buku ini. Setiap bagian asesmen disertai oleh data dan informasi penjas antara lain hasil survei, *prompt indicators*, hasil liaison, *focus group discussion* (FGD), informasi anekdototal dan data-data lain yang relevan.

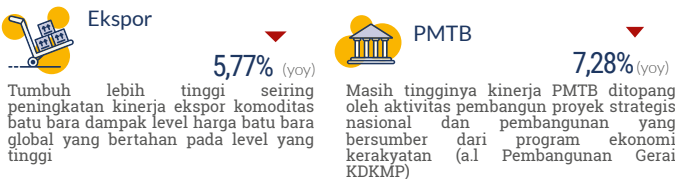
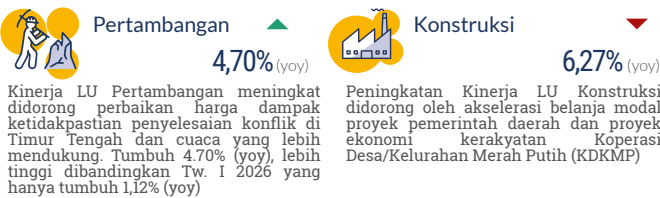
- Bab I** Asesmen ringkas terkait evaluasi realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan terakhir mencakup analisis evaluasi realisasi perkembangan masing-masing komponen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta arah pertumbuhan ekonomi triwulan berjalan secara tahunan (yoy), baik dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha (LU).
- Bab II** Asesmen terkait evaluasi realisasi inflasi triwulan terakhir dan arah perkembangan inflasi triwulan berjalan berdasarkan realisasi inflasi bulan terakhir, dilengkapi dengan faktor-faktor yang menjadi sumber penyebab terjadinya inflasi dengan mengedepankan aspek dinamika pasokan, produksi dan distribusi daerah serta implikasi adanya kebijakan daerah yang berdampak kepada harga-harga. Informasi mengenai pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah juga disajikan dalam Bab ini.
- Bab III** Asesmen pembiayaan daerah serta pengembangan akses keuangan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilengkapi dengan informasi perkembangan intermediasi perbankan termasuk ketahanan korporasi dan kredit UMKM pada triwulan laporan.
- Bab IV** Asesmen perkembangan penyelenggaraan layanan sistem pembayaran dan pengelolaan uang di Bank Indonesia dalam rangka menjaga kelancaran transaksi sistem pembayaran, pengembangan layanan keuangan nontunai, elektronifikasi, penyediaan uang layak edar dan upaya menekan peredaran uang palsu.
- Bab V** Asesmen ketenagakerjaan menggambarkan perkembangan angkatan kerja dan pengangguran serta asesmen kesejahteraan antara lain mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan data rilis resmi.
- Bab VI** Prospek perekonomian daerah mencakup prakiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi satu triwulan ke depan dan secara tahunan untuk keseluruhan tahun berjalan

Kinerja Ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi penawaran, Pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi didorong LU Pertambangan dan LU Konstruksi. Dari sisi permintaan, tetap tingginya pertumbuhan ekonomi ditopang oleh peningkatan kinerja ekspor komoditas batu bara. Inflasi Kalsel pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 4,47% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya namun lebih tinggi dibandingkan target inflasi nasional yang sebesar 2,5±1% (yoy).

Infografis Perekonomian

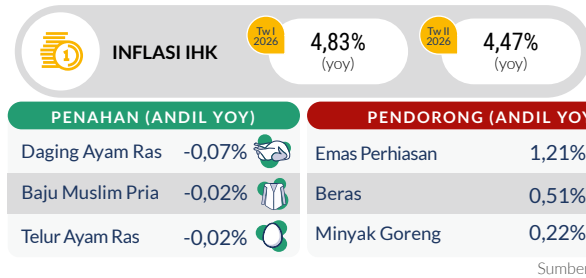
PERTUMBUHAN EKONOMI

Kinerja Ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi didorong oleh kinerja LU Pertambangan dan LU Konstruksi. Sementara dari sisi permintaan, tetap tingginya pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kinerja Ekspor.



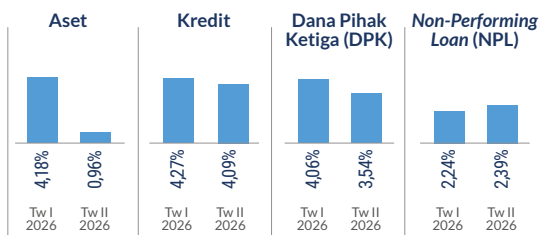
INFLASI

Inflasi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya



SISTEM KEUANGAN DI DAERAH

Stabilitas sistem keuangan di Kalimantan Selatan tetap terjaga.



RISIKO

- Divergensi pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang, peningkatan ketidakpastian global, dan dampak implementasi tarif resiprosal Amerika Serikat (AS).
- Peningkatan krisis geopolitik dan disrupsi rantai pasok komoditas.

SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOLAAN UANG RUPIAH (PUR)

Kelancaran sistem pembayaran tetap terjaga, eskalasi transaksi masyarakat yang beralih menggunakan BI-FAST.

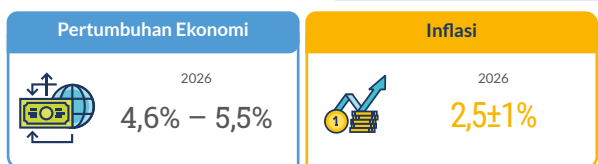


KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi kesejahteraan dan ketenagakerjaan berada pada level yang sedikit lebih rendah



OUTLOOK PEREKONOMIAN



- Pemangkasan RKAB dan terhambatnya hilirisasi industri
- First round dan second round dampak El Niño
- Peningkatan harga bahan bakar non subsidi dan avtur.

Tabel Indikator

PDRB DAN INFLASI													
INDIKATOR	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	2024				2025				2026	
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pertumbuhan PDRB Harga Konstan (%yoy)	4,84%	5,05%	5,22%	4,98%	4,81%	5,23%	5,15%	4,82%	5,39%	5,22%	5,46%	5,67%	5,28%
PDRB Harga Konstan	149.226	156.757	164.958	36.489	39.231	40.574	40.463	38.247	41.344	42.679	42.678	40.416	43.525
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.537	20.351	21.718	4.039	5.496	6.278	4.538	4.352	5.935	6.553	4.851	4.629	6.119
Pertambangan dan Penggalian	36.176	37.271	37.259	8.822	9.133	9.503	9.812	8.820	9.107	9.492	9.900	8.904	9.503
Industri Pengolahan	18.395	19.283	20.706	4.671	4.676	4.748	5.188	5.038	5.138	5.172	5.412	5.377	5.442
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	200	213	230	52	53	53	55	58	56	58	58	61	63
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	661	692	725	165	172	177	178	172	180	185	187	181	189
Konstruksi	11.470	12.150	12.784	2.765	2.879	3.074	3.433	2.760	3.036	3.256	3.674	2.947	3.240
Perdagangan Besar dan Eceran; Mobil dan Sepeda Motor	14.017	14.908	16.113	3.525	3.765	3.769	3.849	3.802	4.067	4.070	4.146	4.096	4.356
Transportasi dan Pergudangan	10.299	10.934	11.827	2.541	2.682	2.782	2.929	2.794	2.900	3.004	3.138	2.981	3.043
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.242	3.503	3.849	847	891	843	922	909	959	908	1.049	1.032	1.054
Informasi dan Komunikasi	6.734	7.187	7.809	1.754	1.791	1.811	1.831	1.877	1.948	1.972	2.013	2.035	2.086
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.763	5.100	5.343	1.256	1.265	1.313	1.266	1.313	1.331	1.302	1.397	1.397	1.320
Real Estate	3.735	3.949	4.219	946	974	995	1.035	992	1.047	1.072	1.104	1.058	1.099
Jasa Perusahaan	966	1.033	1.106	244	260	262	268	260	280	282	285	273	291
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.392	7.906	8.206	1.948	2.044	1.901	2.012	2.010	2.042	2.033	2.125	2.143	2.183
Jasa Pendidikan	6.657	6.986	7.404	1.671	1.836	1.720	1.758	1.756	1.912	1.884	1.880	1.855	2.022
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.221	3.400	3.605	792	829	870	908	847	878	920	935	915	952
Jasa lainnya	1.761	1.892	2.055	450	486	474	482	488	528	515	524	531	565
PDRB Harga Berlaku	269.192	286.819	305.127	65.213	71.697	74.776	75.132	70.871	76.072	78.796	79.005	75.838	84.212
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.679	33.119	36.460	6.475	8.985	10.223	7.437	7.318	9.748	10.951	8.131	7.912	11.422
Pertambangan dan Penggalian	83.007	84.512	83.989	18.912	20.852	22.096	22.653	20.083	20.578	21.369	22.072	20.567	22.839
Industri Pengolahan	28.949	31.410	35.441	7.411	7.450	7.756	8.794	8.572	8.773	8.913	9.315	9.337	9.598
Pengadaan Listrik dan Gas	351	379	413	92	94	95	97	103	100	105	106	112	117
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	985	1.061	1.149	247	263	273	278	271	284	294	300	290	304
Konstruksi	18.848	20.321	21.673	4.597	4.806	5.152	5.767	4.666	5.141	5.528	6.284	5.096	5.825
Perdagangan Besar dan Eceran; Mobil dan Sepeda Motor	26.027	28.179	31.206	6.584	7.103	7.165	7.327	7.314	7.849	7.874	8.113	8.073	8.635
Transportasi dan Pergudangan	19.073	20.816	22.260	4.855	5.165	5.317	5.479	5.217	5.415	5.616	5.834	5.600	5.928
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.004	5.534	6.245	1.327	1.405	1.335	1.468	1.464	1.556	1.477	1.709	1.692	1.748
Informasi dan Komunikasi	8.936	9.657	10.522	2.346	2.409	2.439	2.463	2.527	2.624	2.660	2.711	2.745	2.745
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.261	8.925	9.515	2.184	2.215	2.305	2.221	2.320	2.367	2.322	2.506	2.526	2.846
Real Estate	5.524	5.992	6.602	1.417	1.475	1.514	1.586	1.525	1.620	1.699	1.754	1.680	1.747
Jasa Perusahaan	1.746	1.924	2.139	449	483	489	503	493	533	552	561	539	581
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.864	14.276	14.932	3.494	3.721	3.432	3.629	3.655	3.744	3.712	3.830	3.923	4.021
Jasa Pendidikan	10.538	11.513	12.579	2.692	2.991	2.847	2.983	2.985	3.251	3.193	3.197	3.160	3.444
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.297	5.756	6.244	1.322	1.394	1.474	1.567	1.464	1.522	1.590	1.626	1.606	1.676
Jasa lainnya	3.104	3.442	3.758	812	887	863	880	892	967	941	958	982	1.048
IHK Kalimantan Selatan	119,99	107,14	111,06	106,32	106,73	105,95	107,14	107,60	108,66	109,23	111,06	112,80	113,52
Inflasi Kalimantan Selatan (y-o-y)	2,43	1,95	3,66	2,58	2,34	1,98	1,95	1,20	1,81	2,91	3,66	4,83	4,47
IHK Banjarmasin	119,72	107,17	111,42	106,45	106,70	106,25	107,17	107,26	108,95	109,33	111,42	112,81	113,67
Inflasi Banjarmasin (y-o-y)	2,28	1,98	3,97	2,58	2,49	2,03	1,98	0,76	2,11	2,90	3,97	5,17	4,33
IHK Tanjung	117,61	106,27	109,62	104,57	104,96	104,81	106,27	106,95	107,89	108,00	109,62	112,49	112,39
Inflasi Tanjung (y-o-y)	2,39	2,24	3,15	1,64	1,96	2,28	2,24	2,28	2,79	3,04	3,15	5,18	4,17
IHK Kotabaru	124,40	106,82	110,06	106,44	107,19	106,73	106,82	107,68	108,63	109,30	110,06	111,45	112,69
Inflasi Kotabaru (y-o-y)	3,81	0,26	3,03	2,41	2,16	1,24	0,26	1,16	1,34	2,41	3,03	3,50	3,74
IHK Hulu Sungai Tengah		108,53	112,79	108,92	109,47	106,47	108,53	109,73	109,98	110,06	112,79	114,69	114,97
Inflasi Hulu Sungai Tengah (y-o-y)		1,11	3,93	3,68	3,53	1,97	1,11	0,74	0,47	3,37	3,93	4,52	4,54
IHK Tanah Laut		106,63	109,73	104,91	105,61	104,82	106,63	107,55	107,21	107,73	109,73	112,18	112,86
Inflasi Tanah Laut (y-o-y)		2,90	2,91	2,29	1,36	2,04	2,90	2,52	1,52	2,78	2,91	4,31	5,27

Tabel Indikator

SSK															
INDIKATOR		2023				2024				2025				2026	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total Asset	(Rp Miliar)	95.293	99.034	98.347	101.871	105.161	109.379	113.465	116.429	119.479	122.391	133.726	123.408	124.472	123.585
	(%yoy)	16,81%	14,35%	8,67%	2,48%	10,35%	10,45%	15,37%	14,29%	13,62%	11,90%	17,86%	5,99%	4,18%	0,96%
DPK	(Rp Miliar)	76.133	77.581	77.239	80.155	82.345	86.063	87.928	92.362	94.602	94.462	98.973	95.834	98.443	97.810
	(%yoy)	18,08%	12,61%	6,03%	5,54%	8,16%	10,93%	13,84%	15,23%	14,88%	9,76%	12,56%	3,76%	4,06%	3,54%
Giro	(Rp Miliar)	19.274	18.895	18.062	22.129	21.289	21.291	21.345	27.127	23.469	22.541	25.736	28.554	29.777	27.605
	(%yoy)	34,24%	8,33%	-3,81%	8,83%	10,45%	12,68%	18,18%	22,59%	10,24%	5,87%	20,57%	5,26%	26,88%	22,47%
Tabungan	(Rp Miliar)	38.451	39.284	38.508	40.546	41.198	42.301	42.204	44.607	44.376	43.806	43.618	46.399	46.834	46.403
	(%yoy)	11,90%	8,95%	5,74%	5,26%	7,14%	7,68%	9,60%	10,01%	7,71%	3,56%	3,35%	4,02%	5,54%	5,93%
Deposito	(Rp Miliar)	18.407	19.402	20.669	17.480	19.636	22.471	24.379	20.628	26.757	28.116	29.619	20.881	21.832	23.802
	(%yoy)	16,86%	26,01%	17,09%	2,26%	6,67%	15,82%	17,95%	18,01%	36,27%	25,12%	21,50%	1,23%	-18,41%	-15,34%
Kredit (L. Proyek)	(Rp Miliar)	90.518	88.212	90.274	92.259	92.462	95.275	93.889	100.994	103.714	103.604	106.438	108.332	108.143	107.845
	(%yoy)	25,43%	13,31%	8,96%	2,87%	2,15%	8,01%	4,00%	9,47%	12,17%	8,74%	13,36%	5,88%	4,27%	4,09%
Modal Kerja	(Rp Miliar)	31.842	30.705	31.261	32.629	32.574	36.182	35.677	40.210	34.816	33.353	34.811	34.761	32.769	30.454
	(%yoy)	13,77%	0,62%	-3,74%	-1,15%	2,30%	17,84%	14,13%	23,23%	6,88%	-7,82%	-2,43%	-13,55%	-5,88%	-8,69%
Investasi	(Rp Miliar)	31.364	29.538	30.033	29.826	29.033	27.336	25.355	28.421	34.680	35.583	36.464	37.878	39.442	41.567
	(%yoy)	64,29%	35,59%	24,78%	0,02%	-7,43%	-7,46%	-15,58%	-4,71%	19,45%	30,17%	43,82%	33,27%	13,73%	16,82%
Konsumsi	(Rp Miliar)	27.312	27.969	28.980	29.805	29.966	31.757	32.858	33.686	34.219	34.668	35.162	35.162	35.693	35.932
	(%yoy)	8,86%	9,47%	10,15%	10,97%	9,72%	13,54%	13,38%	13,02%	14,19%	9,16%	7,01%	4,38%	4,31%	3,64%
LDR- Lokasi Proyek		118,89%	113,70%	116,88%	115,10%	112,29%	110,70%	106,78%	109,35%	109,63%	109,68%	107,54%	113,04%	109,85%	110,26%
NPL (gross)		1,74%	1,87%	2,04%	1,83%	2,01%	1,88%	1,98%	1,99%	2,19%	2,28%	2,30%	2,14%	2,24%	2,39%

SPPUR														
INDIKATOR	2023				2024				2025				2026	
	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	TW-I	TW-II
Transaksi RTGS	30,34	28,96	36,16	47,21	32,65	38,23	34,98	47,09	30,45	36,13	50,02	47,27	36,23	35,65
Pertumbuhan RTGS (%)	9,51	-6,53	33,77	32,01	5,53	31,99	-3,27	-0,26	-4,89	-5,50	43,01	0,39	0,19	-1,32
Transaksi Kliring	4,87	4,41	5,16	5,63	4,62	4,29	4,83	5,34	4,17	4,15	4,49	5,21	3,89	3,91
Pertumbuhan Kliring (%)	-27,53	-31,45	-7,94	-7,58	-5,14	-2,76	-6,37	-5,23	-9,75	-3,43	-6,94	-2,33	-0,07	-5,67
Aliran Uang Masuk	4,25	3,83	3,71	1,72	4,15	3,98	2,65	1,56	2,67	4,12	1,99	0,64	3,62	2,96
Aliran Uang Keluar	1,65	3,70	1,71	3,51	2,73	2,93	-1,56	-3,01	-2,52	-1,46	-1,86	-3,28	-2,08	-1,06
Aliran Uang Masuk Neto	2,60	135,55	2,00	(1,784)	1,41	1,05	1,10	-1,45	0,15	2,66	0,13	-2,64	1,54	0,26



Ringkasan Eksekutif

PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI DAERAH

Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh tinggi sebesar 5,28% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,67% (yoy). Di sisi penawaran, ekonomi tetap tumbuh tinggi pada triwulan II 2026 ditopang oleh kinerja LU Pertambangan dan LU Konstruksi. Peningkatan kinerja LU Pertambangan seiring dengan tingginya harga batu bara global terdampak konflik Israel-US vs Iran, yang memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produksi ditengah cuaca yang lebih mendukung aktivitas pertambangan. LU Konstruksi mengalami peningkatan didorong akselerasi belanja modal proyek pemerintah daerah dan proyek ekonomi kerakyatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan kinerja LU Pertanian, LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. Perlambatan kinerja LU Pertanian disebabkan penurunan pertumbuhan produksi padi seiring dengan panen raya padi lokal yang baru akan berlangsung pada triwulan III 2026 dan penurunan produksi Getah Karet. Penurunan kinerja LU pertanian berdampak pada lebih rendahnya kinerja LU Industri Pengolahan dan Perdagangan seiring dengan penurunan bahan baku dan aktivitas perdagangan. Selain itu, berakhirnya konsolidasi berbagai seasonal drivers (Tahun Baru, Imlek, Ramadhan–Idul Fitri) turut menjadi pendorong turunnya kinerja LU Perdagangan.

Dari sisi pengeluaran, ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh tinggi didorong oleh pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah dan peningkatan kinerja Ekspor. Konsumsi RT tetap tumbuh lebih tinggi seiring dengan perayaan hari raya idul adha dan libur semester sekolah. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah yang tetap tinggi didorong oleh program ekonomi kerakyatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan akselerasi belanja pemerintah daerah. Ekspor tumbuh lebih tinggi dari triwulan I 2026 didorong oleh ekspor komoditas batu bara merespon level harga batu bara global yang berada pada level yang tinggi.



PERKEMBANGAN INFLASI

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 4,47% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2026 sebesar 4,83% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 2,74% (yoy). Secara spasial, tekanan inflasi terjadi di seluruh kota/kabupaten sampel di Provinsi Kalimantan Selatan. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tanah Laut sebesar 5,27% (yoy), diikuti Kabupaten Hulu Sungai Tengah 4,54% (yoy), Kota Banjarmasin 4,33% (yoy), Tanjung 4,17% (yoy), dan Kabupaten Kotabaru 3,74% (yoy).

Berdasarkan perkembangan kelompoknya, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatatkan inflasi sebesar 5,78% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,68% (yoy) di mana tekanan bersumber dari kenaikan harga beras dan minyak goreng seiring meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Kelompok Transportasi juga berbalik mengalami inflasi sebesar 3,68% (yoy) dari deflasi -0,28% (yoy) pada triwulan I 2026, seiring transmisi kenaikan harga energi global ke tarif jasa angkutan. Sebaliknya, inflasi kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya melandai menjadi 16,07% (yoy) dari 23,24% (yoy) pada triwulan sebelumnya, yang didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren harga emas dunia. Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh deflasi komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras akibat kelebihan pasokan, serta deflasi pada kelompok Pakaian dan Alas Kaki.

Ringkasan Eksekutif

PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 yang positif turut didukung peningkatan fungsi intermediasi perbankan yang tumbuh solid, walaupun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit perbankan tumbuh positif sebesar 4,09% (yoy) dengan *outstanding* Rp107,84 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang tumbuh 4,27% (yoy) dengan *outstanding* Rp108,14 triliun; serta diikuti dengan kualitas kredit yang baik, tercermin dari NPL yang terjaga pada level 2,39%.

Kredit Konsumsi pada triwulan II 2026 dengan *outstanding* sebesar Rp35,82 triliun, tumbuh 3,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp35,93 triliun, sejalan dengan indeks ekspektasi ekonomi yang masih dalam rentang optimis. Berdasarkan distribusinya, Kredit Multiguna memiliki pangsa sebesar 42,71%, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebesar 38,55% dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebesar 6,53% serta Kredit Konsumsi lainnya meliputi Kredit Ruko/Rukan, Apartemen, dan Elektronik sebesar 12,21%.

Penyaluran Kredit Korporasi pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 4,19% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp53,35 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,82% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp53,70 triliun. Menguatnya pertumbuhan pada Kredit Korporasi terutama bersumber dari penyaluran pembiayaan korporasi pada LU Pertambangan (dengan proporsi terbesar mencapai 51,98% dari total kredit korporasi) yang tumbuh 0,08% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp27,73 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 1,61% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp27,99 triliun.

Pada triwulan II 2026, penyaluran Kredit UMKM di Kalimantan Selatan tumbuh 11,30% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp22,93 triliun, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 3,53% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp22,82 triliun. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 21,27%, sedikit meningkat dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 21,11%.

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp35,65 triliun melambat 1,32% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 19,00% (yoy) atau sebesar Rp36,23 triliun. Perlambatan tersebut sejalan dengan melambatnya kinerja beberapa Lapangan usaha utama di Kalimantan Selatan, seperti Lapangan Usaha Pengolahan, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran.

Transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp3,91 triliun atau berkontraksi sebesar 5,67% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 6,80% (yoy) atau sebesar Rp3,89 triliun. Walaupun membaik, pertumbuhan transaksi SKNBI masih berkontraksi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan mengalami *net inflow* sebesar Rp0,26 triliun. Kondisi tersebut sama dengan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp1,54 triliun.

Perkembangan elektronifikasi dan digitalisasi terus mengalami peningkatan, tercermin dari peningkatan jumlah *merchant* yang telah memiliki QRIS di Kalimantan Selatan yang tumbuh sebesar 34,33% (yoy) atau mencapai 619,80 ribu *merchant*. Sementara itu, Kalimantan Selatan mampu mempertahankan pencapaian skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) pada Semester II 2025 dengan status 100% digital.

Ringkasan Eksekutif

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan pada Semester I 2026 berada pada level yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Semester I 2025. Hal tersebut terkonfirmasi dari penurunan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada Semester I 2026 didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Optimisme daya beli masyarakat pada triwulan II 2026 masih terjaga. Hal ini tercermin dari Nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 123,45, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 116,71. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 76,10, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,19. Peningkatan IPM Kalimantan Selatan bersumber dari peningkatan seluruh dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH), serta pengetahuan yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Standar Hidup Layak (pengeluaran per kapita[PA1.1][MA1.2]). Lebih lanjut, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan menunjukkan tren menurun sepanjang Semester I 2021 hingga Semester I 2026. Pada Semester I 2026, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 165,41 ribu orang dengan persentase sebesar 3,63%, lebih rendah dibandingkan Semester sebelumnya.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

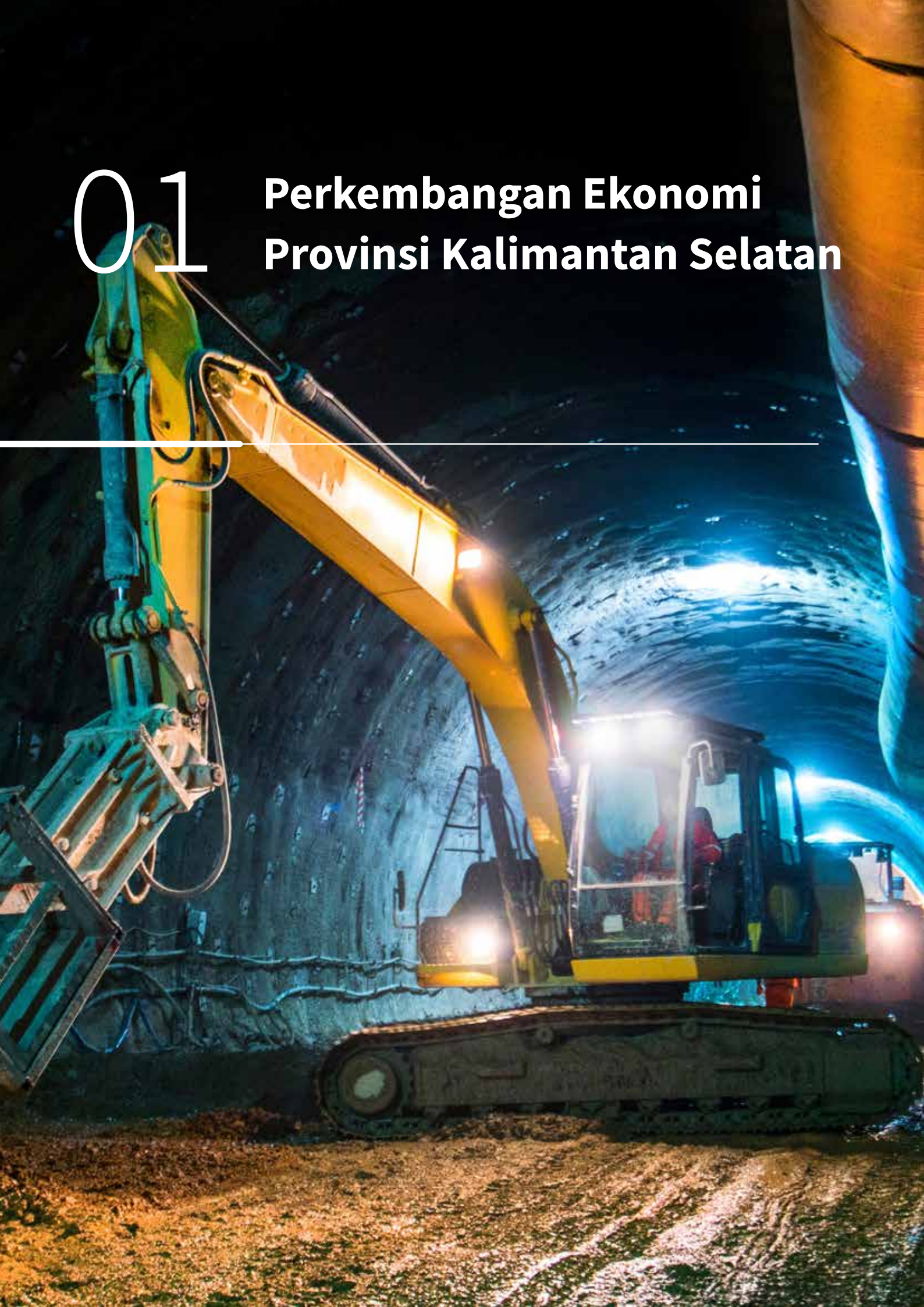
Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,6% – 5,4% (yoy).

Pada tahun 2026, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,6% - 5,4%, melanjutkan tren pertumbuhan di tahun 2025. Prakiraan pertumbuhan positif seiring berlanjutnya aktivitas hilirisasi industri di KI/KEK, berlanjutnya program swasembada pangan dan makin masifnya program ekonomi kerakyatan (a.l MBG dan KDKMP) serta potensi peningkatan aktivitas pertambangan dampak insentif harga batu bara global yang diperkirakan tetap tinggi sepanjang tahun 2026.

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 4,47% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2026 sebesar 4,83% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan historis inflasi Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 2,74% (yoy). Secara keseluruhan 2026, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2026 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2025 dan berada dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Hal ini sejalan dengan harga emas dunia yang diperkirakan meningkat lebih terbatas seiring dengan ekspektasi suku bunga The Fed yang masih higher for longer pada tahun 2026. Selanjutnya, harga aneka rokok tidak mengalami kenaikan seiring Harga Jual Eceran (HJE) dan cukai rokok yang tidak mengalami perubahan pada tahun 2026. Tekanan inflasi lebih lanjut diantisipasi melalui program stabilisasi harga pangan termasuk penyaluran beras SPHP, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, dan pemanfaatan pangan lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

01

Perkembangan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan



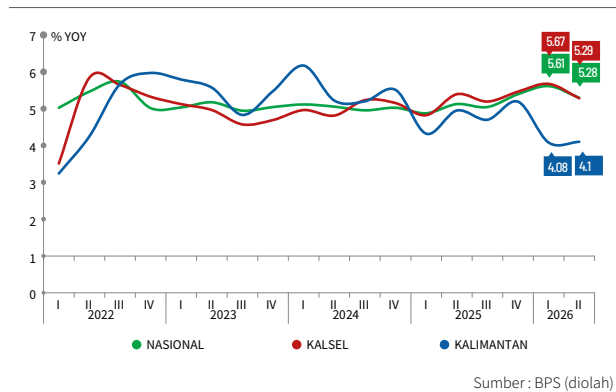
Pada triwulan II 2026, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tetap tumbuh tinggi sebesar 5,28% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 5,67% (yoy).

Dari sisi penawaran, Ekonomi Kalimantan Selatan tetap tumbuh tinggi ditopang oleh LU Pertambangan dan LU Konstruksi. Peningkatan kinerja LU Pertambangan seiring dengan tingginya harga batu bara global terdampak konflik Israel-US vs Iran, yang memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produksi ditengah cuaca yang lebih mendukung aktivitas pertambangan. LU Konstruksi mengalami peningkatan didorong akselerasi belanja modal proyek pemerintah daerah dan proyek ekonomi kerakyatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan kinerja LU Pertanian, LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. Perlambatan kinerja LU Pertanian seiring dengan penurunan pertumbuhan produksi padi seiring dengan panen raya padi lokal yang baru akan berlangsung pada triwulan III 2026 dan penurunan produksi getah Karet. Penurunan kinerja LU pertanian berdampak pada lebih rendahnya kinerja LU Industri pengolahan dan Perdagangan seiring dengan penurunan bahan baku dan aktivitas perdagangan. Selain itu, berakhirnya konsolidasi berbagai seasonal drivers (Tahun Baru, Imlek, Ramadhan-Idul Fitri) turut menjadi pendorong turunnya kinerja LU Perdagangan dan LU Transportasi Pergudangan.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 yang tetap tumbuh tinggi didorong oleh kinerja Ekspor. Kinerja Ekspor tumbuh lebih tinggi dari triwulan I 2026 didorong oleh peningkatan kinerja ekspor komoditas batu bara seiring dengan level harga batu bara global yang berada pada level yang tinggi.

Pada tahun 2026, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,6% - 5,4%, melanjutkan tren pertumbuhan di tahun 2025. Prakiraan pertumbuhan positif seiring dengan tingginya aktivitas LU pertambangan - batu bara seiring dengan tingginya harga batu bara global. Selain itu, berlanjutnya aktivitas hilirisasi industri di KI/KEK dan masifnya program ekonomi kerakyatan (a.l MGB dan KDKMP) turut menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2026

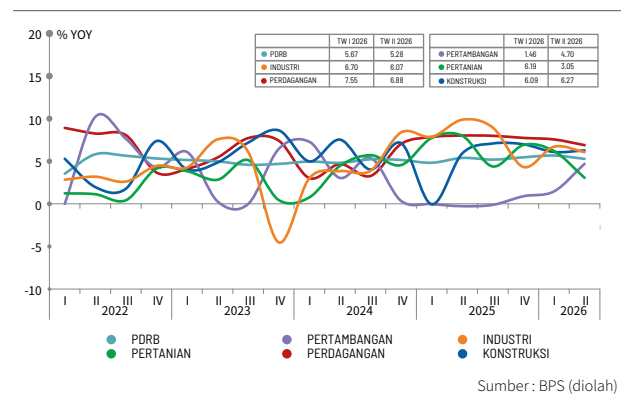
Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh tinggi, namun lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026. Ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,28% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,67% (yoy). Namun demikian, angka pertumbuhan Kalimantan Selatan tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan yang tumbuh sebesar 4,10% (yoy) (Grafik 1.1).



Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan, Kalimantan, dan Nasional

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang tetap tinggi ditopang peningkatan kinerja LU Pertambangan, dan LU Konstruksi (Grafik 1.2). Pada triwulan II 2026, LU Pertambangan tumbuh 4,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan peningkatan harga batu bara yang menjadi insentif pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya. Sementara itu, penandatanganan kontrak konstruksi jembatan pulau laut pada 30 Maret 2026 dan pembangunan gerai KDKMP mendorong peningkatan kinerja LU Konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh melambatnya kinerja LU Pertanian, LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. Kinerja LU Pertanian tumbuh melandai seiring dengan normalisasi pertumbuhan produksi padi program oplah 2025 (tidak adanya penambahan luas lahan oplah), belum adanya panen raya padi, dan penurunan produksi getah karet. Penurunan kinerja LU pertanian berdampak pada lebih rendahnya kinerja LU Industri pengolahan dan Perdagangan seiring dengan penurunan bahan baku dan aktivitas perdagangan. Selain itu, berakhirnya konsolidasi berbagai seasonal drivers (Tahun Baru, Imlek, Ramadhan-Idul Fitri) turut menjadi pendorong turunnya kinerja LU Perdagangan.



Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Sisi Sektoral

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 ditopang kinerja Ekspor. Kinerja Ekspor tumbuh lebih tinggi dari triwulan I 2026 didorong oleh peningkatan ekspor komoditas batu bara seiring dengan level harga batu bara global yang berada pada level yang tinggi.

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Sisi Lapangan Usaha Utama (% , yoy)

PROVINSI	SISI	NO	SEKTOR	2022	2023	2024	2025				2026	
							I	II	III	IV	I	II
Kalimantan Selatan	Supply	1	Pertanian	1.59	3.31	4.16	7.92	8.05	4.64	6.91	6.19	3.05
Kalimantan Selatan	Supply	2	Pertambangan	5.57	3.08	3.03	-0.18	-0.62	-0.27	0.89	1.12	4.7
Kalimantan Selatan	Supply	3	Industri Pengolahan	3.31	3.02	4.84	7.67	9.71	8.1	4.32	6.93	6.07
Kalimantan Selatan	Supply	6	Konstruksi	4.12	6.29	5.99	-0.06	5.92	7.09	6.99	6.64	6.27
Kalimantan Selatan	Supply	7	Perdagangan	7.15	6.17	6.36	8.4	8.24	7.98	7.73	7.19	6.88
Kalimantan Selatan	Supply	18	PDRB	5.11	4.84	5.06	4.82	5.39	5.2	5.46	5.67	5.28

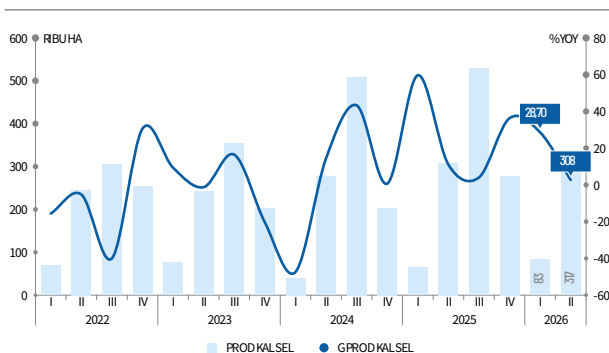
Sumber: BPS, diolah

1.1 SISI LAPANGAN USAHA: SEKTOR UTAMA EKONOMI

Dari sisi penawaran, struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 masih didominasi oleh LU Pertambangan dengan pangsa sebesar 27,12%, diikuti oleh LU Pertanian 13,56%, LU Industri Pengolahan 11,40%, LU Perdagangan 10,25%, dan LU Transgud (7,04%).

1.1.1 LU Pertanian

LU Pertanian pada triwulan II 2026 tumbuh lebih rendah didorong penurunan pertumbuhan produksi padi. LU Pertanian tercatat tumbuh sebesar 3,05% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 6,19% (yoy). Perlambatan kinerja LU Pertanian disebabkan oleh belum adanya panen raya padi dan normalisasi pertumbuhan produksi padi dampak belum adanya penambahan luas lahan olah. Pada triwulan II 2026 produksi padi tumbuh 2,77% (yoy) atau hanya meningkat sebesar 8,52 ribu ton, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 28,70% (yoy) atau meningkat sebesar 18,42 ribu ton (Grafik 1.3). Melandainya pertumbuhan produksi padi seiring belum memasuki periode panen raya dan normalisasi pertumbuhan produksi program ketahanan pangan - Optimasi Lahan (Oplah) di Kalimantan Selatan tahun 2025.

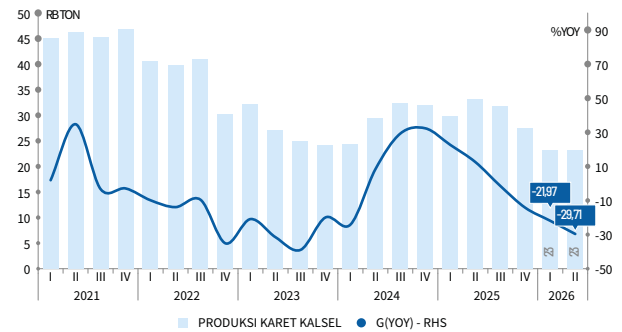


Sumber : BPS Kalsel, DPKP Kalsel (diolah)

Grafik 1.3 Produksi Padi GPK Provinsi Kalimantan Selatan

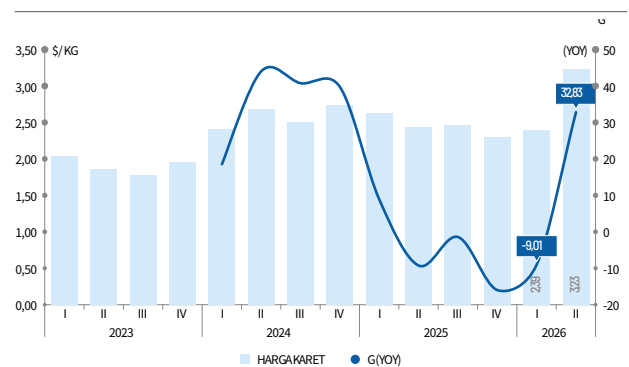
Lebih lanjut, produksi karet juga mencatatkan perlambatan. Produksi karet pada triwulan II 2026 berkontraksi sebesar 29,71% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan I 2026 yang juga berkontraksi sebesar 21,97% (yoy) (Grafik 1.4). Penurunan produksi karet sejalan dengan cuaca yang lebih panas yang berdampak pada stres fisiologis tanaman yang

selanjutnya menurunkan produksi getah dan proses pembekuan yang lebih lambat dibandingkan kondisi normal. Penurunan produksi karet terjadi ditengah kenaikan harga komoditas karet global, yakni sebesar 29,85% (yoy) (Grafik 1.5).



Sumber: GAPKINDO KalselTengTim (diolah)

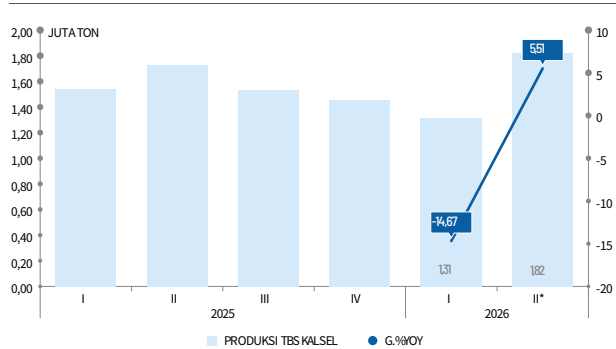
Grafik 1.4 Produksi Karet Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber: MRESMCVC Index

Grafik 1.5 Harga Karet

Di sisi lain, produksi TBS sawit menjadi penahan penurunan kinerja LU Pertanian lebih lanjut pada triwulan II 2026. Produksi sawit pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,51% (yoy) atau sebesar 1,82 juta ton, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 1,31 juta ton. Masih tingginya pertumbuhan produksi sawit pada triwulan II 2026 didorong oleh penambahan luas tanaman menghasilkan yang bertambah sebanyak 15,1 ribu Ha seiring dengan kegiatan replanting yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, produktivitas sawit terindikasi mengalami penurunan disebabkan oleh perubahan cuaca yang relatif cepat yang berdampak belum pulihnya sebagian lahan pasca musim trek, atau gangguan penyerbukan buah sawit pada triwulan III 2025 ditengah pemupukan tanaman yang belum optimal (Grafik 1.6).

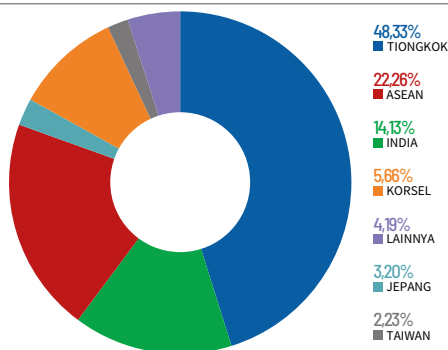


Sumber: GAPKI Kalsel, diolah

Grafik 1.6 Produksi Tandan Buah Segar (Sawit)

1.1.2 LU Pertambangan

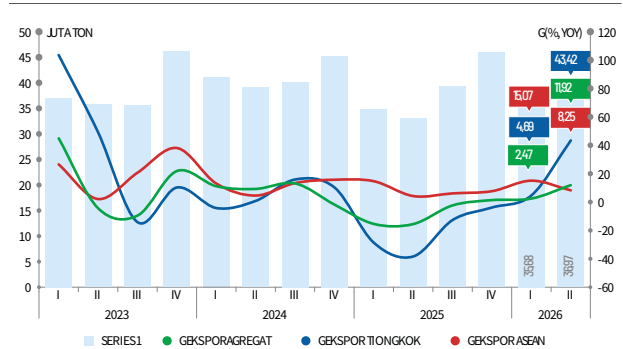
Kinerja LU Pertambangan pada triwulan II 2026 meningkat. Triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 1,46% (yoy). Perbaikan kinerja LU Pertambangan ini masih didorong oleh peningkatan harga komoditas energi dampak kekhawatiran berlanjutnya perang Iran vs US – Israel yang selanjutnya berdampak pada membaiknya permintaan batu bara di tengah *frontloading* pemenuhan DMO dan kekhawatiran pasca pemangkas RKAB produksi Nasional.



Sumber: Dirjen bea dan cukai, diolah

Grafik 1.7 Pangsa Volume Ekspor Batu Bara Kalimantan Selatan Triwulan II 2026

Pasar ekspor utama batu bara Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 ditujukan ke Asia. Pada triwulan II 2026, pangsa ekspor didominasi oleh Tiongkok (48,33%), ASEAN (22,26%), India (14,13%), Korsel (5,66%), dan Jepang (3,20%). Adapun jenis batu bara yang diminati oleh pasar Asia berupa batu bara termal yang diperuntukan untuk bahan bakar pembangkit energi listrik.



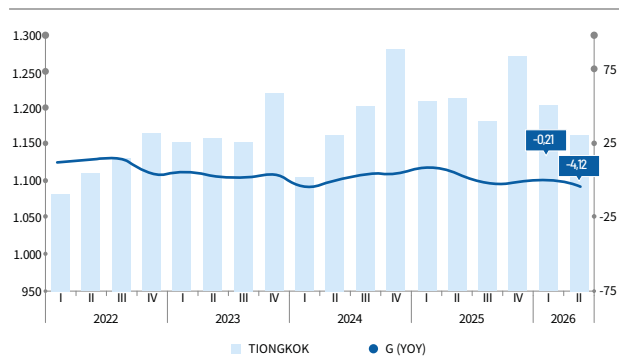
Sumber: Dirjen bea dan cukai, diolah

Grafik 1.8 Perkembangan Ekspor Batu Bara Kalimantan Selatan

Kinerja LU Pertambangan yang tumbuh tercermin dari perbaikan kinerja ekspor batu bara. Secara agregat, pertumbuhan volume ekspor batu bara Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 mencapai 11,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang hanya tumbuh 2,47% (yoy) (Grafik 1.8).

Peningkatan kinerja ekspor antara lain ditopang oleh peningkatan permintaan ekspor ke Tiongkok.

Volume ekspor batu bara ke Tiongkok tumbuh 43,32% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,69% (yoy). Disisi lain, kinerja ekspor batu bara ke ASEAN tercatat tumbuh 8,25% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 15,07% (yoy).

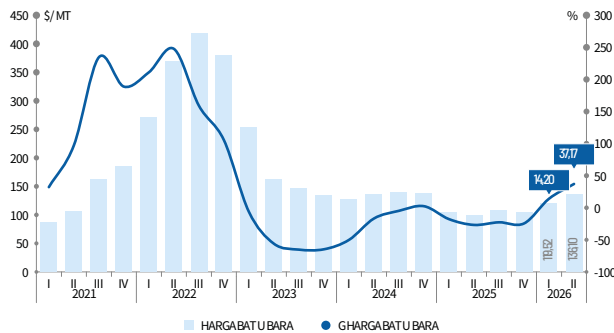


Sumber: McCloskey (diolah)

Grafik 1.9 Produksi Batu Bara Tiongkok

Kinerja ekspor batu bara Kalimantan Selatan yang membaik sejalan dengan penurunan produksi batu bara Tiongkok. Pada triwulan II 2026, produksi batu bara Tiongkok terkontraksi 4,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.9). Hal tersebut seiring dengan gangguan produksi batu bara akibat kecelakaan tambang maut di Provinsi Shanxi yang

memicu inspeksi keselamatan secara besar-besaran di seluruh wilayah Tiongkok. Selain itu, peningkatan suhu ekstrem dampak *EL Nino* berdampak pada peningkatan permintaan konsumsi listrik untuk pendingin di Tiongkok.



Sumber: Pink Sheet World Bank, (Diolah)

Grafik 1.10 Harga Batu Bara Dunia

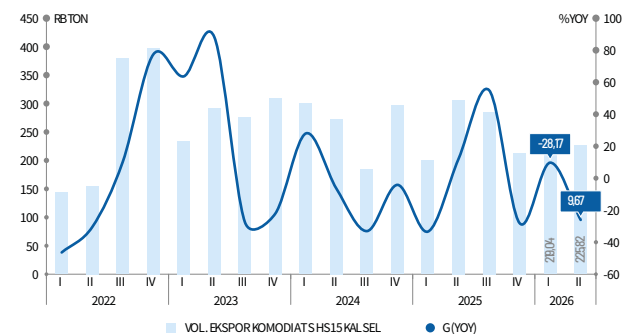
Peningkatan harga batu bara dunia menjadi insentif pelaku usaha pertambangan meningkatkan produksinya, meskipun ditengah isu pemangkasan RKAB produksi batu bara. Rerata batu bara Newcastle pada triwulan II 2026 mencapai \$136,10/MT, atau meningkat 37,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang berada di level \$119,52/MT. Peningkatan harga batu bara global terindikasi menjadi salah satu faktor pendorong tingginya realisasi ekspor komoditas batu bara triwulan II 2026.

1.1.3 LU Industri Pengolahan

Pada triwulan II 2026, kinerja LU Industri Pengolahan tetap tumbuh solid, namun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 6,07% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 6,70% (yoy). Melandainya Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan sejalan dengan gangguan produksi di sisi hulu (LU Pertanian). Di sisi lain, masih tumbuh tingginya kinerja LU ini seiring dengan telah berproduksinya *smelter pig iron* di Kawasan Industri KI Sebuk.

Perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan tercermin dari realisasi ekspor produk yang tergabung dalam HS 15. Pada triwulan II 2026, realisasi ekspor komoditas yang tergabung dalam HS 15 turun 26,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 9,67% (yoy). Penurunan volume ekspor

HS 15 sejalan dengan gangguan bahan baku di sisi hulu dampak cuaca yang lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal. (Grafik 1.11).

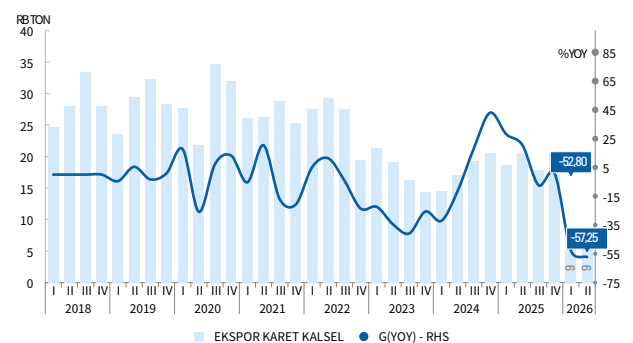


Sumber: Dirjen bea dan cukai, diolah

Grafik 1.11 Realisasi Ekspor Komoditas HS 15

Lebih lanjut, perlambatan kinerja LU Industri disebabkan oleh penurunan ekspor olahan karet.

Pada triwulan II 2026, pertumbuhan volume ekspor karet terkontraksi sebesar 57,25% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang terkontraksi sebesar 52,80% (yoy) (Grafik 1.12). Penurunan kinerja ekspor tersebut sejalan dengan melambatnya hasil sadapan dan produksi karet, antara lain akibat cuaca kering dibawah kondisi normal sehingga menurunkan produktivitas tanaman karet.

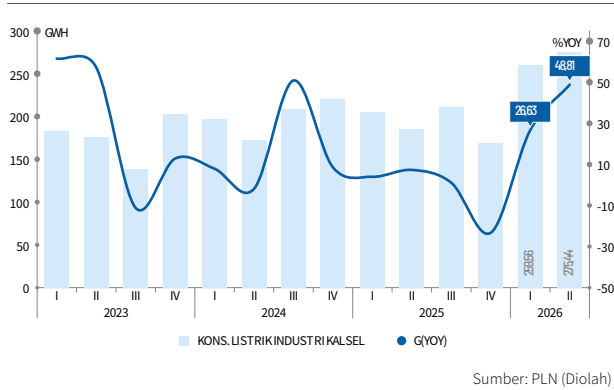


Sumber: GAPKINDO KalselTengTim (diolah)

Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor Karet

Perlambatan LU Industri Pengolahan terjadi ditengah peningkatan konsumsi listrik industri.

Pada triwulan II 2026, konsumsi listrik mencapai 275,44 gWh atau tumbuh 48,81% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 258,56 gWh, atau 26,63% (yoy) (Grafik 1.13). Peningkatan konsumsi listrik ditengah penurunan kinerja LU Industri pengolahan mengindikasikan peningkatan biaya operasional.

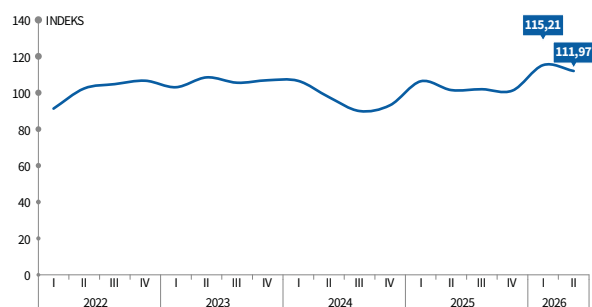


Grafik 1.13 Konsumsi Listrik Industri

1.1.4 LU Perdagangan

Pada triwulan II 2026, kinerja LU Perdagangan tumbuh melandai. LU Perdagangan tumbuh 6,88% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 7,55% (yoy). Perlambatan kinerja LU Perdagangan sejalan dengan penurunan aktivitas perdagangan produk pertanian (a.l Padi dan Karet) dan berakhirnya konsolidasi berbagai seasonal drivers (Tahun Baru, Imlek, Ramadhan–Idul Fitri) di triwulan I 2026.

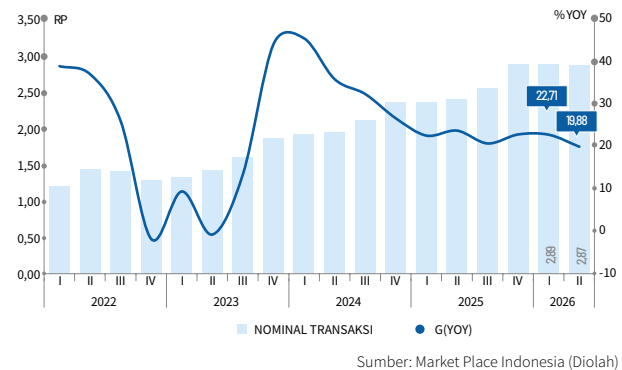
Kinerja Perdagangan Eceran yang menurun mengkonfirmasi melandainya pertumbuhan LU Perdagangan pada triwulan II 2026. Penurunan kinerja tersebut tercermin dari indeks penjualan riil yang lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 115,21 (Grafik 1.14). Penurunan tersebut disebabkan normalisasi konsumsi pasca berakhirnya berbagai seasonal drivers (Tahun Baru, Imlek, Ramadhan–Idul Fitri).



Grafik 1.14 Hasil Survei Penjualan Eceran Kalimantan Selatan

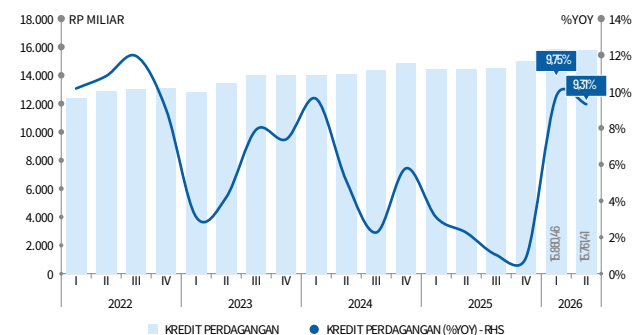
Selain itu, kinerja LU Perdagangan yang tumbuh melandai tercermin dari perlambatan pertumbuhan transaksi *e-commerce*. Pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* pada triwulan II 2026 tumbuh 19,88% (yoy),

lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 22,71% (yoy) (Grafik 1.15). Perlambatan pertumbuhan nilai transaksi pada triwulan laporan seiring dengan berakhirnya konsolidasi berbagai seasonal drivers (Tahun Baru, Imlek, Ramadhan–Idul Fitri).

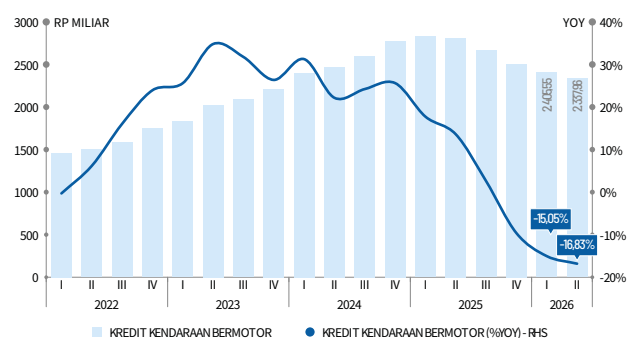


Grafik 1.15 Perkembangan Transaksi e-Commerce

Kredit Perdagangan tetap tumbuh tinggi. Kredit Perdagangan tumbuh 9,31% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,75% (yoy) (Grafik 1.16). Selain itu, kredit kendaraan bermotor juga mengalami perlambatan mengindikasikan semakin turunnya aktivitas penjualan kendaraan bermotor pada triwulan I 2026 (Grafik 1.17).

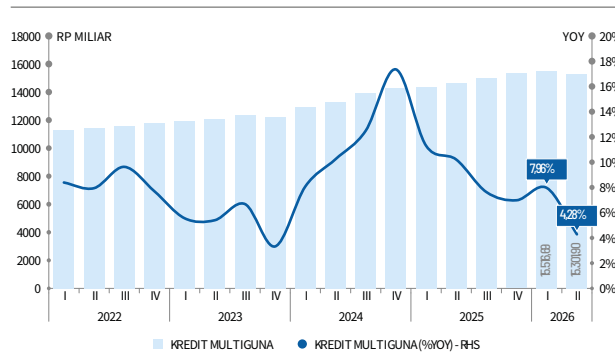


Grafik 1.16 Perkembangan Kredit Perdagangan di Kalimantan Selatan



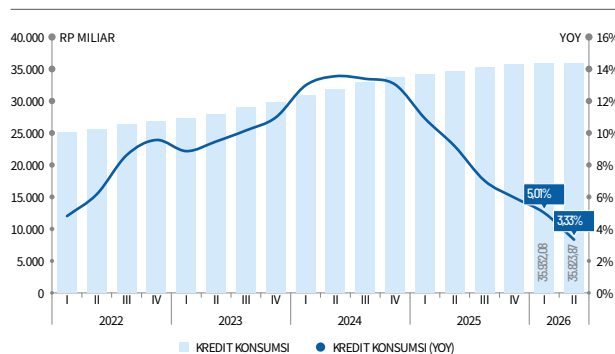
Grafik 1.17 Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor di Kalimantan Selatan

Normalisasi pola konsumsi juga tergambar dari perlambatan Kredit Konsumsi. Kredit Konsumsi mengalami perlambatan pertumbuhan, tumbuh 3,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy) (Grafik 1.19). Sementara itu, penyaluran Kredit Multiguna pada triwulan II 2026 tumbuh 4,28% (yoy), juga lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 7,96% (yoy) (Grafik 1.18).



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU) Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.18 Perkembangan Kredit Multiguna di Kalimantan Selatan



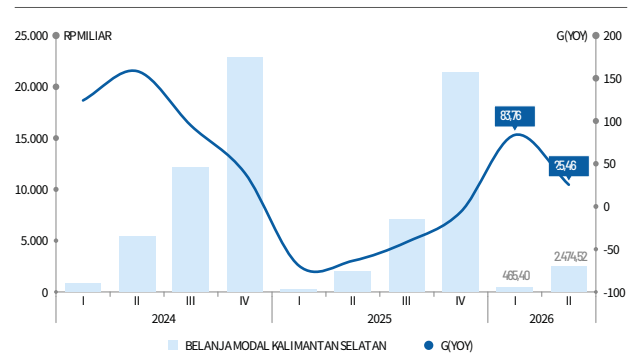
Sumber: Laporan Bank Umum (LBU) Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.19 Perkembangan Kredit Konsumsi di Kalimantan Selatan

1.1.5 LU Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan laporan tumbuh 6,27% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2026, seiring dengan penandatanganan kontrak konstruksi jembatan pulau laut pada 30 Maret 2026 dan pembangunan gerai KDKMP mendorong peningkatan kinerja LU Konstruksi. Peningkatan kinerja LU Konstruksi antara lain tercermin dari pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah yang tumbuh positif. Realisasi belanja modal pemerintah pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 25,46% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh 83,76% (yoy)

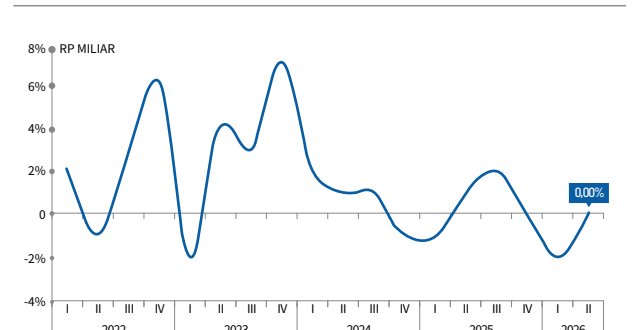
(Grafik 1.20). Peningkatan pertumbuhan LU Konstruksi disebabkan oleh lebih tingginya kegiatan konstruksi sektor pemerintah yang bersumber dari APBN.



Sumber: DJPK (Diolah)

Grafik 1.20 Realisasi Belanja Modal APBD Seluruh Pemda di Kalimantan Selatan

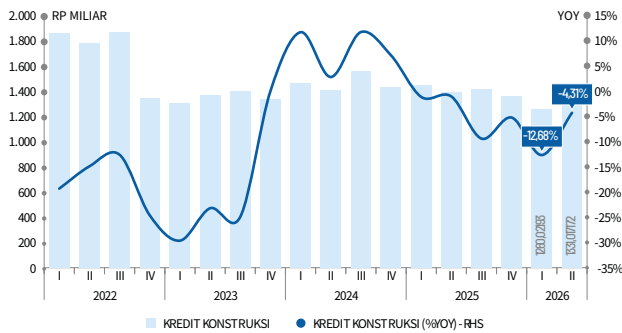
Peningkatan aktivitas LU Konstruksi juga tercermin dari perbaikan optimisme pelaku usaha konstruksi di Kalimantan Selatan pada Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Saldo Bersih Tertimbang (SBT) LU Konstruksi pada triwulan II 2026 yang sebesar 0,00%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada level sebesar -2,04% (Grafik 1.21).



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia (Diolah)

Grafik 1.21 Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha di Kalimantan Selatan

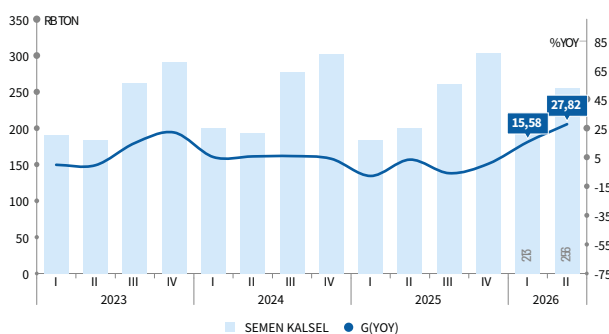
Lebih lanjut, perbaikan kinerja LU Konstruksi tercermin dari perkembangan kredit Konstruksi yang mengalami perbaikan kontraksi pada triwulan II 2026. Pada triwulan laporan, pertumbuhan kredit konstruksi terkontraksi sebesar -4,31% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan I 2026 yang terkontraksi -12,66% (yoy) (Grafik 1.22).



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU) Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.22 Perkembangan Kredit Konstruksi Kalimantan Selatan

Selain itu, data pertumbuhan pengadaan semen di Kalimantan Selatan tercatat meningkat. Volume pengadaan semen pada triwulan II 2026 lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026, tumbuh 27,82% (yoy) (Grafik 1.23). Pertumbuhan pengadaan semen yang terus tumbuh tinggi mengindikasikan potensi pertumbuhan proyek konstruksi yang baru berjalan pada triwulan III 2026 atau terdapat proyek besar yang akan segera berjalan di triwulan berikutnya (a.l Jembatan Pulau Laut dan KDKMP).

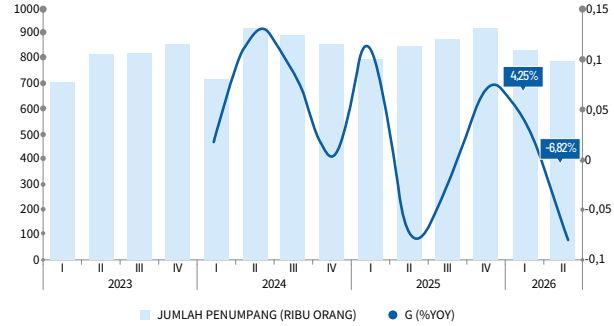


Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Diolah

Grafik 1.23 Perkembangan Pengadaan Semen di Kalimantan Selatan

1.1.6 LU Transportasi dan Pergudangan

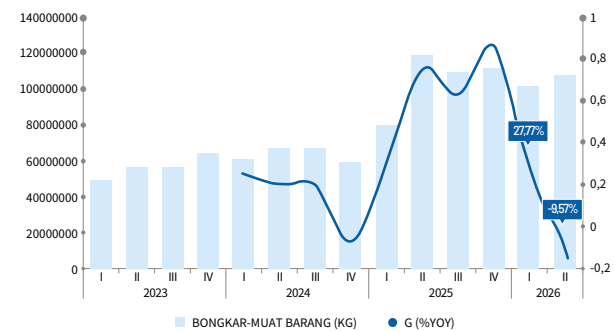
LU Transportasi dan Pergudangan (Trasngud) pada triwulan laporan tumbuh 4,62% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2026, seiring dengan penurunan jumlah penumpang dan volume bongkar muat barang di Kalimantan Selatan. Melandainya kinerja LU Transgud disebabkan oleh penurunan kinerja volume bongkar muat barang di pelabuhan dan bandara Kalimantan Selatan yang tercatat -9,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan volume pertumbuhan bongkar muat triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 27,77% (yoy).



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.24 Perkembangan Jumlah Penumpang Udara dan Laut Kalimantan Selatan

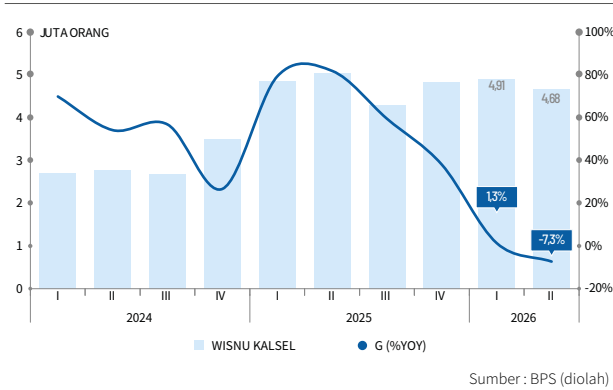
Selain itu, jumlah penumpang berangkat dan datang dari atau ke Kalimantan Selatan juga mengalami penurunan seiring normalisasi pasca berakhirnya konsolidasi berbagai seasonal drivers (Tahun Baru, Imlek, Ramadhan–Idul Fitri). Pertumbuhan jumlah penumpang pada triwulan II 2026 tercatat terkontraksi -6,82% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 4,25% (yoy).



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.25 Perkembangan Bongkar Muat Angkutan Udara dan Laut Kalimantan Selatan

Selanjutnya, melambatnya LU Transgud juga tercermin dari penurunan aktivitas wisatawan nusantara di Kalimantan Selatan. Penurunan ini disebabkan oleh berakhirnya konsolidasi berbagai seasonal drivers (Tahun Baru, Imlek, Ramadhan–Idul Fitri). Aktivitas rekreasi wisatawan nusantara (wisnus) pada triwulan I 2026 terkontraksi sebesar -7,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2026 yang tumbuh 1,3% (yoy).

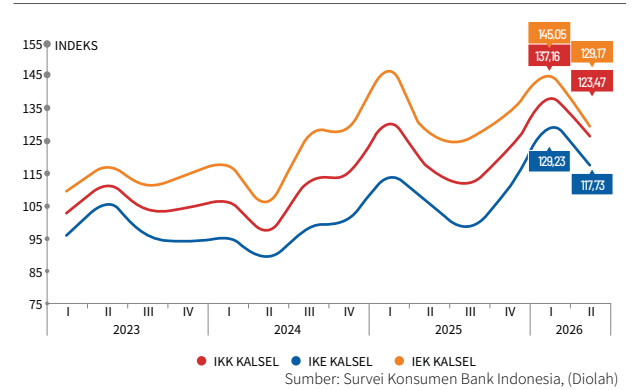

Grafik 1.26 Perkembangan Jumlah Wisnus Kalimantan Selatan

1.2 SISI PENGELUARAN

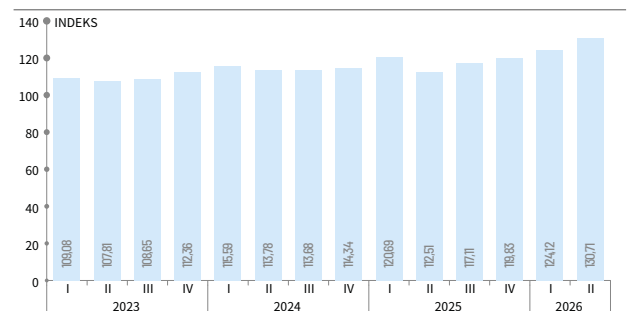
Dari sisi pengeluaran, ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh tinggi didorong oleh kinerja Ekspor. Kinerja Ekspor triwulan II tumbuh 5,77% (yoy), lebih tinggi dari triwulan I 2026 sebesar 3,02% (yoy), didorong oleh peningkatan kinerja ekspor komoditas batu bara seiring dengan level harga batu bara global yang berada pada level yang tinggi.

1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Kinerja Konsumsi RT pada triwulan II 2026 tumbuh 5,02% (yoy). Pertumbuhan Kinerja Konsumsi RT yang lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 5,69% (yoy) disebabkan oleh normalisasi konsumsi pasca berakhirnya konsolidasi berbagai seasonal drivers (Tahun Baru, Imlek, Ramadhan–Idul Fitri). Melandainya kinerja Konsumsi RT tercermin dari penurunan indeks keyakinan konsumen (IKK) Provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat berada pada level 123,47 pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang berada pada level 137,16 (Grafik 1.27).


Grafik 1.27 Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Kalimantan Selatan

Meskipun melambat, peningkatan Konsumsi RT yang tetap tumbuh tinggi tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan II 2026 yang tercatat sebesar 130,71, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 124,12. Peningkatan indeks penerimaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian (pekerjaan utama masyarakat Kalimantan Selatan) didorong oleh peningkatan NTP Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang seluruhnya mengalami peningkatan pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026.


Grafik 1.28 Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran (%yoy)

SEKTOR	2022	2023	2024	2025	2025				2026	TW.II 2026		
					I	II	III	IV		%YOY	PANGSA (%)	SOG
Konsumsi Rumah Tangga	5,21	5,19	5,37	5,33	5,49	5,50	5,06	5,27	5,69	5,02	47,48%	2,39
Konsumsi LNPR	5,02	8,32	13,61	5,18	2,98	6,68	4,88	6,13	6,84	5,46	1,05%	0,06
Konsumsi Pemerintah	-0,65	4,97	4,76	3,42	1,27	-1,78	6,86	6,56	18,91	13,34	10,37%	1,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,23	5,18	4,97	5,42	-0,18	5,74	7,58	7,95	7,44	7,28	22,34%	1,60
Perubahan Stok & Diskrepansi Statistik	-908,12	71,82	-55,92	-127,54	-81,85	-286,01	-331,72	-350,17	-127,77	-93,76	0,03%	-0,43
Ekspor Barang dan Jasa	13,29	7,54	4,96	-5,59	-14,97	-6,58	-2,80	1,78	3,02	5,77	73,97%	4,25
Impor Barang dan Jasa	14,45	8,48	5,80	-8,56	-21,22	-9,99	-4,30	1,12	4,91	7,11	55,24%	-3,86
PDRB	5,11	4,84	5,06	5,22	4,82	5,39	5,20	5,46	5,67	5,28	100,00	5,28

Sumber: BPS Kalsel (diolah), %yoy menunjukkan pertumbuhan tahunan, SOG = source of growth

1.2.2 Konsumsi Pemerintah

Pada triwulan II 2026, realisasi kinerja Konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh tinggi sebesar 13,34% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang hanya tumbuh 18,91% (yoy). Kinerja Konsumsi Pemerintah yang tetap tumbuh tinggi bersumber dari belanja langsung pemerintah pusat di daerah sejalan dengan program ekonomi kerakyatan – Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun demikian lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi pemerintah dibandingkan triwulan I 2026 terindikasikan disebabkan oleh evaluasi dan penghentian sementara sebagian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada penghujung triwulan II 2026.

Di sisi lain, realisasi Belanja APBN di Kalimantan Selatan mengalami perbaikan kontraksi dari 13,54% (yoy) menjadi -6,52% (yoy). Realisasi belanja APBN di Kalimantan Selatan mengalami penurunan pada komponen Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Secara kumulatif, belanja APBN di Kalimantan Selatan hingga Juni 2026 mencapai Rp14,63 triliun atau sebesar -6,52%, dari pagu anggaran (Tabel 1.3).

Kinerja belanja APBD tumbuh 1,56% (yoy), utamanya didorong oleh komponen belanja operasional. Pertumbuhan belanja APBD tersebut seiring dengan meningkatnya realisasi belanja APBD pada pos anggaran belanja operasional yang meningkat sebesar 6,09% (yoy) (Tabel 1.4).

1.2.3 Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/ PMTB)

Kinerja Investasi pada triwulan II 2026 tetap tumbuh tinggi, namun melandai dibandingkan triwulan I 2026. Kinerja investasi pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 7,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 7,44% (yoy). Perlambatan kinerja investasi sejalan dengan relatif lebih terbatasnya aktivitas konstruksi pada triwulan II 2026, utamanya bersumber dari *delay commissioning* smelter dan melambatnya pertumbuhan dapur SPPG. Selain itu, perlambatan kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 42,33% (yoy) pada triwulan II 2026. Perlambatan kinerja lebih dalam tertahan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang masih meningkat tinggi, sebesar 71,19% (yoy) pada triwulan II 2026 (Grafik 1.30).

Tabel 1.3 Perkembangan Realisasi Belanja APBN di Kalimantan Selatan

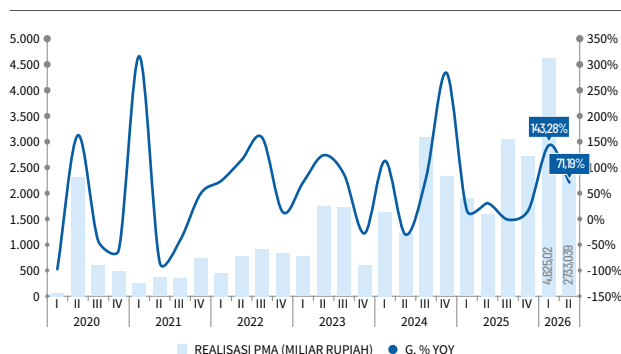
KOMPONEN	PAGU		REALISASI				GROWTH (% YOY)
	2025	2026	S.D. 30 JUNI 2025		S.D. 30 JUNI 2026		
			NOMINAL	PERSENTASE	NOMINAL	PERSENTASE	
Belanja Negara	41.848,70	29.355,98	15.652,86	37,40	14.632,81	49,85	-6,52
I. Belanja Pemerintah Pusat	11.277,69	11.183,99	3.371,26	29,89	5.047,57	45,13	49,72
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	30.571,01	19.171,99	12.281,60	40,17	9.585,24	50,00	-21,95

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Kalsel

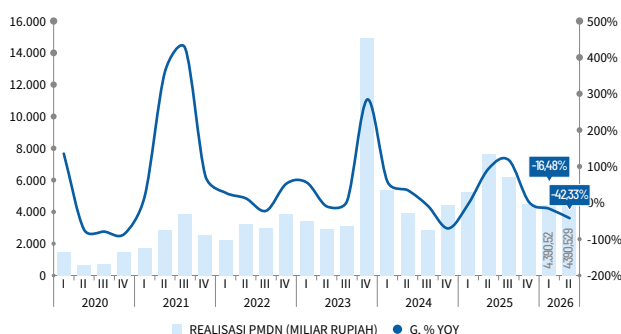
Tabel 1.4 Perkembangan Realisasi Belanja APBD di Kalimantan Selatan

URAIAN POS APBD	PAGU APBD			REALISASI S.D. TRIWULAN II		REALIASASI S.D. TRIWULAN II	
	2025	2026	PERTUMBUHAN (%)	2025	2026	2025	2026
Pendapatan Daerah	41.957,20	31.481,19	-24,97	19.375,02	14.839,20	46,18%	47,14%
Pendapatan Asli Daerah	8.395,57	9.280,67	10,54	4.347,07	4.587,97	51,78%	49,44%
Pendapatan Transfer	32.421,47	21.670,06	-33,16	14.711,40	9.847,34	45,38%	45,44%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.140,14	530,47	-53,47	316,56	403,88	27,77%	76,14%
Belanja Daerah	50.891,62	40.887,78	-19,66	14.350,52	14.574,51	28,20%	35,65%
Belanja Operasional	31.570,03	27.895,35	-11,64	10.042,51	10.654,06	31,81%	38,19%
Belanja Modal	12.847,22	8.759,78	-31,82	1.183,57	1.727,88	9,21%	19,73%
Belanja Tak Terduga	396,50	238,98	-39,73	6,55	14,43	1,65%	6,04%
Dana Transfer Pemda	6.077,88	3.993,67	-34,29	3.117,89	2.178,14	51,30%	54,54%

Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu



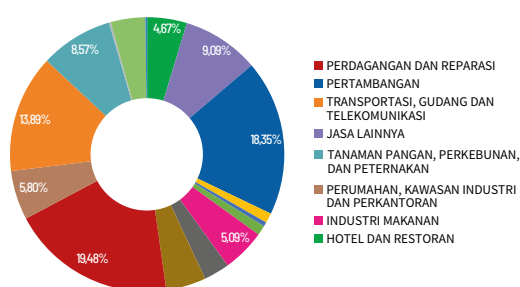
Sumber: BKPM (diolah)

Grafik 1.29 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)


Sumber: BKPM (diolah)

Grafik 1.30 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Secara umum, kinerja investasi baik PMA maupun PMDN masih didominasi oleh LU Perdagangan dan LU Pertambangan dengan pangsa masing-masing sebesar 19,48% dan 18,35% (Grafik 1.31).

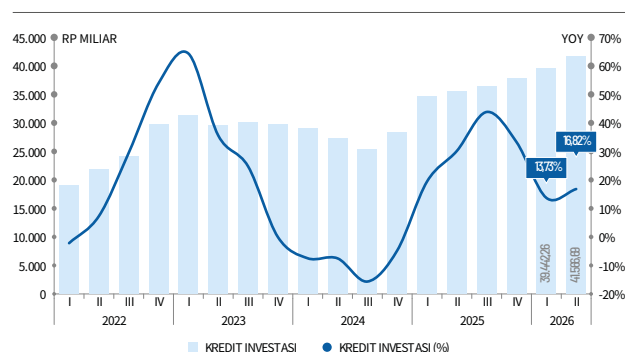


Sumber: BKPM (diolah)

Grafik 1.31 Pangsa Sektor PMA dan PMDN Tw-II 2026 Kalimantan Selatan

Pertumbuhan kinerja investasi yang tetap tinggi ditopang penyaluran kredit investasi pada triwulan II 2026 yang tumbuh 2 (dua) digit sebesar 16,82 (yoy) meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 13,73% (yoy). Masih tingginya pertumbuhan Kredit Investasi didorong oleh kegiatan investasi di

LU Pertambangan seiring perbaikan harga batu bara dunia yang mendorong pelaku usaha meningkatkan investasinya.

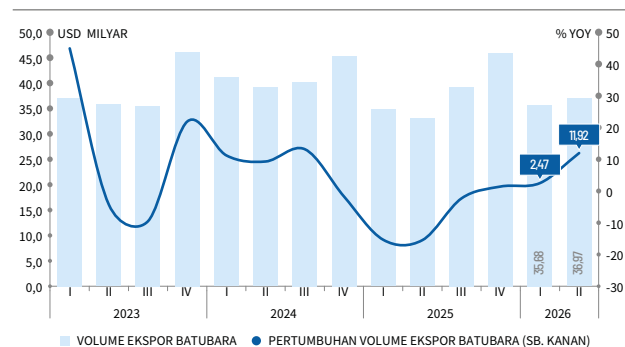


Sumber: LBU Bank Indonesia (Diolah)

Grafik 1.32 Realisasi Kredit Investasi Kalimantan Selatan

1.2.4 Ekspor

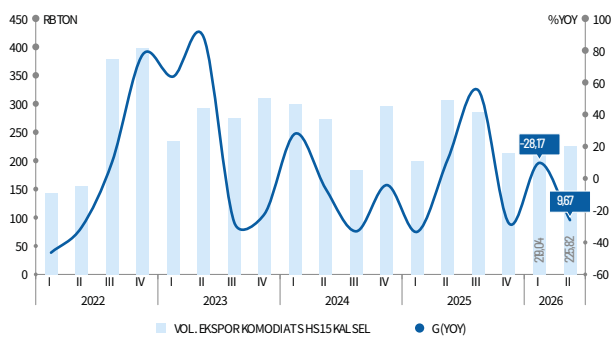
Pada triwulan II 2026, kinerja ekspor Kalimantan Selatan tercatat tumbuh 5,77% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2026 yang tumbuh 3,02% (yoy). Peningkatan kinerja ekspor terutama bersumber dari meningkatnya volume ekspor batu bara yang tercatat meningkat 11,92% (yoy), lebih tinggi dari triwulan I 2026 yang tumbuh 2,47% (yoy) (Grafik 1.33). Adapun beberapa negara tujuan ekspor batu bara di antaranya Tiongkok, India, Jepang dan ASEAN.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

Grafik 1.33 Pertumbuhan Volume Ekspor Batu Bara

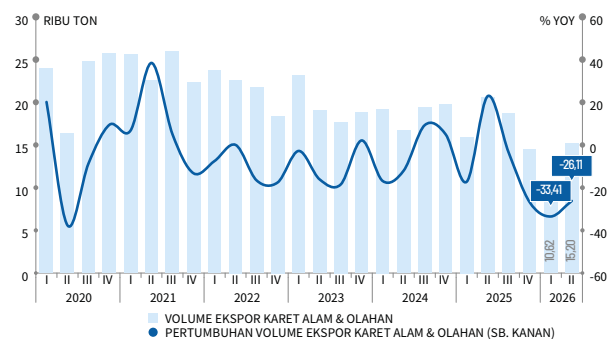
Di sisi lain, pertumbuhan kinerja ekspor Kalimantan Selatan yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan kinerja ekspor komoditas yang tergabung dalam HS 15. Ekspor komoditas yang tergabung dalam HS 15 terkontraksi sebesar -26,15% (yoy) disebabkan oleh penurunan input bahan baku seiring dengan gangguan produksi di sisi Hulu (LU Pertanian). (Grafik 1.34).



Sumber: Ditjen bea dan cukai, (Diolah)

Grafik 1.34 Pertumbuhan Volume Ekspor Komoditas HS 15

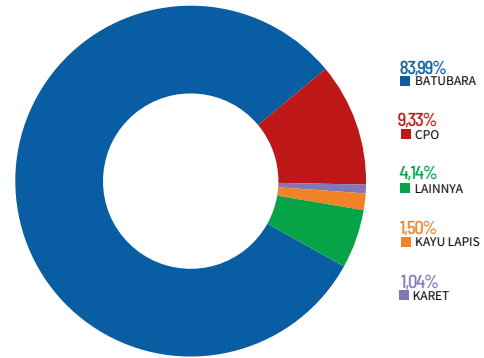
Selanjutnya, ekspor karet dan olahannya mengalami kontraksi 26,11% (yoy), membaik dibandingkan triwulan I 2026 yang terkontraksi 33,41% (yoy) (Grafik 1.35). Perlambatan kinerja ekspor komoditas karet dan olahan karet terutama disebabkan oleh melambatnya hasil sadapan dan produksi karet, antara lain akibat fluktuasi cuaca yang berdampak pada penurunan produktivitas tanaman karet. Lebih lanjut, permintaan global karet diperkirakan melandai akibat: i) meningkatnya penggunaan karet sintesis; ii) lemahnya pasar otomotif.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

Grafik 1.35 Pertumbuhan Volume Ekspor Karet Alam & Olahan

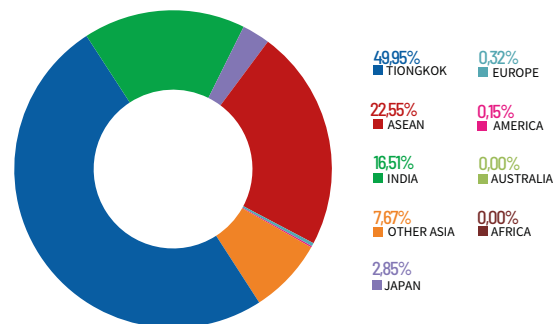
Komposisi nilai ekspor berdasarkan komoditas sampai dengan triwulan II 2026 masih didominasi oleh komoditas batu bara. Dominasi batu bara dalam struktur ekspor Kalimantan Selatan tercermin dari pangsa yang signifikan, yaitu 83,37% dari total ekspor Kalimantan Selatan. Pangsa nilai ekspor batu bara Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dari periode sebelumnya sebesar 83,99%, sejalan dengan perbaikan kinerja LU Pertambangan. Sementara itu, CPO menjadi komoditas ekspor terbesar kedua dengan pangsa sebesar 9,33%, diikuti kayu lapis sebesar 1,50% dan karet sebesar 1,04% (Grafik 1.36).



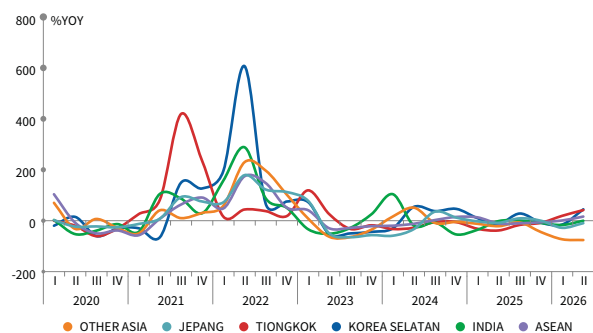
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

Grafik 1.36 Distribusi Nilai Ekspor Triwulan II 2026 Berdasarkan Komoditas

Berdasarkan negara tujuan, pangsa ekspor Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 ditujukan ke Tiongkok (49,95%), ASEAN (22,55%), India (16,51%), dan Negara Asia Lainnya (7,67%) (Grafik 1.37). Secara umum, pertumbuhan nilai ekspor negara mitra dagang utama tersebut tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perbaikan permintaan Tiongkok dan India di tengah peningkatan ketidakpastian global dan tensi geopolitik yang bersumber dari perang Iran vs US-Israel (Grafik 1.38).



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

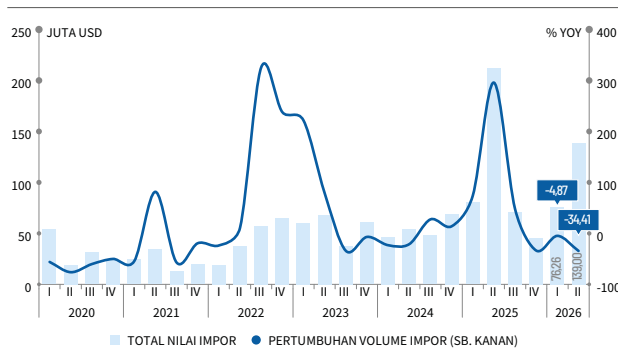
Grafik 1.37 Distribusi Nilai Ekspor Triwulan II 2026 Berdasarkan Negara Tujuan

Sumber: Data Ekspor Impor Bank Indonesia (Diolah)

Grafik 1.38 Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan

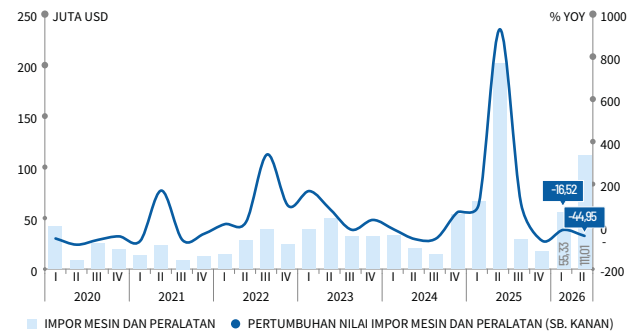
1.2.5 Impor

Impor Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 7,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,91% (yoy). Pertumbuhan impor didorong aktivitas impor barang dan jasa domestik. Di sisi lain, nilai impor LN pada triwulan II 2026 mengalami kontraksi sebesar -34,41% (yoy), terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan I 2026 yang terkontraksi sebesar -4,87% (yoy) (Grafik 1.39).

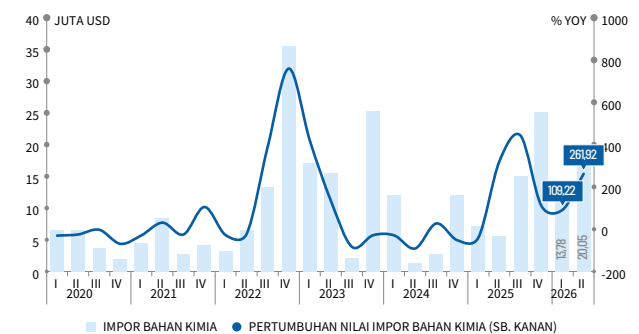


Grafik 1.39 Pertumbuhan Volume Impor Luar Negeri

Penurunan pertumbuhan nilai impor LN Kalimantan Selatan pada triwulan I 2026 terutama disebabkan oleh peningkatan impor mesin dan peralatan yang terkontraksi lebih dalam dari -16,52% (yoy) menjadi -44,95% (yoy) (Grafik 1.40). Di sisi lain, masih tingginya impor bahan kimia yang tumbuh 261,92% (yoy) menjadi pendorong pertumbuhan kinerja impor (Grafik 1.41).



Grafik 1.40 Perkembangan Volume Impor Mesin dan Peralatan

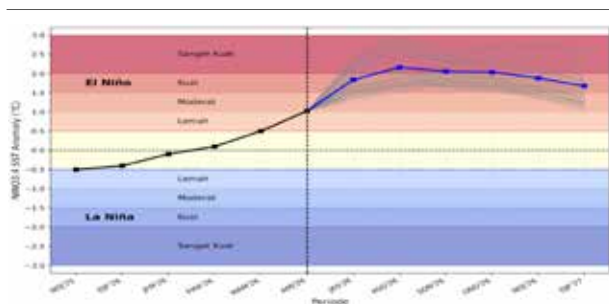


Grafik 1.41 Perkembangan Nominal Impor Bahan Kimia

BOKS 1

Risiko El Niño terhadap Aktivitas Ekonomi dan Rantai Pasok Strategis Kalimantan Selatan

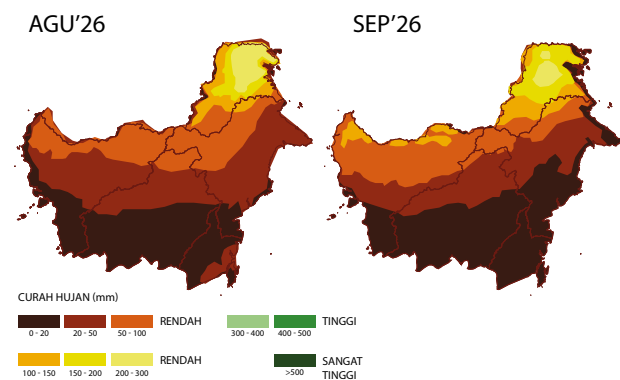
Kalimantan Selatan saat ini dihadapkan pada ancaman nyata anomali iklim El Niño ekstrem yang berisiko memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas makroekonomi daerah. Berdasarkan proyeksi termutakhir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Niño 2026 diperkirakan bertahan setidaknya hingga awal triwulan I 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Kondisi tersebut berpotensi mendorong musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang, terutama ketika bertepatan dengan periode puncak kemarau. BMKG juga memprakirakan IOD berkembang menuju fase positif pada September–Desember 2026, yang berpotensi semakin memperkuat kondisi kering di Indonesia (Grafik B1.1).



Gambar B1.1 Model Prediksi ENSO Dasarian III Juni 2026

Bagi Kalimantan Selatan, risiko tersebut menjadi semakin relevan karena puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus–September 2026, dengan sekitar 91,7% wilayah Kalimantan Selatan diproyeksikan memasuki puncak kemarau pada September (Gambar B1.2). Pada Agustus, sekitar 95,9% wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan

mengalami curah hujan kategori rendah dan seluruh wilayah diperkirakan memiliki sifat hujan di bawah normal. Kondisi tersebut meningkatkan risiko defisit air dan kekeringan meteorologis, sekaligus memperbesar kerentanan berbagai aktivitas ekonomi yang bergantung pada ketersediaan air dan kondisi hidrologis.



Sumber: BMKG, diolah

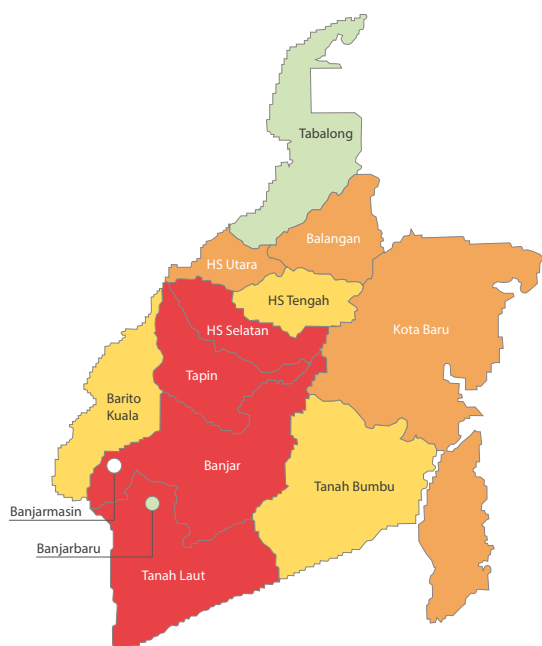
Gambar B1.2 Prediksi Deterministik Curah Hujan Bulanan

Tekanan hidrometeorologis tersebut mulai tercermin pada meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah telah memperkuat pengendalian karhutla di Kalimantan Selatan seiring memasuki puncak musim kemarau. Pemantauan SIPONGI juga menunjukkan perkembangan *hotspot* yang dinamis. Realisasi *hotspot* kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan melonjak tajam menjelang pertengahan Agustus 2026, dengan total realisasi pada 1–15 Agustus 2026 sebanyak 1.976 titik. *Hotspot* perlu dipandang sebagai indikator awal risiko kebakaran dan tidak secara langsung merepresentasikan luas area terbakar, sehingga setiap titik tetap memerlukan verifikasi lapangan.

Tabel B1.1 Realisasi Hotspot Bulanan Kalimantan Selatan Mei–Agustus 2026

NO	KABUPATEN / KOTA	MEI	JUNI	JULI	AGS 1–15*
1	Tapin	79	179	402	514
2	Hulu Sungai Selatan	29	36	138	367
3	Tanah Laut	4	8	206	228
4	Banjar	-	15	170	202
5	Hulu Sungai Utara	-	-	11	159
6	Balangan	13	21	119	107
7	Kotabaru	5	18	63	105
8	Hulu Sungai Tengah	3	-	20	74
9	Tanah Bumbu	1	-	18	74
10	Barito Kuala	-	-	9	71
11	Kota Banjarbaru	-	2	31	39
12	Tabalong	10	14	41	36
13	Kota Banjarmasin	-	-	-	-
13	GRAND TOTAL	144	293	1228	1976

Sumber: SIPONGI Kemenhut, diolah



KATEGORI JUMLAH HOTSPOT (AGUSTUS 1-15)

Tidak Ada
 Sangat Rendah
 Rendah
 Tinggi
 Sangat Tinggi

Sumber: BMKG

Gambar B1.3 Sebaran Hotspot Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Rangkaian tekanan tersebut berpotensi bertransmisi dari shock iklim menjadi shock pada sisi penawaran (supply-side shock) perekonomian daerah. Kekeringan dapat menekan produktivitas pertanian dan perkebunan

melalui keterbatasan air, sementara penurunan debit dan muka air sungai berpotensi mengganggu konektivitas logistik, khususnya pengangkutan komoditas melalui jalur sungai. Di sisi lain, karhutla dapat memperkuat gangguan melalui penurunan kualitas udara dan jarak pandang serta terganggunya mobilitas dan aktivitas ekonomi. Dengan struktur ekonomi Kalimantan Selatan yang masih ditopang oleh pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan, gangguan pada produksi maupun distribusi berpotensi menimbulkan efek rambatan (*spillover*) lintas sektor terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Risiko tersebut bukan semata-mata bersumber dari penurunan produksi, tetapi juga dari potensi gangguan pada konektivitas ekonomi. Pada sektor pertanian dan perkebunan, kekeringan berpotensi mengurangi pasokan komoditas dan bahan baku. Pada sektor pertambangan, penurunan muka air sungai dapat membatasi navigabilitas dan kapasitas angkut tongkang sehingga menciptakan *logistics bottleneck*, meskipun produksi di wilayah tambang tetap berlangsung. Selanjutnya, gangguan ketersediaan bahan baku maupun distribusi dapat diteruskan kepada industri pengolahan melalui kenaikan biaya input, keterlambatan pasokan, dan penurunan utilisasi kapasitas.

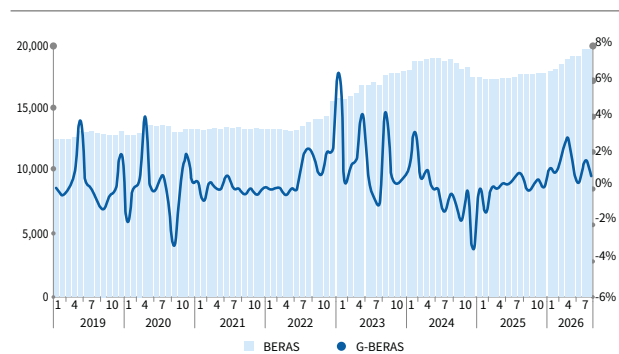
Kekeringan berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian Kalimantan Selatan melalui dua jalur utama, yaitu penurunan kapasitas produksi dan gangguan konektivitas logistik. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling cepat terdampak melalui penurunan ketersediaan air dan gangguan pola tanam. Data BPTPH per 31 Juli 2026 menunjukkan sekitar 6.691 hektare lahan padi di Kalimantan Selatan terdampak kekeringan, dengan sekitar 1,3 hektare di antaranya mengalami puso/gagal panen. Dampak terbesar tercatat di Tanah Laut, Barito Kuala, Banjar, dan Tanah Bumbu. Kondisi tersebut berpotensi menekan produktivitas dan pasokan pangan apabila kekeringan berlanjut hingga puncak kemarau, sehingga meningkatkan kebutuhan pasokan dari wilayah lain dan membuka ruang tekanan terhadap harga pangan.

Pada saat yang sama, kekeringan dapat memberikan tekanan melalui sisi logistik, khususnya pada transportasi sungai yang menjadi bagian penting dari rantai distribusi komoditas di Kalimantan. Salah satu *transmission channel* yang relevan bagi Kalsel adalah daerah aliran sungai (DAS) Barito. Penurunan debit dan muka air sungai berpotensi mengurangi kedalaman alur dan membatasi navigabilitas, sehingga tongkang dapat menghadapi pembatasan draft, pengurangan muatan, maupun peningkatan waktu tunggu. Dengan demikian, gangguan dapat muncul pada sisi distribusi meskipun aktivitas produksi di wilayah pertambangan tetap berjalan.

Kondisi tersebut berpotensi menciptakan *logistics bottleneck* pada rantai pasok batubara, melalui peningkatan *waiting time*, penurunan utilisasi armada, dan kenaikan biaya angkut per ton. Apabila berlangsung cukup lama, keterbatasan kapasitas angkut dapat menahan volume komoditas yang dikirim menuju terminal atau pelabuhan dan pada akhirnya memengaruhi realisasi pengiriman. Risiko kekeringan pada sektor pertambangan dengan demikian tidak hanya berasal dari potensi gangguan produksi, tetapi juga dari menurunnya keandalan konektivitas untuk mendistribusikan komoditas yang telah diproduksi.

Sementara itu, karhutla berpotensi menjadi *amplifier* yang memperkuat kedua jalur tersebut. Asap dapat menurunkan jarak pandang, mengganggu transportasi, serta membatasi aktivitas masyarakat dan operasional usaha. Apabila gangguan produksi dan distribusi terjadi secara bersamaan, tekanan pada sisi pasokan dapat meningkat dan memperbesar dampaknya terhadap harga maupun aktivitas ekonomi.

Tekanan pada sisi pasokan akibat kekeringan tersebut perlu dicermati dari pergerakan harga beras yang secara historis menjadi salah satu pendorong utama inflasi komoditas pangan di Kalimantan Selatan pada setiap episode El Niño.



Sumber: PIHPS, diolah

Grafik B1.1 Harga Beras

Hingga Juni 2026, inflasi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 4,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada Mei 2026 yang tercatat sebesar 4,22% (yoy), dengan beras tercatat sebagai komoditas penyumbang andil inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Jika dibandingkan dengan episode El Niño sebelumnya, tekanan harga beras pada 2026 masih berada pada tingkat yang lebih moderat. Pada El Niño 2023 yang berkategori kuat, inflasi beras di Kalimantan Selatan sempat mencapai 21,98% (yoy) pada Agustus 2023 yang merupakan awal dari El Niño, jauh melampaui inflasi umum pada periode tersebut yang berkisar 4,36% (yoy). Beras turut menjadi salah satu dari tiga komoditas dengan andil inflasi terbesar sepanjang 2023 bersama rokok kretek filter dan emas perhiasan. Sementara itu, pada El Niño 2019 yang berkategori moderat, tekanan harga beras relatif terbatas. Inflasi di Kalimantan Selatan pada September 2019 tercatat sebesar 4,05% (yoy), dengan beras menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi, namun tidak mendekati lonjakan yang terjadi pada 2023 (Tabel B1.2).

Tabel B1.2 Perubahan Harga Beras Provinsi Kalimantan Selatan Pada Periode El Niño

PERIODE EL NIÑO	PERUBAHAN MTM	PERUBAHAN YOY
Juli 2019	0.00%	4.00%
Agustus 2019	-0.77%	3.61%
Agustus 2023	-0.89%	21.98%
September 2023	4.80%	25.99%
Juni 2026	0.26%	10.47%
Juli 2026	1.58%	11.56%

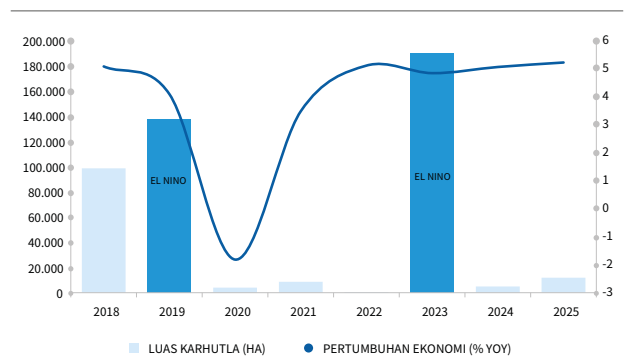
Sumber: PIHPS, diolah

Namun, risiko tersebut tetap perlu diantisipasi mengingat periode puncak kemarau masih berlangsung dan El Niño diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Apabila luas lahan terdampak kekeringan dan puso terus meningkat seiring perpanjangan periode kekeringan, sementara gangguan pasokan berlangsung lama, risiko rambatan ke inflasi pangan khususnya beras berpotensi meningkat dan mendekati pola yang terjadi pada El Niño 2023, kondisi tersebut dapat semakin kuat apabila terjadi bersamaan dengan gangguan distribusi akibat rendahnya muka air sungai maupun karhutla yang menghambat mobilitas.

Dengan demikian, pergerakan harga beras dapat menjadi *early warning indicator* dalam memantau transmisi risiko iklim terhadap inflasi daerah.

Perluasan lahan puso, perkembangan harga gabah dan beras di tingkat produsen hingga konsumen, serta arus pasokan dari sentra produksi di luar Kalimantan Selatan menjadi indikator penting untuk memantau apakah tekanan El Niño mulai bergeser dari risiko produksi menjadi tekanan inflasi yang lebih persisten. Di sisi lain, ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang relatif tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi bantalan mitigasi dalam meredam tekanan harga, sehingga efektivitas stabilitas pasokan dan distribusi menjadi faktor kunci dalam menentukan besarnya transmisi *shock* iklim terhadap inflasi pangan.

Secara keseluruhan, rantai disrupsi ekologis akibat anomali cuaca tersebut berisiko kuat bertransmisi menjadi guncangan eksternal (*external shock*) yang menahan momentum pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ke depan. Jika tidak segera dimitigasi melalui bauran kebijakan yang tepat, ancaman cuaca ekstrem yang membayangi paruh kedua tahun ini berpotensi besar mengulang sejarah perlambatan ekonomi yang pernah terjadi pada puncak krisis El Niño tahun 2023 silam (Grafik B1.2).



Sumber: SIPONGI Kemenhut & BPS, diolah

Grafik B1.2 Luas Karhutla dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

BOKS 2

Unlocking Borneo's Potential: Akselerasi Investasi Berkualitas Melalui Pamor Borneo Investment Forum

Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 tumbuh solid sebesar 5,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan sebesar 4,08% (yoy). Namun demikian, penguatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan masih memerlukan diversifikasi sumber pertumbuhan. Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor berbasis sumber daya alam (SDA) menegaskan pentingnya percepatan transformasi menuju aktivitas ekonomi bernilai tambah lebih tinggi melalui hilirisasi, peningkatan produktivitas, dan penguatan investasi sektor riil.

Pada 2026, perekonomian Kalimantan Selatan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,6–5,4% (yoy), ditopang oleh berlanjutnya aktivitas hilirisasi di Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), program swasembada pangan, serta peningkatan investasi dan produksi. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 8,1% pada 2029 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kalimantan Selatan 2025–2029. Kesenjangan antara pertumbuhan aktual dan target tersebut menunjukkan perlunya akselerasi investasi yang tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan nominal pembentukan modal, tetapi juga pada proyek yang *clean and clear*, memiliki dampak pengganda tinggi, memperluas basis produksi, menciptakan keterkaitan antarsektor, dan meningkatkan daya saing daerah.

Dalam konteks tersebut, Pamor Borneo Investment Forum (PBIF) merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan guna memperkuat daya saing ekonomi melalui penguatan investasi. Pamor

Borneo Investment Forum 2026 mengusung tema “*Unlocking Kalimantan's Value-Added Growth*” yang dilaksanakan pada 7–9 Agustus 2026 di Banjarmasin.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Seminar Koordinasi dan *Debottlenecking Investasi* yang menghadirkan Bapak Alexius Donanto H.W. (Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan), Bapak Dr. Ichsan Zulkarnain (Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM), Bapak Dr. Reza Siregar (*Managing Director, Chief Economist* Danantara), dan Bapak Dr. Sayid Irwan (Chairman BEBC). Seminar membahas berbagai hambatan yang berpotensi menghambat realisasi investasi sekaligus merumuskan langkah penyelesaiannya. Pembahasan menekankan bahwa proyek yang ditawarkan kepada investor tidak hanya perlu memenuhi prinsip *clean and clear*, tetapi juga memerlukan dukungan regulasi, kepastian lahan dan tata ruang, kesiapan infrastruktur dan utilitas, skema pembiayaan yang jelas, serta kepastian pasar dan *offtaker*. Pendekatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesiapan proyek sebelum memasuki tahap peninjauan dengan investor.



Gambar B2.1 Seminar Koordinasi dan *Debottlenecking Investasi*

Kemudian dilanjutkan kegiatan *One-on-One Meeting (Investment Forum)* sebagai platform promosi investasi untuk mempertemukan *project owner* dengan investor. Pendekatan PBIF 2026 diperkuat menjadi lebih *targeted* dan *result-oriented* melalui kurasi proyek, pemetaan investor berdasarkan sektor dan model bisnis, *pre-business matching*, pertemuan terjadwal, serta mekanisme tindak lanjut pascakegiatan. Proyek yang dipromosikan diarahkan memenuhi prinsip *clean and clear*, antara lain didukung *project owner* yang kredibel, legalitas dan kesiapan lahan, kesesuaian tata ruang, kejelasan skema pembiayaan, kajian kelayakan finansial, serta materi promosi yang memadai. Kurasi tersebut ditujukan untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan investor *confidence* terhadap proyek yang ditawarkan.

Pipeline PBIF 2026 mencakup 15 proyek investasi lintas Kalimantan dengan 7 proyek investasi dari Kalimantan Selatan pada berbagai sektor (Tabel B2.1), antara lain hilirisasi batu bara menjadi metanol, energi terbarukan, pengolahan sawit, agroindustri pangan, pengelolaan sampah, penyediaan air minum, fasilitas kesehatan, pelabuhan, dan ekowisata. Keragaman proyek tersebut mencerminkan upaya memperluas sumber pertumbuhan melalui pengembangan sektor bernilai tambah dan penguatan infrastruktur pendukung produktivitas.

Rangkaian *one-on-one meeting* menghasilkan 32 *Letter of Interest (LoI)* dari calon investor dengan total komitmen investasi sebesar Rp64,45 triliun. Capaian tersebut menunjukkan adanya respons positif investor terhadap peluang investasi di Kalimantan sekaligus memperkuat *investment pipeline* yang telah dikurasi. Meskipun LoI masih merupakan indikasi awal minat investasi dan belum mencerminkan realisasi investasi, capaian tersebut menjadi dasar penting untuk mendorong proyek menuju tahapan *due diligence*, negosiasi, *financial close*, dan selanjutnya realisasi investasi.



Gambar B2.2 Seremoni Letter of Interest (LoI)

Dari sisi dampak ekonomi, Pamor Borneo Investment Forum berpotensi memperkuat transmisi investasi terhadap pertumbuhan melalui tiga jalur utama. Pertama, percepatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan proyek *coal-to-methanol*, *oleochemical*, *oleofood*, pengolahan hasil perikanan, dan industri pangan terintegrasi yang dapat memperpanjang rantai produksi dan meningkatkan penggunaan input lokal. Kedua, penguatan infrastruktur pendukung produktivitas melalui proyek pelabuhan, air minum, energi terbarukan, rumah sakit, *cold storage*, dan pengelolaan sampah yang berpotensi menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Ketiga, penguatan integrasi ekonomi Kalimantan melalui kolaborasi pemerintah daerah, Danantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, lembaga pembiayaan, perbankan, asosiasi usaha, serta jejaring seperti BIMP-EAGA.

Ke depan, efektivitas kegiatan PBIF dapat terus diperkuat tidak hanya sampai *Letter of Interest (LoI)*, tetapi juga perkembangan *investment pipeline* menuju tahapan *due diligence*, komitmen pembiayaan, penyelesaian *bottleneck*, hingga realisasi investasi. Untuk mendukung hal tersebut, pengembangan *project monitoring dashboard* terpadu dapat menjadi instrumen untuk memantau perkembangan proyek secara berkala, antara lain mencakup status perizinan, kesiapan lahan, kelengkapan dokumen, perkembangan komunikasi dengan investor, isu yang memerlukan fasilitasi, target



waktu, dan *transaction milestones*. Pemantauan secara berkala bersama *project owner* dan pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga kesinambungan proses dan mempercepat tindak lanjut pascaforum.

Sejalan dengan hal tersebut, penguatan kualitas *investment pipeline* dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui kepastian hukum, penguatan validasi asumsi finansial, penyusunan *data room*, peningkatan kapasitas *project owner*, serta penyediaan materi promosi dalam format dwibahasa. Proyek yang masih dalam tahap peninjauan dapat terus disempurnakan melalui dukungan kepala daerah dan penguatan *value proposition*, penajaman skala dan skema investasi, kejelasan prospek pasar, serta pemetaan calon investor yang sesuai dengan karakteristik proyek. Langkah

tersebut diharapkan semakin meningkatkan kesiapan proyek dan memperluas peluang terjadinya *business matching* yang produktif.

Dengan penguatan kurasi proyek, investor matching yang semakin terarah, fasilitasi penyelesaian berbagai bottleneck, serta tindak lanjut yang terukur dan berkesinambungan, Pamor Borneo diharapkan dapat terus berkembang dari forum promosi menjadi platform investment facilitation yang mempertemukan potensi proyek dengan sumber pembiayaan secara lebih efektif. Pada akhirnya, upaya tersebut diharapkan dapat mendorong investasi berkualitas, mempercepat hilirisasi dan peningkatan produktivitas, serta memperluas sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan menuju pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

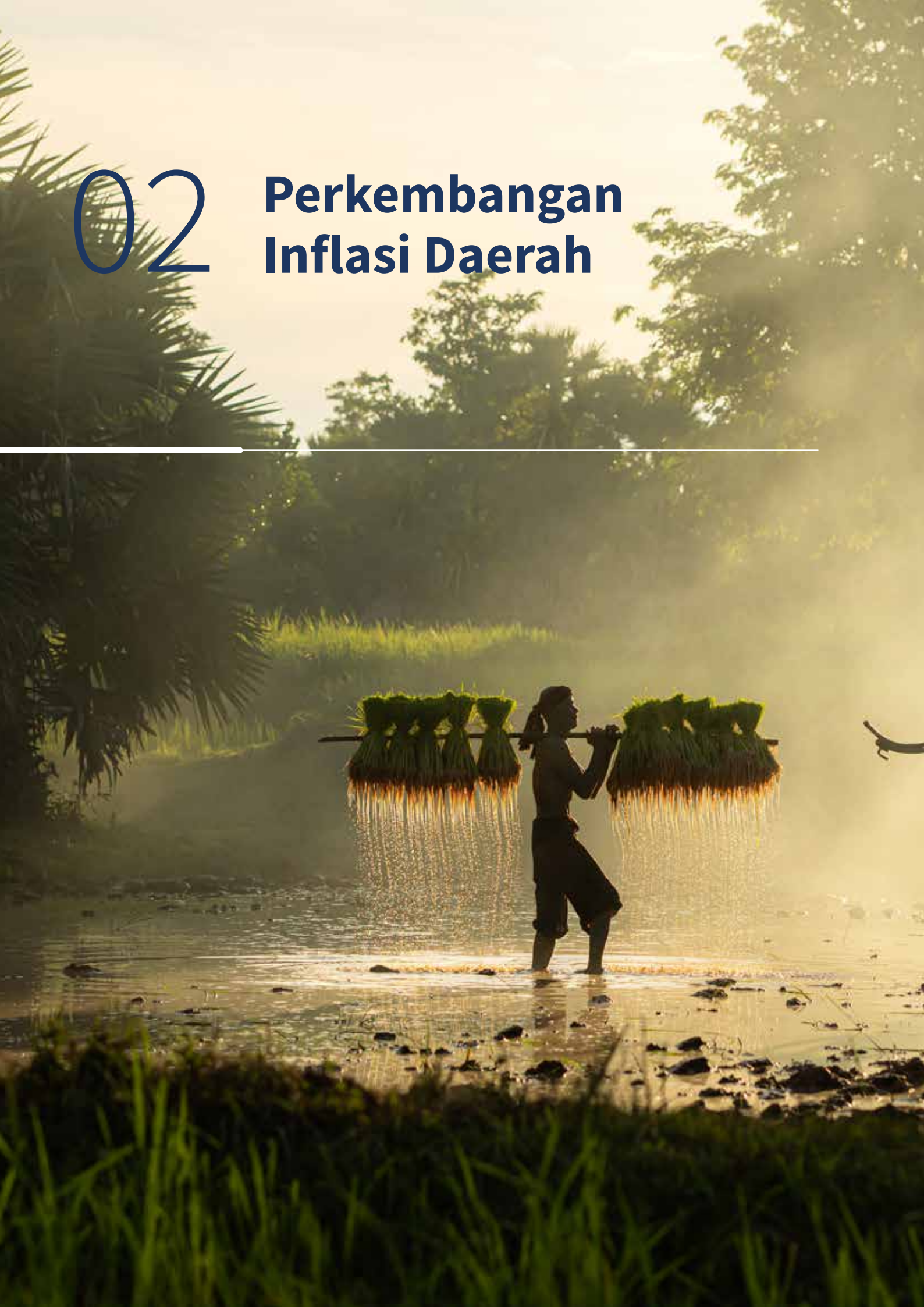
Tabel B2.1 Daftar Proyek Investasi Pamor Borneo Investment Forum 2026

NO	NAMA PROYEK	SEKTOR	LOKASI	PROJECT OWNER	NILAI INVESTASI*	
1	Pembangunan Pabrik Pengolahan Batubara Menjadi Metanol	Manufaktur	Kalimantan Selatan	Bappelitbang Kab. Tapin	USD 2.56 Miliar	IDR 46.17 Triliun
2	PLTA Kusan	EBT	Kalimantan Selatan	DPMPSTSP Kab. Tanah Bumbu	USD 144.44 Juta	IDR 2.60 Triliun
3	Pembangunan Pelabuhan Margasari Baru	Infrastruktur	Kalimantan Selatan	Bappelitbang Kab. Tapin	USD 93.89 Juta	IDR 1.69 Triliun
4	Pengembangan Food Estate Rawa Batang Banyu	Agrindustri	Kalimantan Selatan	Bappelitbang Kab. Tapin	USD 19.17 Juta	IDR 345 Miliar
5	Pusat Peternakan Agribisnis Tabalong Terintegrasi	Agrindustri	Kalimantan Selatan	Bapperida Kab. Tabalong	USD 19.11 Juta	IDR 344 Miliar
6	Budidaya Ikan Bandeng Terintegrasi Industri Pengalengan	Agrindustri	Kalimantan Selatan	DPMPSTSP Kab. Tanah Bumbu	USD 14.17 Juta	IDR 255 Miliar
7	Optimalisasi Cold Storage dan Rumah Potong Unggas Modern	Agrindustri	Kalimantan Selatan	DKP3 Kota Banjarmasin	USD 2.97 Juta	IDR 53.5 Miliar
8	Industri Oleokimia di KEK Maloy	Manufaktur	Kalimantan Timur	PT MBTK	USD 477.78 Juta	IDR 8.60 Triliun
9	Industri Oleofood di KEK Maloy	Manufaktur	Kalimantan Timur	PT MBTK	USD 169.44 Juta	IDR 3.05 Triliun
10	Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Semoi	Infrastruktur	Kalimantan Timur	DPMPSTSP Kota BPP	USD 7.22 Juta	IDR 130 Miliar
11	Proyek Budidaya Udang Vaname	Perikanan	Kalimantan Tengah	DPMPSTSP Prov. Kalteng	USD 169.44 Juta	IDR 3.05 Triliun
12	Pengolahan Sampah di Provinsi Kalimantan Tengah	Manufaktur	Kalimantan Tengah	DPMPSTSP Prov. Kalteng	USD 33.28 juta	IDR 599 Miliar
13	Ekowisata Palangka Raya	Pariwisata	Kalimantan Tengah	Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya	USD 7.87 Juta	IDR 141.6 Miliar
14	Pembangunan Pelabuhan Barang Bebas Kabupaten Tana Tidung	Agrindustri	Kalimantan Utara	DPMPSTSP Prov. Kaltara	USD 45.00 Juta	IDR 810.00 Miliar
15	Pembangunan Rumah Sakit Tanjung Selor	Jasa Kesehatan	Kalimantan Utara	DPMPSTSP Prov. Kaltara	USD 26.42 Juta	IDR 475.64 Miliar
TOTAL NILAI PROYEK					USD 3.79 Miliar	IDR 68.31 Triliun



02

Perkembangan Inflasi Daerah





Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 4,47% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2026 sebesar 4,83% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 2,74% (yoy).

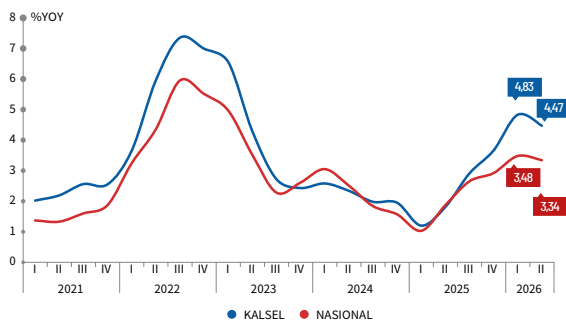
Secara spasial, tekanan inflasi terjadi di seluruh kota/kabupaten sampel di Provinsi Kalimantan Selatan. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tanah Laut sebesar 5,27% (yoy), diikuti Kabupaten Hulu Sungai Tengah 4,54% (yoy), Kota Banjarmasin 4,33% (yoy), Tanjung 4,17% (yoy), dan Kabupaten Kotabaru 3,74% (yoy).

Berdasarkan perkembangan kelompoknya, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatatkan inflasi sebesar 5,78% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,68% (yoy) di mana tekanan bersumber dari kenaikan harga beras dan minyak goreng seiring meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Kelompok Transportasi juga berbalik mengalami inflasi sebesar 3,68% (yoy) dari deflasi -0,28% (yoy) pada triwulan I 2026, seiring transmisi kenaikan harga energi global ke tarif jasa angkutan. Sebaliknya, inflasi kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya melandai menjadi 16,07% (yoy) dari 23,24% (yoy) pada triwulan sebelumnya, yang didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren harga emas dunia. Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh deflasi komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras akibat kelebihan pasokan, serta deflasi pada kelompok Pakaian dan Alas Kaki.

Ke depan, pengendalian inflasi terus diperkuat melalui koordinasi TPIP-TPID di Provinsi Kalimantan Selatan. Sepanjang triwulan II 2026, upaya pengendalian inflasi dilakukan antara lain melalui High Level Meeting (HLM) TPID di sejumlah kota/kabupaten, penyelenggaraan operasi pasar dan gerakan pasar murah, penyaluran beras SPHP, percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) padi, serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

2.1 PERKEMBANGAN INFLASI

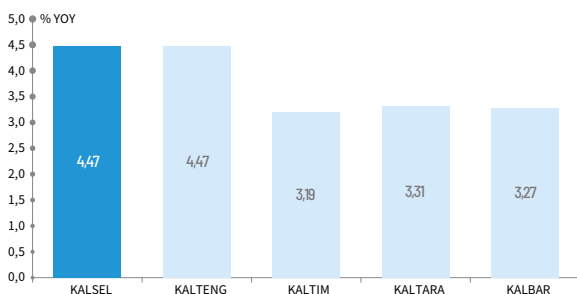
Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 4,47% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2026 sebesar 4,83% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy) (Grafik 2.1) dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 2,74% (yoy).



Sumber: BPS (diolah)

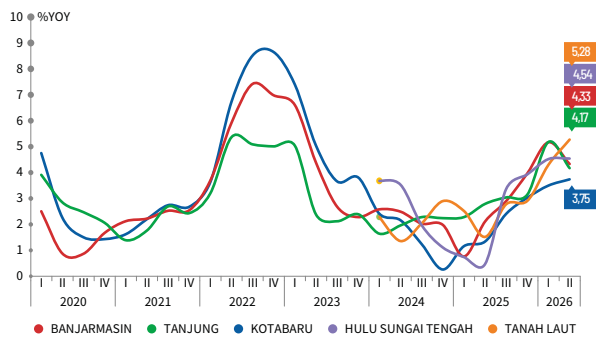
Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan

Realisasi inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II merupakan salah satu yang tertinggi di wilayah Kalimantan (Grafik 2.2). Sementara itu, secara spasial, Tanah Laut mencatatkan inflasi tertinggi yaitu sebesar 5,27% (yoy), diikuti oleh Hulu Sungai Tengah sebesar 4,54% (yoy), Banjarmasin 4,33% (yoy), Tanjung 4,17% (yoy), dan Kotabaru sebesar 3,74% (yoy) (Grafik 2.3).



Sumber : Berita Resmi Statistik Inflasi, BPS

Grafik 2.2 Perbandingan Gabungan Kota Inflasi untuk Provinsi se-Kalimantan pada Triwulan II 2026



Sumber : BPS (diolah)

Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi Kota Banjarmasin, Tanjung, Kab. Kotabaru, Kab. Hulu Sungai Tengah, dan Kab. Tanah Laut

Tekanan inflasi pada triwulan II 2026 utamanya bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil inflasi tahunan masing-masing sebesar 1,76% (yoy) dan 1,30% (yoy) (Tabel 2.1). Pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, tercatat mengalami peningkatan harga pada komoditas beras dan minyak goreng seiring dengan meningkatnya biaya produksi dan distribusi akibat kenaikan biaya bahan bakar yang terdampak kenaikan harga minyak dunia. Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh meningkatnya harga komoditas emas perhiasan, seiring dengan tren kenaikan harga emas dunia di tengah tingginya ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah (Tabel 2.2).

Tabel 2.1 Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II 2026 Menurut Kelompok

NO	KELOMPOK	INFLASI (%YOY)	ANDIL (%YOY)
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	5,78	1,76
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,21	0,01
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,49	0,22
4	Perlengkapan, Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,68	0,07
5	Kesehatan	4,16	0,15
6	Transportasi	3,68	0,39
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,79	0,10
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,51	0,01
9	Pendidikan	3,64	0,14
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	2,57	0,32
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	16,07	1,30

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.2 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi pada Triwulan II 2026 (%yoy)

NO	KOMODITI	KELOMPOK
1	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
2	Beras	Makanan, Minuman, dan Tembakau
3	Minyak Goreng	Makanan, Minuman, dan Tembakau
4	Bensin	Transportasi
5	Sigaret Kretek Mesin	Makanan, Minuman, dan Tembakau
6	Cabai Rawit	Makanan, Minuman, dan Tembakau
7	Ikan Papuyu	Makanan, Minuman, dan Tembakau
8	Ikan Nila	Makanan, Minuman, dan Tembakau
9	Bahan Bakar Rumah Tangga	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga
10	Tarif Rumah Sakit	Kesehatan

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.3 Komoditas Utama Penyumbang Deflasi pada Triwulan II 2026 (%yoy)

NO	KOMODITI	KELOMPOK
1	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman, dan Tembakau
2	Baju Muslim Pria	Pakaian dan Alas Kaki
3	Telur Ayam Ras	Makanan, Minuman, dan Tembakau
4	Pengharum Cuci	Perlengkapan, Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga
5	Kelapa	Makanan, Minuman, dan Tembakau
6	Baju Kaos Tanpa Kerah	Pakaian dan Alas Kaki

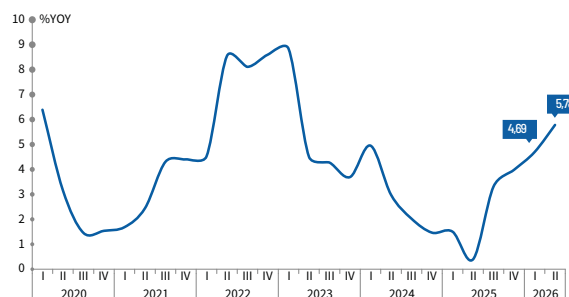
Sumber: BPS, diolah

Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang disebabkan oleh kelebihan pasokan pada komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras. Selain itu, beberapa komoditas juga mengalami deflasi pada kelompok Pakaian dan Alas Kaki seperti baju muslim pria dan baju kaos tanpa kerah, serta Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga seperti pengharum cucian (Tabel 2.3).

2.2 INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK PENGELUARAN

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada triwulan II 2026 didorong oleh peningkatan tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil 1,76%, yoy). Selanjutnya, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (andil 1,30%, yoy); kelompok Transportasi (andil 0,39%, yoy); kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (andil 0,32%, yoy); kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (andil 0,22%, yoy); kelompok Kesehatan (andil 0,15%, yoy); kelompok Pendidikan (andil 0,14%, yoy); kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (andil 0,10%, yoy); kelompok Perlengkapan,

Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (andil 0,07%, yoy); kelompok Pakaian dan Alas Kaki (andil 0,01%, yoy); dan kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya (andil 0,01%).



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.4 Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

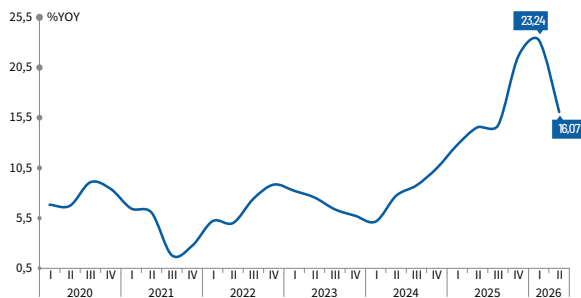
2.2.1 Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Pada triwulan II 2026, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 5,78% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi tahunan sebesar 4,68% (yoy) (Grafik 2.4). Inflasi utamanya berasal dari subkelompok Makanan yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 6,21% (yoy). Kenaikan harga pada subkelompok Makanan didorong oleh peningkatan harga komoditas dominan seperti beras dan minyak goreng dengan andil masing-masing sebesar 0,51% (yoy) dan 0,22% (yoy). Kenaikan harga beras di Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 didorong kombinasi tekanan produksi musiman pasca panen raya nasional, naiknya biaya distribusi dan input seperti ongkos transportasi, bibit, dan pupuk, serta keterbatasan pasokan beras premium dari luar Kalsel. Lebih lanjut, kenaikan harga minyak goreng bersifat *cost-push*, dipicu lonjakan harga CPO global dan bahan baku kemasan plastik akibat konflik Timur Tengah.

2.2.2 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada triwulan II 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 16,07% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi tahunan sebesar 23,24% (yoy) (Grafik 2.5). Subkelompok Perawatan Pribadi Lainnya mengalami inflasi 32,02% (yoy) dan menjadi penyumbang utama inflasi kelompok

Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Selanjutnya, subkelompok Jasa Lainnya mengalami inflasi 2,75% (yoy) dan subkelompok Perawatan Pribadi sebesar 2,26% (yoy). Sedangkan subkelompok Perlindungan Sosial, Asuransi, dan Layanan Kebudayaan tidak mengalami perubahan. Tekanan inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya terutama disebabkan oleh peningkatan harga komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi tahunan sebesar 1,21% (yoy) yang sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia akibat konflik Timur Tengah. Namun dibandingkan dengan triwulan I 2026, harga emas pada triwulan II 2026 mengalami penurunan akibat *profit taking* dari investor serta penguatan Dollar sejalan dengan penguatan *U.S. Dollar Index* (DXY) dan ekspektasi *higher for longer Fed Fund Rate* (FFR).



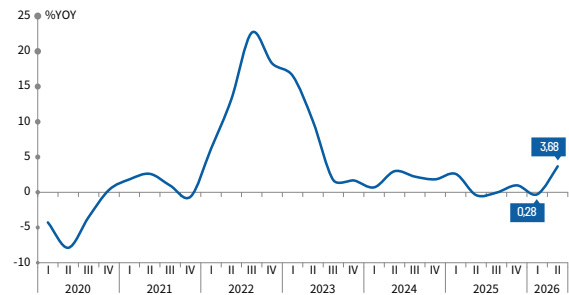
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.5 Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

2.2.3 Kelompok Transportasi

Pada triwulan II 2026, kelompok Transportasi tercatat mengalami inflasi sebesar 3,68% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan deflasi tahunan sebesar -0,28% (yoy) (Grafik 2.6). Inflasi utamanya didorong oleh subkelompok Jasa Angkutan yang mengalami inflasi sebesar 8,51% (yoy), diikuti dengan subkelompok Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi sebesar 4,00% (yoy), dan subkelompok Pembelian Kendaraan sebesar 1,54% (yoy). Tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi bersumber dari transmisi konflik geopolitik Timur Tengah ke harga energi domestik. Jasa Angkutan naik akibat lonjakan harga avtur yang mendorong pemerintah mengizinkan maskapai menerapkan fuel surcharge hingga 50% dari tarif batas atas mulai Mei 2026, diperkuat tingginya permintaan saat libur sekolah Juni. Sementara Pengoperasian Peralatan Transportasi

Pribadi naik seiring penyesuaian berulang harga BBM nonsubsidi, dengan Pertamina di Provinsi Kalimantan Selatan melonjak 31,78% menjadi Rp17.000 per liter per 10 Juni 2026, meski BBM subsidi Pertalite dan Biosolar tetap ditahan.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.6 Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi

2.3 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pengendalian inflasi tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi kebijakan yang semakin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai *stakeholders* strategis di daerah.

Koordinasi kebijakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) perlu terus dilanjutkan didukung penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi (rakor) atau *High Level Meeting* (HLM), dukungan penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah. Lebih lanjut, Bank Indonesia akan terus memperkuat respon kebijakan guna memastikan keberlanjutan upaya menjangkar ekspektasi inflasi tetap terjaga dalam kisaran $2,5 \pm 1\%$.

Beberapa rangkuman kegiatan TPID di Provinsi Kalimantan Selatan selama triwulan II 2026 sebagai berikut:

KETERJANGKAUAN HARGA

Pengendalian harga melalui Operasi Pasar/Gerakan Pasar Murah untuk komoditas pangan strategis di Provinsi Kalimantan Selatan telah diselenggarakan sepanjang

triwulan II 2026 untuk mengendalikan komoditas bahan pokok penting. Selain itu, penyaluran beras SPHP di Kalimantan Selatan dengan realisasi sebesar 11.650 ton (103,41% dari target 2026) guna menjaga daya beli masyarakat serta meredam tekanan harga pangan khususnya komoditas beras.

KETERSEDIAAN PASOKAN

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan di Kalimantan Selatan sepanjang triwulan II 2026, telah dilaksanakan sejumlah program penguatan sisi hulu. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) padi yang hingga akhir Mei 2026 telah mencapai 244.873 hektare atau 60,7% dari target tahunan sebesar 402.802 hektare, didukung penyaluran bantuan benih padi varietas unggul dan padi lokal kepada kelompok tani, optimalisasi program bersumber APBN, serta imbauan percepatan olah lahan pasca panen dalam waktu maksimal 20 hari guna mempercepat siklus tanam. Selanjutnya, dalam rangka diversifikasi sumber pasokan pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Pencanangan Kabupaten Tanah Laut sebagai Sentra Jagung Provinsi Kalimantan Selatan di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati pada 29 Juni 2026, yang disertai penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian serta bantuan benih jagung hibrida. Menghadapi risiko musim kemarau, mitigasi juga diperkuat melalui penyiapan sumber pengairan berupa pompa air, sumur bor, dan embung, penyaluran alat dan mesin pertanian termasuk *combine harvester*, pendampingan petani oleh petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), serta perluasan cakupan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai antisipasi risiko gagal panen. Selain itu, penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga terus digencarkan melalui penyaluran bantuan bibit tanaman sayuran dan tanaman pangan kepada masyarakat.

KELANCARAN DISTRIBUSI

Dalam mendukung kelancaran distribusi selama triwulan II 2026, TPID Kota Banjarmasin melaksanakan monitoring distribusi bahan pokok dan penting (bapokting) untuk memastikan ketersediaan stok dan

kewajaran harga di tingkat distributor maupun pasar. Selanjutnya, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dilakukan melalui penandatanganan kerja sama antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kota Banjarmasin pada 10 Juni 2026 guna memperpendek rantai distribusi dari daerah produsen langsung ke pasar konsumen, sekaligus menekan disparitas harga komoditas pangan strategis antarwilayah. Skema tersebut diperkuat oleh dukungan Pemerintah Pusat melalui program Fasilitas Distribusi Pangan Badan Pangan Nasional berupa subsidi ongkos angkut komoditas pangan, serta sinergi KAD dengan Bulog, BUMD, dan mitra Badan Gizi Nasional dalam pemenuhan kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sumber permintaan baru bagi komoditas pangan di daerah. Selain itu, guna mengantisipasi gangguan distribusi energi yang berpotensi menaikkan biaya logistik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menindaklanjuti dengan penguatan SK Satgas BBM dan perumusan satgas baru khusus LPG subsidi pada 11 Agustus 2026.

KOMUNIKASI EFEKTIF

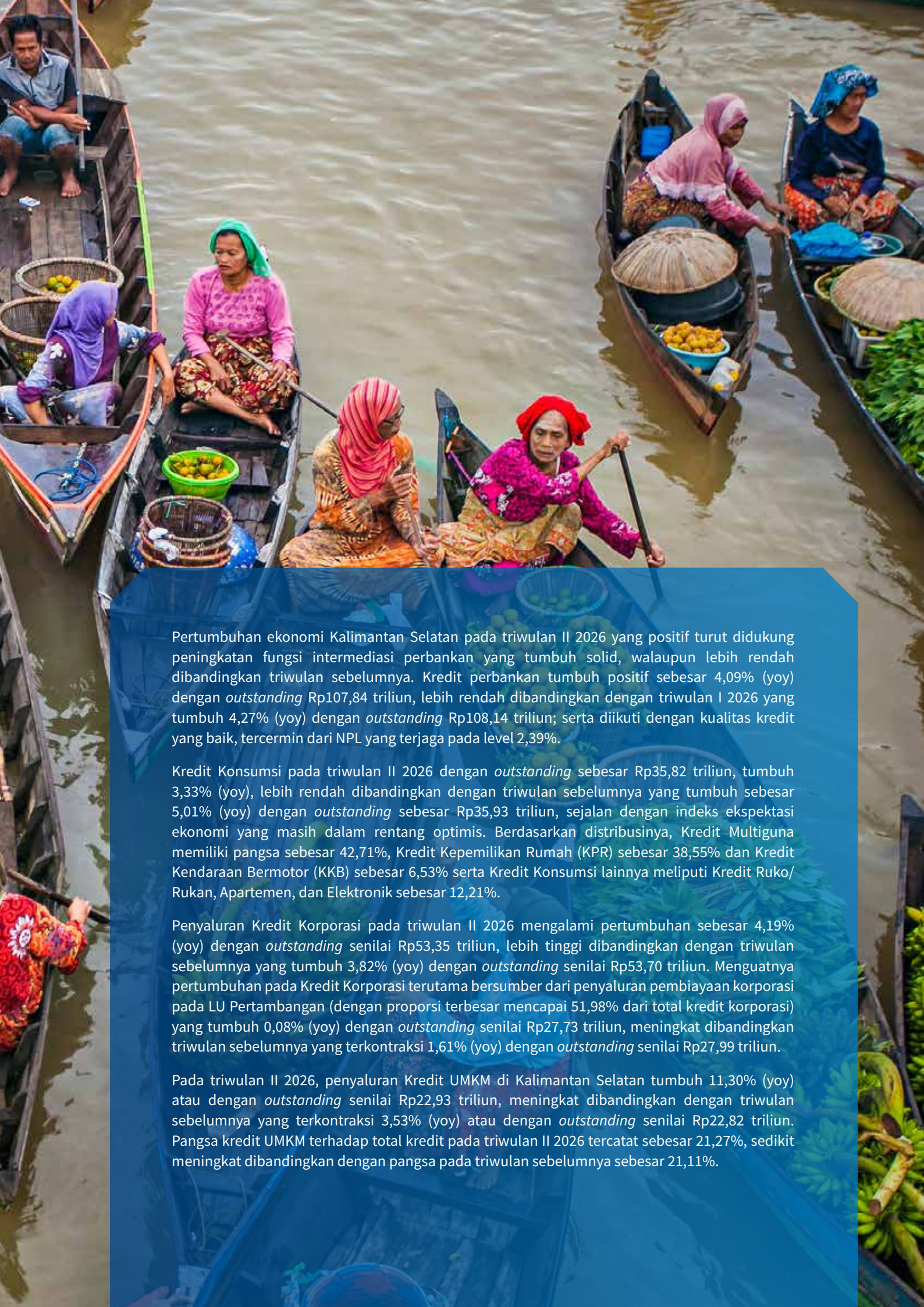
Dalam rangka pengendalian inflasi, diperlukan adanya sinergi dan koordinasi dalam merumuskan serta melaksanakan upaya pengendalian inflasi pangan. Oleh karena itu, sebagai bentuk perwujudan komunikasi efektif, telah dilaksanakan beberapa kegiatan di antaranya:

- Pelaksanaan kegiatan *High Level Meeting* (HLM) TPID Kota Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026.
- Pelaksanaan kegiatan *Capacity Building* dan Studi Tiru TPID se-Kalimantan Selatan pada tanggal 15-16 April 2026 ke Bali yang mempelajari budidaya ayam petelur *free range* dan *cage-free* serta Rumah Semai Cabai.
- Pelaksanaan kegiatan HLM TPID Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2026.
- Pelaksanaan kegiatan HLM TPID Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2026.
- Pelaksanaan kegiatan HLM TPID Kabupaten Banjar yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2026.

03

Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan Usaha Mikro Kecil (UMKM)





Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 yang positif turut didukung peningkatan fungsi intermediasi perbankan yang tumbuh solid, walaupun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit perbankan tumbuh positif sebesar 4,09% (yoy) dengan *outstanding* Rp107,84 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang tumbuh 4,27% (yoy) dengan *outstanding* Rp108,14 triliun; serta diikuti dengan kualitas kredit yang baik, tercermin dari NPL yang terjaga pada level 2,39%.

Kredit Konsumsi pada triwulan II 2026 dengan *outstanding* sebesar Rp35,82 triliun, tumbuh 3,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp35,93 triliun, sejalan dengan indeks ekspektasi ekonomi yang masih dalam rentang optimis. Berdasarkan distribusinya, Kredit Multiguna memiliki pangsa sebesar 42,71%, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebesar 38,55% dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebesar 6,53% serta Kredit Konsumsi lainnya meliputi Kredit Ruko/ Rukan, Apartemen, dan Elektronik sebesar 12,21%.

Penyaluran Kredit Korporasi pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 4,19% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp53,35 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,82% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp53,70 triliun. Menguatnya pertumbuhan pada Kredit Korporasi terutama bersumber dari penyaluran pembiayaan korporasi pada LU Pertambangan (dengan proporsi terbesar mencapai 51,98% dari total kredit korporasi) yang tumbuh 0,08% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp27,73 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 1,61% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp27,99 triliun.

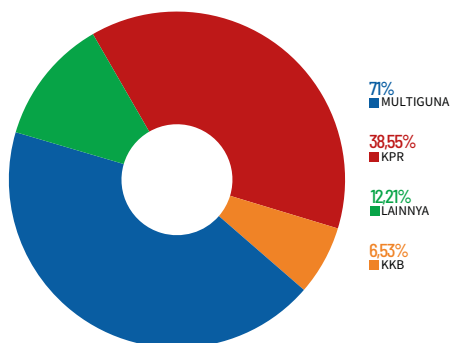
Pada triwulan II 2026, penyaluran Kredit UMKM di Kalimantan Selatan tumbuh 11,30% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp22,93 triliun, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 3,53% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp22,82 triliun. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 21,27%, sedikit meningkat dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 21,11%.

3.1 PEMBIAYAAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 didukung oleh fungsi intermediasi perbankan yang tumbuh terbatas. Kredit Perbankan tumbuh sebesar 4,09% (yoy) dengan *outstanding* Rp107,84 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 4,27% (yoy) dengan *outstanding* Rp108,14 triliun; serta diikuti dengan kualitas kredit yang baik, tercermin dari NPL yang tetap terjaga pada level 2,39% (triwulan II 2026). Pertumbuhan yang lebih rendah ini terutama bersumber dari pertumbuhan kredit pada LU Pertambangan dan LU Perdagangan Hotel Restoran yang melambat, serta realisasi Kredit Konsumsi yang lebih rendah pada triwulan berjalan di tengah Kredit Investasi yang tumbuh. Di sisi lain, penyaluran Kredit UMKM pada triwulan II 2026 tumbuh tinggi sebesar 11,30% (yoy). Pertumbuhan yang lebih baik pada Kredit UMKM dipicu oleh perbaikan kinerja penyaluran Kredit UMKM pada segmen unit usaha menengah.

3.1.1 Pembiayaan Rumah Tangga (RT)

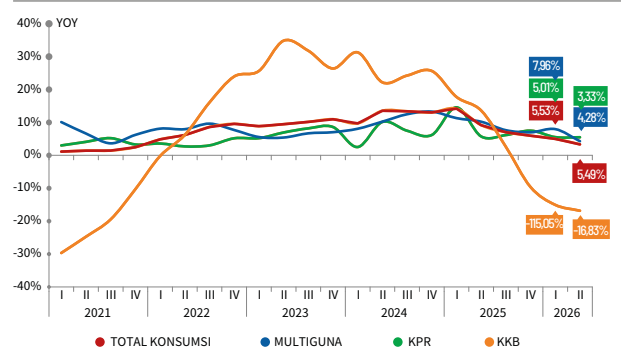
Kredit Konsumsi pada triwulan II 2026 dengan *outstanding* sebesar Rp35,82 triliun, tumbuh 3,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp35,93 triliun. Berdasarkan komponennya, perlambatan Kredit Konsumsi terutama diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan Kredit Multiguna dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Kedua komponen tersebut memiliki pangsa sebesar 49,24% (Grafik 3.1).



Sumber : LBU Bank Indonesia

Grafik 3.1 Distribusi Kredit Konsumsi Periode Triwulan II 2026

Pada triwulan II 2026, penyaluran Kredit Multiguna tumbuh sebesar 4,28% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp15,30 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,96% (yoy) dengan *outstanding* Rp15,51 triliun.

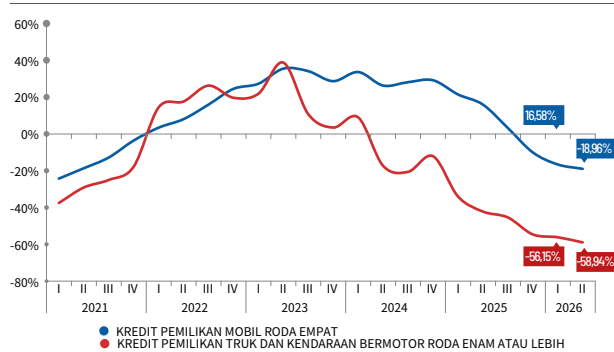


Sumber : LBU Bank Indonesia

Grafik 3.2 Pertumbuhan Kredit Konsumsi Berdasarkan Jenisnya Periode Triwulan II 2026

Lebih lanjut, penyaluran KKB pada triwulan II 2026 tercatat melambat. KKB berkontraksi sebesar 16,83% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp2,33 triliun, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan *outstanding* senilai Rp2,40 triliun atau berkontraksi sebesar 15,05% (yoy) (Grafik 3.2). Penurunan tersebut bersumber dari kontraksi yang lebih dalam dari penyaluran Kredit Kepemilikan Mobil Roda Empat yang memiliki proporsi terbesar (88,71%) serta Kredit Kepemilikan Truk dan Kendaraan Roda Enam (1,50%).

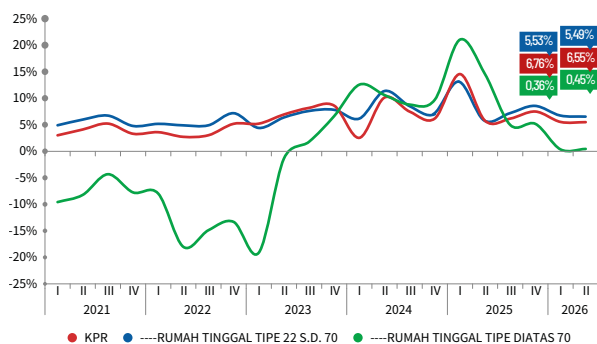
KKB Roda Empat berkontraksi 18,96% (yoy) dengan *outstanding* Rp2,05 triliun pada triwulan laporan, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar 16,58% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp2,13 triliun. Sementara itu, Kredit Pemilikan Truk dan Kendaraan Roda Enam mengalami kontraksi yang lebih dalam, yaitu sebesar 58,94% (yoy) setelah mengalami kontraksi sebesar 56,15% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 3.3). Hal ini diperkirakan sejalan dengan melambatnya permintaan pembiayaan Truk dan Kendaraan Roda Enam akibat menurunnya kegiatan pertambangan batubara.



Sumber : LBU Bank Indonesia

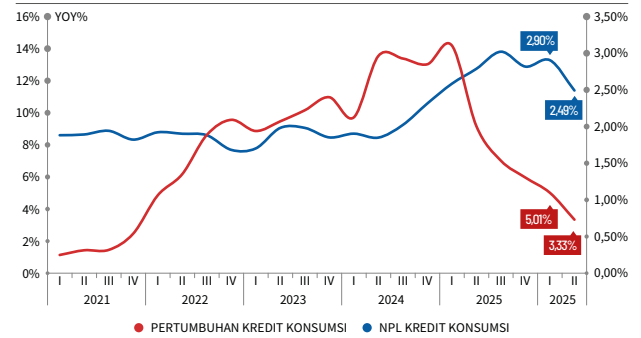
Grafik 3.3 Pertumbuhan Kredit Konsumsi Pemilikan Mobil Roda Empat, Truk, dan Kendaraan Roda Enam atau Lebih Periode Triwulan II 2026

Perlambatan penyaluran Kredit Konsumsi salah satunya dipicu oleh pertumbuhan KPR yang melambat. Pada triwulan II 2026, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tumbuh 5,49% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 5,53% (yoy). Lebih rendahnya pertumbuhan KPR disebabkan oleh melandainya penyaluran Kredit KPR tipe 22 s.d. 70 m². Kredit untuk Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70 m² yang memiliki pangsa terbesar (93,40%) dalam penyaluran KPR tumbuh 6,55% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,76% (yoy) (Grafik 3.3). Namun, Kredit untuk Rumah Tinggal Tipe Diatas 70 m² tumbuh sebesar 0,45% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,36% (yoy).



Sumber : LBU Bank Indonesia

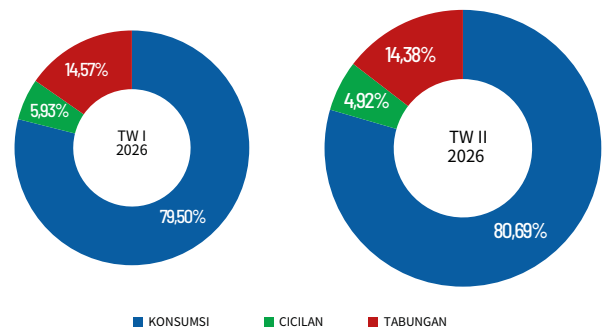
Grafik 3.4 Pertumbuhan Kredit Konsumsi – Kredit Kepemilikan Rumah, KPR Tipe 22 s.d 70 dan Kredit Pemilikan Rumah Tipe diatas 70 Triwulan II 2026



Sumber : LBU Bank Indonesia

Grafik 3.5 Pertumbuhan dan NPL Kredit Konsumsi Periode Triwulan II 2026

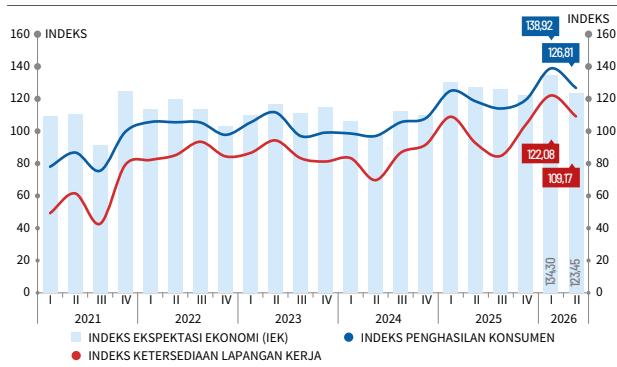
Perlambatan Kredit Konsumsi diikuti oleh penurunan risiko kredit. Pada triwulan II 2026, NPL Kredit Konsumsi menurun menjadi sebesar 2,49% dibanding triwulan sebelumnya dengan NPL sebesar 2,90% (Grafik 3.5). Penurunan NPL utamanya terjadi pada segmen kredit KPR, khususnya Tipe 22 s.d 70 m² akibat kemampuan bayar debitur berpenghasilan rendah hingga menengah yang lebih terbatas.



Sumber : Survei Konsumen (diolah)

Grafik 3.6 Persentase Penggunaan Penghasilan RT Periode Triwulan II 2026

Kredit Konsumsi yang meningkat pada triwulan II 2026 sejalan dengan peningkatan preferensi untuk konsumsi. Berdasarkan Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia pada triwulan II 2026, indeks penghasilan konsumen cenderung turun, namun berdasarkan data konsumsi tercatat meningkat terbatas sebesar 80,69% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 79,50%. Penggunaan penghasilan untuk tabungan di sisi lain menurun dari 14,57% menjadi 14,38%. Sementara itu, penggunaan penghasilan untuk cicilan menurun dari 5,93% menjadi 4,92%, sejalan dengan *outstanding* Kredit Konsumsi yang tumbuh lebih rendah. (Grafik 3.6).



Sumber : LBU Bank Indonesia

Grafik 3.7 Indeks Penghasilan Konsumen & Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini Periode Triwulan II 2026

Sejalan dengan pertumbuhan penyaluran Kredit Konsumsi yang melambat, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), dan Indeks Ekspektasi Ekonomi (IEK) tercatat menurun, namun tetap berada pada level optimis. Pada triwulan II 2026, Indeks Ekspektasi Ekonomi tercatat sebesar 123,45, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 134,30 (Grafik 3.7). Pertumbuhan Kredit Konsumsi diperkirakan akan meningkat pada periode mendatang seiring ekspektasi masyarakat yang lebih baik terhadap kondisi perekonomian daerah. Selain itu, responden Survei Konsumen menyatakan penurunan pendapatan pada triwulan II 2026 akan mempengaruhi konsumsi RT kedepan.

Tabel 3.1 Perubahan Tingkat Pendapatan RT Triwulan II 2026

KONDISI PENGHASILAN RT	TW I'25	TW II'25	TW III'25	TW IV'25	TW I'26	TW II'26
Meningkat cukup banyak	2,9%	3,8%	1,7%	0,8%	1,1%	1,3%
Sedikit meningkat	39,2%	37,9%	30,4%	41,3%	47,4%	39,9%
Sama	47,5%	32,5%	45,4%	42,1%	41,9%	44,6%
Sedikit menurun	10,0%	24,2%	22,1%	13,8%	9,4%	13,9%
Menurun cukup banyak	0,4%	1,7%	0,4%	2,1%	0,1%	0,4%

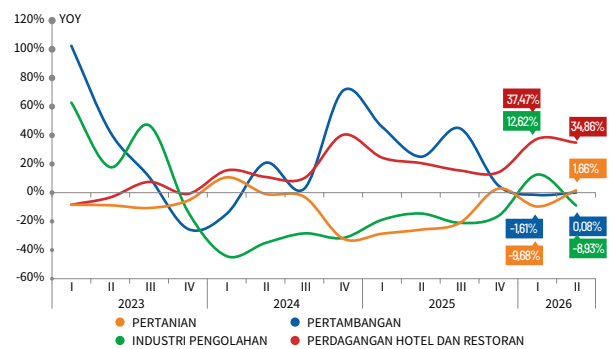
Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia (Diolah)

3.1.2 Pembiayaan Korporasi

Penyaluran Kredit Korporasi pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 4,19% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp53,35 triliun, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,82% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp53,70 triliun. Pertumbuhan Kredit Korporasi bersumber dari LU Pertanian dan Pertambangan yang masing-masing tumbuh sebesar 1,66% dan 0,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan

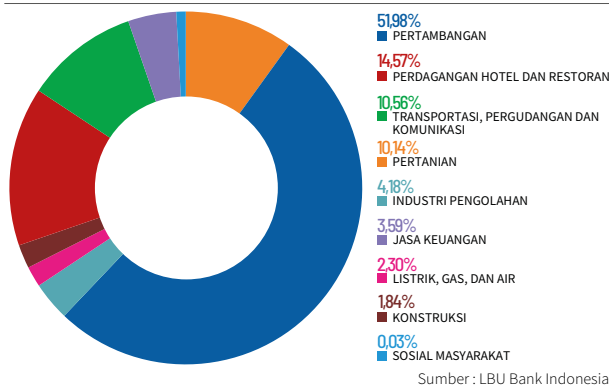
sebelumnya yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 9,68% dan 1,61% (yoy). Selain itu, pertumbuhan yang tinggi ini dihadapkan dengan perlambatan Kredit LU Industri Pengolahan. LU tersebut terkontraksi 8,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,62% (yoy) (Grafik 3.8). Pertumbuhan juga tertahan oleh penyaluran kredit pada LU Jasa Keuangan yang terkontraksi 5,33% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,72% (yoy) serta LU Perdagangan Hotel dan Restoran yang tumbuh sebesar 34,86% (yoy) setelah tumbuh 37,47% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, kredit pada LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi tumbuh melambat sebesar 11,67% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 24,26% (yoy). Namun demikian, kredit pada LU Listrik, Gas, dan Air serta LU Konstruksi mengalami perbaikan kinerja lebih baik pada triwulan berjalan walaupun masih terkontraksi sebesar 8,10% (yoy) dan 3,77% (yoy), setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 12,15% (yoy) dan 11,39% (yoy) (Grafik 3.8).

Berdasarkan pangsaanya, Kredit Korporasi paling besar disalurkan kepada LU Pertambangan. Pada triwulan II 2026, mayoritas Kredit Korporasi disalurkan pada sektor utama, yaitu LU Pertambangan (pangsa 51,98%), LU Perdagangan, Hotel, dan Restoran (pangsa 14,57%), LU Transportasi dan Pergudangan (pangsa 10,14%), dan LU Pertanian (pangsa 10,56%) (Grafik 3.9).



Sumber : LBU Bank Indonesia

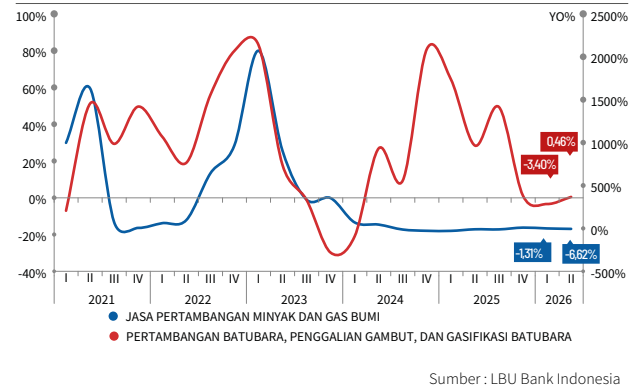
Grafik 3.8 Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha Ekonomi Utama Periode Triwulan II 2026



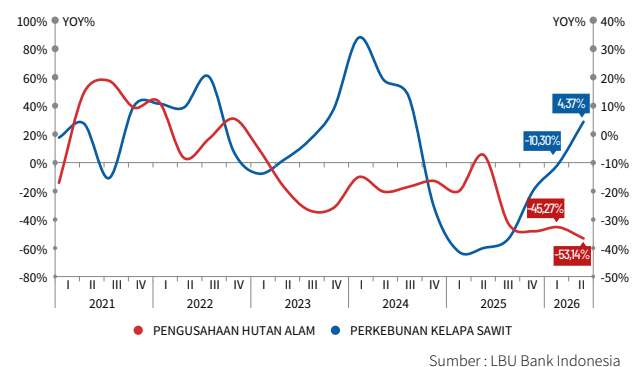
Grafik 3.9 Komposisi Kredit Korporasi Periode Triwulan II 2026

Pertumbuhan kredit di LU Pertambangan terutama didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit pada sub-Lapangan Usaha (Sub-LU) Pertambangan Batu Bara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batu Bara yang memiliki proporsi terbesar pada LU Pertambangan (proporsi sebesar 88,86%) yang tumbuh 0,46% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp24,84 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 3,40% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp24,87 triliun. Sebaliknya, perlambatan Kredit Korporasi pada LU Pertambangan juga dipicu oleh kinerja Sub-LU Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (pangsa 7,46%) yang berkontraksi 6,62% (yoy) dengan *outstanding* Rp2,03 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga berkontraksi 1,31% yoy dengan *outstanding* Rp2,08 triliun (Grafik 3.10).

Lebih lanjut, pertumbuhan Kredit Sektor Pertanian utamanya didorong oleh Sub-LU Perkebunan Kelapa Sawit, sedangkan Sub-LU Pengusahaan Hutan Alam juga mengalami kontraksi. Kredit di subsektor Perkebunan Sawit (pangsa sebesar 87,92%) mengalami pertumbuhan sebesar 4,37% (yoy) dengan *outstanding* Rp5,00 triliun, tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 10,30% (yoy) dengan *outstanding* Rp4,69 triliun. Perbaikan kontraksi LU Pertanian tertahan kredit Sub-LU Pengusahaan Hutan Alam (pangsa kedua terbesar sebesar 1,87%). Kredit pada Sub-LU ini mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 53,14% dengan *outstanding* Rp95,35 miliar pada triwulan II 2026, dibandingkan pada triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi sebesar 45,27% (yoy) dengan *outstanding* Rp99,89 miliar (Grafik 3.11).

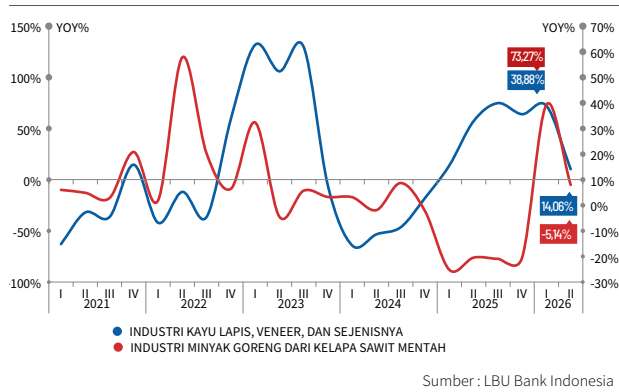


Grafik 3.10 Pertumbuhan Kredit Korporasi Sub-LU Pertambangan dan Penggalian Periode Triwulan II 2026



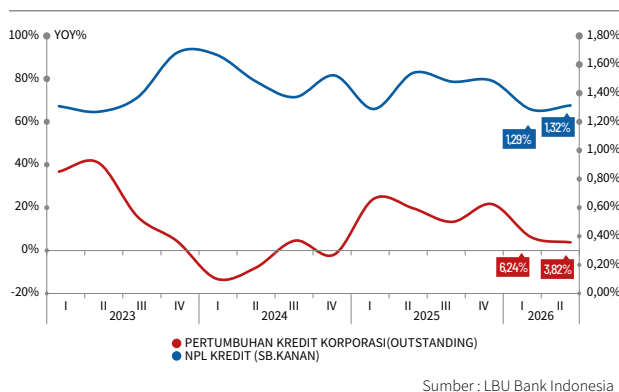
Grafik 3.11 Pertumbuhan Kredit Korporasi Sub-LU Pertanian Periode Triwulan II 2026

Perlambatan kinerja terjadi pada Kredit Korporasi LU Industri Pengolahan utamanya disebabkan oleh menurunnya penyaluran kredit pada Sub-LU Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit dan Industri Kayu Lapis, Veneer, dan Sejenisnya. Kredit Sub-LU Minyak Kelapa Sawit (pangsa 9,21%) berkontraksi sebesar 5,14% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp176,83 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 73,27% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp176,70 miliar. Sementara itu, Sub-LU Industri Kayu Lapis, Veneer, dan Sejenisnya (pangsa 53,42%) tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 14,06% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp1,05 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang tumbuh 38,88% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp1,02 triliun (Grafik 3.12).



Grafik 3.12 Pertumbuhan Kredit Korporasi Sub-LU Industri Pengolahan Periode Triwulan II 2026

Lebih lanjut, kualitas Kredit Korporasi terjaga di level yang rendah. Pada triwulan II 2026, NPL kredit korporasi tercatat sebesar 1,39%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,31% (Grafik 3.13). Peningkatan NPL ini terjadi pada sektor pertambangan di mana NPL meningkat dari 0,18% pada triwulan I 2026 menjadi 0,35% pada triwulan laporan.

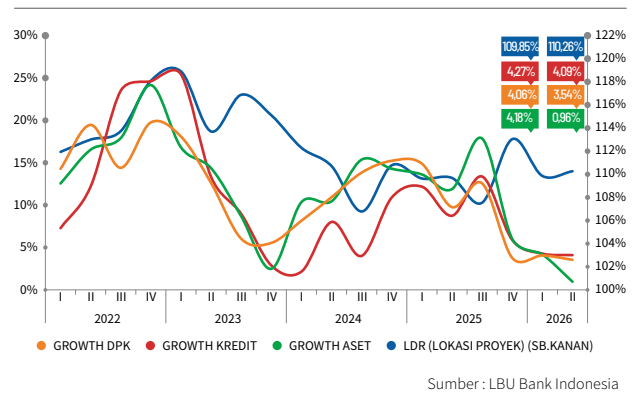


Grafik 3.13 NPL Kredit Korporasi Periode Triwulan II 2026

3.1.3 Total Aset dan Intermediasi Perbankan

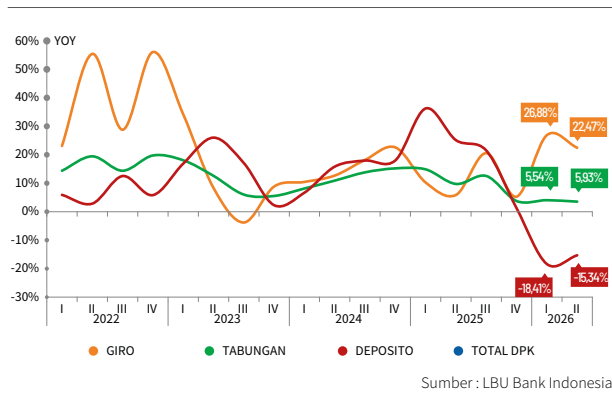
Pada triwulan II 2026, Total Aset Perbankan di Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 0,96% (yoy) atau senilai Rp123,56 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,18% (yoy) atau senilai Rp124,47 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 3,54% (yoy) dengan nilai Rp97,81 triliun, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 4,06% (yoy) dengan nilai Rp98,44 triliun (Grafik 3.14). Di sisi lain, penyaluran kredit juga tercatat tumbuh melambat sebesar 4,09% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya 4,27% (yoy). [RF5.1][PA5.2] Secara

nominal triwulanan menurun tipis dari Rp108,14 triliun ke Rp107,84 triliun (Grafik 3.14). Seiring dengan perkembangan tersebut, fungsi intermediasi perbankan yang tercermin dari perbandingan antara Penyaluran Kredit/Pembiayaan terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau disebut Loan-to-Deposit Ratio (LDR), berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami sedikit peningkatan. LDR tercatat sebesar 110,26% (yoy), meningkat 0,41 percentage point dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 109,85% (yoy). Peningkatan tersebut mengindikasikan fungsi intermediasi perbankan sedikit menguat, sejalan dengan penyaluran kredit/pembiayaan yang tumbuh relatif lebih tinggi dibandingkan penghimpunan DPK.



Grafik 3.14 Pertumbuhan Aset, DPK, Kredit, dan LDR Periode Triwulan II 2026

Pertumbuhan DPK didorong oleh pertumbuhan Giro, Deposito, dan Tabungan yang meningkat sejalan dengan siklus anggaran pemerintah daerah pada awal pelaksanaan anggaran sehingga realisasi belanja pemerintah masih rendah. Pada triwulan II 2026, Giro tumbuh 22,47% (yoy) dengan *outstanding* Rp27,60 triliun, turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,88% (yoy) dengan *outstanding* Rp29,77 triliun. Selain itu, Deposito tercatat mengalami perbaikan namun tetap kontraksi sebesar 15,34% (yoy) dengan *outstanding* Rp23,80 triliun, lebih tinggi secara nilai dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi 18,41% (yoy) dengan *outstanding* Rp21,83 triliun. Tabungan tumbuh 5,93% (yoy) dengan *outstanding* Rp46,40 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,54% (yoy) dengan *outstanding* Rp46,83 triliun (Grafik 3.15).

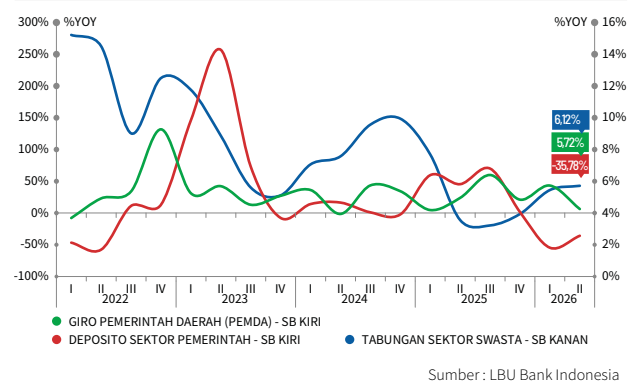


Grafik 3.15 Pertumbuhan DPK Periode Triwulan II 2026

Peningkatan DPK utamanya bersumber dari Giro dan Tabungan. Giro yang meningkat disebabkan oleh pertumbuhan Giro Pemerintah Daerah. Giro Pemerintah Daerah tumbuh 6,12% (yoy) dengan *outstanding* Rp8,39 triliun pada triwulan laporan, namun lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh tinggi 43,09% (yoy) dengan *outstanding* Rp11,51 triliun.

Di sisi lain, percepatan DPK tertahan oleh Deposito pada Sektor Swasta. Golongan pemilik Deposito Sektor Swasta (pangsa 87,32%) terkontraksi 7,97% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp19,01 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi 7,74% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp19,06 triliun. Di lain pihak, Deposito Pemerintah mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 292,54% (yoy) pada triwulan berjalan. Hal ini diperkirakan dapat dipengaruhi

oleh rendahnya *base effect* pada periode yang sama tahun sebelumnya, serta penempatan sementara dana pemerintah di perbankan seiring dengan *timing* realisasi belanja pemerintah pada periode tersebut (Grafik 3.16).



Grafik 3.16 Pertumbuhan Giro Pemda, Deposito Pemerintah, dan Tabungan Swasta Periode Triwulan II 2026

Secara spasial, sebagian besar DPK terhimpun di Kota Banjarmasin. DPK di Kota Banjarmasin tercatat sebesar Rp59,51 triliun atau dengan proporsi 60,84%, diikuti Kab. Tanah Bumbu Rp6,90 triliun (proporsi 7,06%), Kota Banjarbaru Rp6,38 triliun (proporsi 6,53%), dan Kab. Banjar Rp4,21 triliun (proporsi 4,31%) (Tabel 3.2). Dari sisi kinerja, pertumbuhan DPK tertinggi pada triwulan II 2026 berada di Kab. Tapin sebesar 39,17% (yoy); sementara pertumbuhan DPK terendah pada triwulan II 2026 berada di Kab. Kotabaru yang terkontraksi 54,74% (yoy) (Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Perkembangan DPK di Kalimantan Selatan secara Spasial Periode Triwulan II 2026 (Lokasi Bank Pelapor)

NO	KABUPATEN/KOTA	DPK TW II 2026	PERTUMBUHAN		
		RP. (MILIAR)	TW I 2025 (YOY)	TW II 2026 (YOY)	ARAH PERTUMBUHAN
1	Kab. Banjar	4.219,68	1,16%	1,70%	↑
2	Kab. Tanah Laut	2.098,68	-9,04%	-8,58%	↑
3	Kab. Tapin	3.561,05	17,83%	39,17%	↑
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.942,57	6,53%	1,20%	↓
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.360,71	-4,37%	-5,77%	↓
6	Kab. Hulu Sungai Utara	2.242,87	5,08%	1,25%	↓
7	Kab. Barito Kuala	1.120,20	3,00%	5,21%	↑
8	Kab. Kota Baru	1.849,58	-54,13%	-54,74%	↓
9	Kab. Tabalong	4.258,71	5,34%	4,15%	↓
10	Kab. Tanah Bumbu	6.900,51	38,08%	28,84%	↓
11	Kab. Balangan	1.354,52	7,18%	4,62%	↓
12	Kota Banjarmasin	59.512,04	4,77%	4,28%	↓
13	Kota Banjarbaru	6.388,72	10,93%	9,01%	↓
Prov. Kalimantan Selatan		97.809,84	4,06%	3,54%	↓

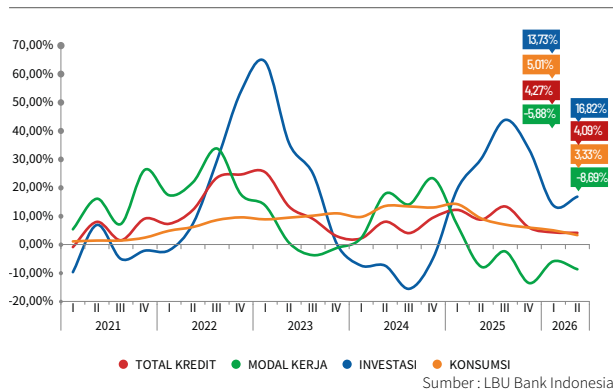
Sumber: LBU Bank Indonesia (Diolah)

Tabel 3.3 Perkembangan Kredit di Kalimantan Selatan secara Spasial Periode Triwulan II 2026 (Lokasi Proyek)

NO	KABUPATEN/KOTA	DPK TW II 2026	PERTUMBUHAN		
		RP. (MILIAR)	TW I 2025 (YOY)	TW II 2026 (YOY)	ARAH PERTUMBUHAN
1	Kab. Banjar	11.558,94	16,03%	15,60%	↓
2	Kab. Tanah Laut	6.424,60	0,60%	5,39%	↑
3	Kab. Tapin	1.984,19	5,81%	-15,42%	↓
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	2.066,10	-4,20%	-4,39%	↓
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.919,96	3,70%	2,57%	↓
6	Kab. Hulu Sungai Utara	4.073,94	1,61%	-4,58%	↓
7	Kab. Barito Kuala	6.829,83	-3,24%	8,59%	↑
8	Kab. Kota Baru	4.518,90	23,70%	19,18%	↓
9	Kab. Tabalong	10.665,34	-17,03%	-14,93%	↑
10	Kab. Tanah Bumbu	960,97	-15,60%	1,21%	↑
11	Kab. Balangan	30.598,04	-2,22%	6,19%	↑
12	Kota Banjarmasin	8.771,03	8,56%	2,08%	↓
13	Kota Banjarbaru	107.844,88	4,32%	15,22%	↑
Prov. Kalimantan Selatan		198.216,74	4,27%	4,09%	↓

Sumber: LBU Bank Indonesia (Diolah)

Dari sisi pembiayaan, Kredit Perbankan pada triwulan II 2026 tumbuh 4,09% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp107,84 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang dapat tumbuh 4,27% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp108,14 triliun (Grafik 3.17).



Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 3.17 Pertumbuhan Kredit Periode Triwulan II 2026

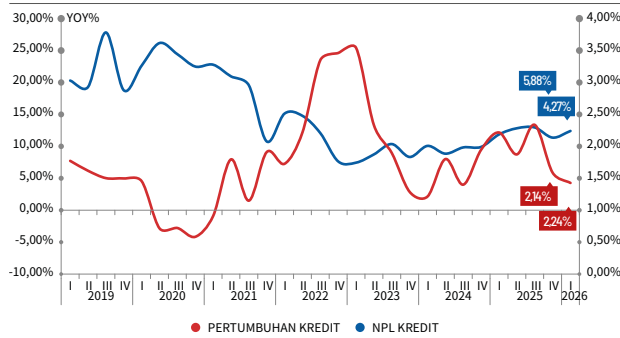
Pertumbuhan kredit yang melambat tersebut bersumber dari perlambatan pertumbuhan pada jenis penggunaan Kredit Konsumsi. Pada triwulan II 2026, Kredit Konsumsi melambat sebesar 3,33% (yoy) dengan *outstanding* Rp35,82 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan periode triwulan I 2026 yang mampu tumbuh sebesar 5,01% (yoy) dengan *outstanding* Rp35,93 triliun. Lebih lanjut, penyaluran Kredit Investasi (KI) tumbuh cukup kuat sebesar 16,82% (yoy) dengan *outstanding* Rp41,56

triliun pada triwulan II 2026, setelah triwulan sebelumnya juga mengalami pertumbuhan sebesar 13,73% (yoy) dengan *outstanding* Rp39,44 triliun.

Namun, pertumbuhan kredit yang lebih rendah terutama didorong oleh kinerja Kredit Modal Kerja (KMK) yang berkontraksi sebesar 8,69% (yoy) dengan *outstanding* Rp30,45 triliun, lebih dalam daripada triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar 5,88% (yoy) dengan *outstanding* Rp32,76 triliun.

Secara spasial, kredit terbesar berada di Kota Banjarmasin dengan *outstanding* senilai Rp30,59 triliun (proporsi 28,37%); Kabupaten Banjar Rp17,47 triliun (proporsi 16,20%); Kabupaten Tanah Laut Rp11,55 triliun (proporsi 10,72%); Kabupaten Tanah Bumbu Rp10,66 triliun (proporsi 9,89%) (Tabel 3.3). Lebih lanjut, pertumbuhan kredit tertinggi pada triwulan II 2026 berada di Kabupaten Kota Baru sebesar 19,18% (yoy), sementara terendah berada di Kabupaten Tapin yang berkontraksi 15,42% (yoy).

Pada triwulan II 2026, risiko kredit meningkat, namun kualitas penyaluran kredit masih terjaga. Pada triwulan laporan, NPL mencapai 2,39%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,24% (Grafik 3.18).



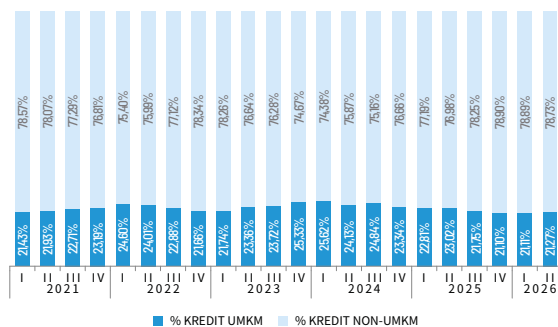
Sumber : LBU Bank Indonesia

Grafik 3.18 Pertumbuhan Kredit dan NPL Kredit Periode Triwulan II 2026

3.2 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

3.2.1 Rasio Kredit UMKM

Pada triwulan II 2026, penyaluran Kredit UMKM di Kalimantan Selatan tumbuh 11,30% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp22,93 triliun, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,53% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp22,82 triliun. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 21,27%, sedikit meningkat dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 21,11% (Grafik 3.19).



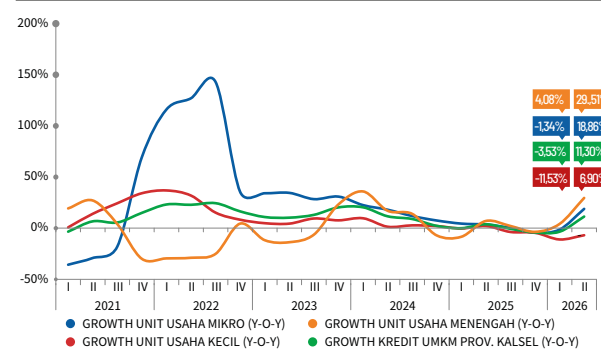
Sumber : LBU Bank Indonesia

Grafik 3.19 Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit Periode Triwulan II 2026

3.2.2 Penyaluran Kredit UMKM

Kontraksi yang lebih kecil pada penyaluran Kredit UMKM didorong oleh perbaikan kinerja pada seluruh segmen. Pada triwulan laporan, Kredit Usaha Mikro tumbuh signifikan 18,86% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp10,38 triliun, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 1,34% (yoy)

dengan *outstanding* sebesar Rp10,48 triliun. Selain itu, Kredit Usaha Menengah juga tumbuh signifikan sebesar 29,51% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp5,33 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,08% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp5,12 triliun. Lebih lanjut, kontraksi yang lebih rendah pada penyaluran Kredit UMKM tertahan oleh Kredit pada segmen Kecil. Kredit Usaha Kecil terkontraksi 6,90% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp7,214 triliun, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 11,02% (yoy) dengan *outstanding* Rp7,211 triliun (Grafik 3.20).

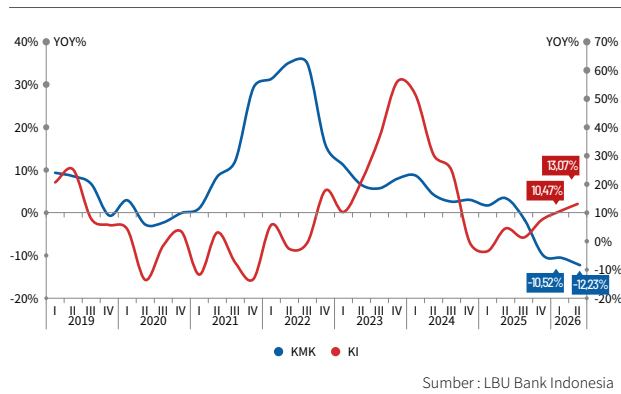


Sumber : LBU Bank Indonesia

Grafik 3.20 Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha Periode Triwulan II 2026

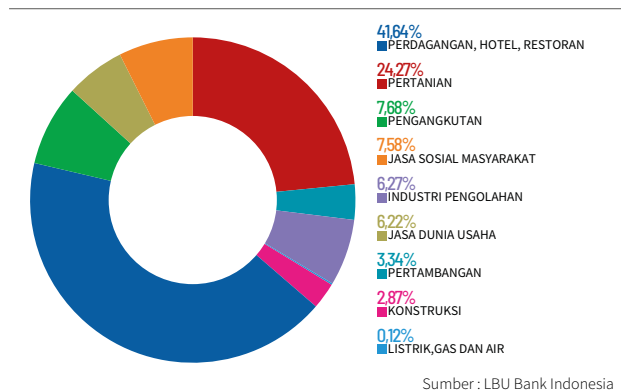
Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran Kredit UMKM pada triwulan II 2026 mayoritas disalurkan pada Kredit Modal Kerja (KMK) dengan pangsa sebesar 61,03%, diikuti oleh Kredit Investasi (KI) sebesar 38,97%.

Pada triwulan II 2026, penyaluran KMK UMKM mengalami kontraksi 12,23% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp13,99 triliun, lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 10,52% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp14,12 triliun. Di sisi lain, pertumbuhan kredit UMKM didorong oleh Kredit Investasi (KI) UMKM yang lebih tinggi. KI UMKM tumbuh sebesar 13,07% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp8,93 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,47% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp8,70 triliun (Grafik 3.21).



Grafik 3.21 Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Periode Triwulan II 2026

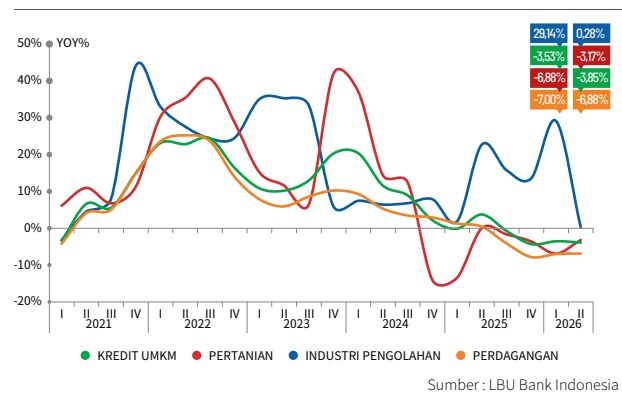
Secara sektoral, penyebab perlambatan kredit UMKM bersumber dari LU Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada triwulan II 2026, Kredit sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (Pangsa 41,64%) terkontraksi sebesar 6,88% (yoy). Selain sektor tersebut, sektor lainnya seperti Pertanian (Pangsa 24,27%) juga mengalami kontraksi sebesar 3,17% (yoy), dan Sektor Pertambangan (Pangsa 3,34%) yang juga terkontraksi sebesar 10,76% (yoy) (Grafik 3.22).



Grafik 3.22 Distribusi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Periode Triwulan II 2026

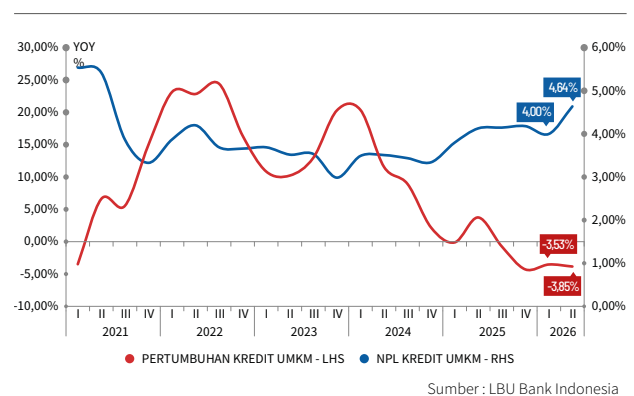
Pertumbuhan kredit UMKM LU Perdagangan pada triwulan II 2026 dengan pangsa terbesar terkontraksi 6,88% (yoy) dengan *outstanding* Rp9,66 triliun, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,82% (yoy) dengan *outstanding* Rp9,55 triliun. Selain itu, LU Pertanian dengan pangsa kedua terbesar dalam kredit UMKM triwulan II 2026 mengalami kontraksi sebesar 3,17% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp5,56 triliun, membaik dibanding triwulan sebelumnya yang kontraksi sebesar 6,88% (yoy) dengan *outstanding* Rp5,35 triliun. Selain itu, LU Industri Pengolahan tumbuh terbatas sebesar 0,28% (yoy) dengan *outstanding* Rp1,42

triliun, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 29,13% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp1,51 triliun (Grafik 3.23).



Grafik 3.23 Pertumbuhan Kredit UMKM Lapangan Usaha Utama Periode Triwulan II 2026

Peningkatan Kredit UMKM diikuti dengan naiknya risiko kredit. Pada triwulan II 2026, NPL UMKM meningkat menjadi sebesar 4,64%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,00% (Grafik 3.24). Meningkatnya NPL ini utamanya bersumber dari peningkatan NPL LU Pertambangan dari 4,84% pada triwulan I 2026, menjadi sebesar 13,94% pada triwulan II 2026.

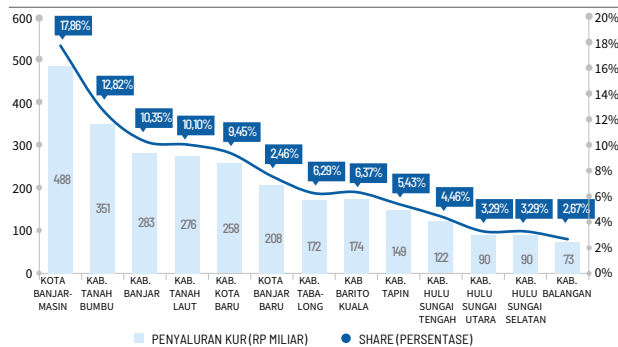


Grafik 3.24 Pertumbuhan Kredit dan NPL Kredit UMKM Periode Triwulan II 2026

3.2.3 Peningkatan Akses Keuangan UMKM

Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Kalimantan Selatan, pemerintah daerah terus mendorong penyaluran Pembiayaan Mikro dan Ultra Mikro oleh perbankan. Sampai dengan triwulan II 2026, program KUR yang disalurkan di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp2,66 triliun. Berdasarkan kabupaten/kota, realisasi KUR tertinggi terdapat di Kota Banjarmasin

dengan proporsi 17,86% atau senilai Rp488,43 miliar, diikuti oleh Kabupaten Tanah Bumbu (proporsi 12,82% atau senilai Rp350,66 miliar), Kabupaten Banjar (dengan proporsi 10,35% atau senilai Rp283,21 miliar) dan Kabupaten Tanah Laut (dengan proporsi 10,10% atau senilai Rp276,22 miliar) (Grafik 3.25).

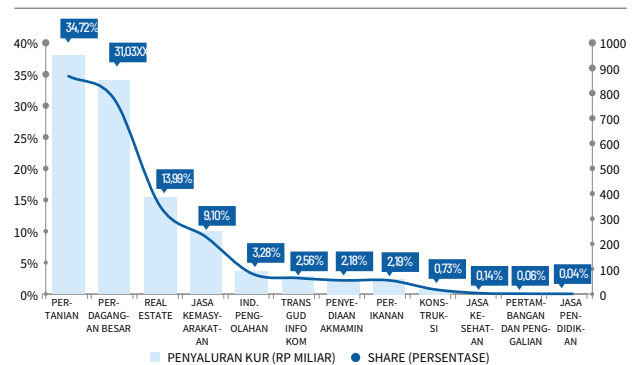


Sumber: DJPB Prov Kalsel

Grafik 3.25 Penyaluran KUR Berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Triwulan II 2026

Total debitur yang menerima manfaat KUR sampai dengan triwulan II 2026 tercatat sebanyak 43.666 orang debitur dengan sebaran debitur terbanyak di Kota Banjarmasin mencapai 6.463 debitur (dengan proporsi 14,80%).

Sebagian besar KUR disalurkan pada LU Pertanian dan Perdagangan Besar. Pada triwulan II 2026, LU Pertanian menjadi LU dengan penyaluran KUR terbesar, yaitu senilai Rp949,65 miliar (pangsa 34,72%). Lebih lanjut, KUR dengan penyaluran terbesar kedua disalurkan pada LU Perdagangan Besar dengan proporsi mencapai 31,03% atau senilai Rp848,68 miliar dan diikuti oleh LU *Real Estate* dengan proporsi mencapai 13,99% atau senilai Rp382,57 miliar dari total KUR yang disalurkan (Grafik 3.26).



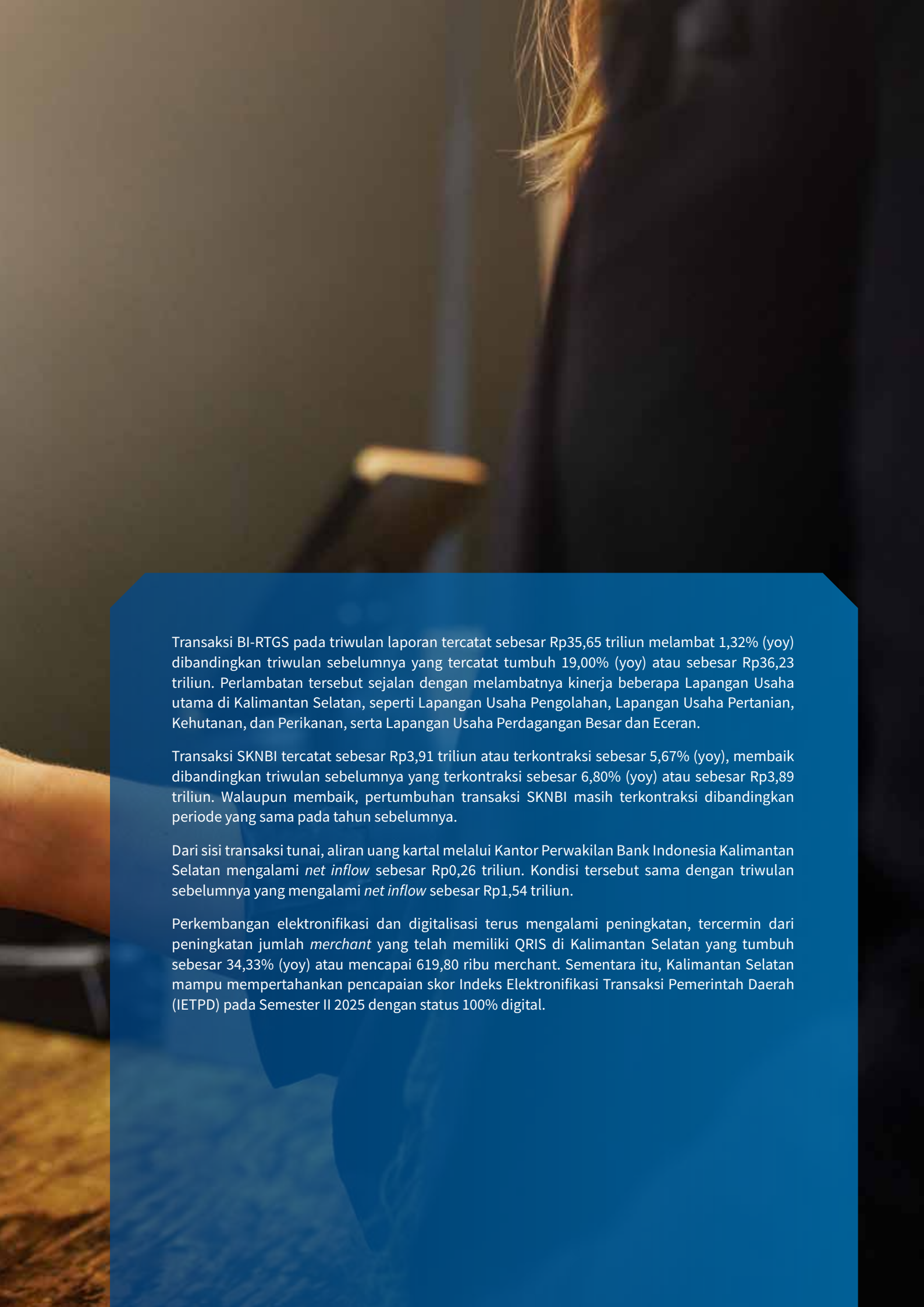
Sumber: DJPB Prov Kalsel

Grafik 3.26 Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Triwulan II 2026

04

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah





Transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp35,65 triliun melambat 1,32% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 19,00% (yoy) atau sebesar Rp36,23 triliun. Perlambatan tersebut sejalan dengan melambatnya kinerja beberapa Lapangan Usaha utama di Kalimantan Selatan, seperti Lapangan Usaha Pengolahan, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran.

Transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp3,91 triliun atau berkontraksi sebesar 5,67% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 6,80% (yoy) atau sebesar Rp3,89 triliun. Walaupun membaik, pertumbuhan transaksi SKNBI masih berkontraksi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

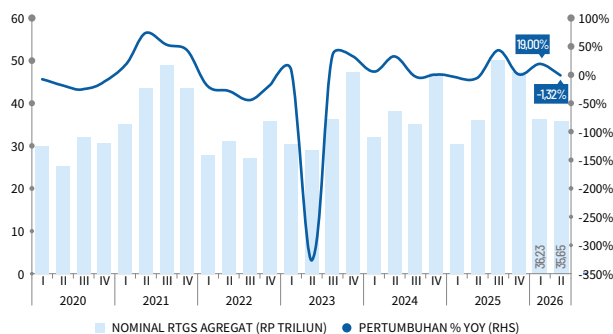
Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan mengalami *net inflow* sebesar Rp0,26 triliun. Kondisi tersebut sama dengan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp1,54 triliun.

Perkembangan elektronifikasi dan digitalisasi terus mengalami peningkatan, tercermin dari peningkatan jumlah *merchant* yang telah memiliki QRIS di Kalimantan Selatan yang tumbuh sebesar 34,33% (yoy) atau mencapai 619,80 ribu merchant. Sementara itu, Kalimantan Selatan mampu mempertahankan pencapaian skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) pada Semester II 2025 dengan status 100% digital.

4.1 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI KALIMANTAN SELATAN

4.1.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Pada triwulan II 2026, pertumbuhan nominal transaksi sistem pembayaran menggunakan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) menurun. Transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp35,65 triliun melambat 1,32% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 19,00% (yoy) atau sebesar Rp36,23 triliun (Grafik 4.1). Perlambatan tersebut sejalan dengan melambatnya kinerja beberapa Lapangan Usaha utama di Kalimantan Selatan, seperti Lapangan Usaha Pengolahan, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran. Perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh kinerja Lapangan Usaha Pertambangan yang tumbuh akseleratif sebesar 4,70% (yoy) dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat tumbuh 1,47% (yoy).

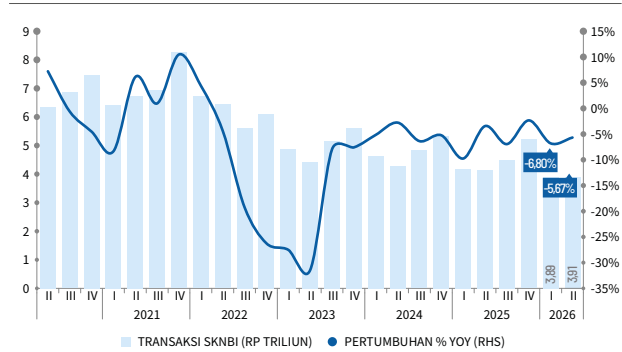


Sumber: Bank Indonesia, Transaksi RTGS

Grafik 4.1 Transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)

4.1.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Berbeda dengan transaksi nilai besar (BI-RTGS), transaksi ritel yang diproses melalui SKNBI pada triwulan II 2026 mengalami perbaikan. Nominal transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp3,91 triliun atau terkontraksi sebesar 5,67% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 6,80% (yoy) atau sebesar Rp3,89 triliun (Grafik 4.2).



Sumber: Bank Indonesia, Transaksi SKNBI

Grafik 4.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

4.1.3 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

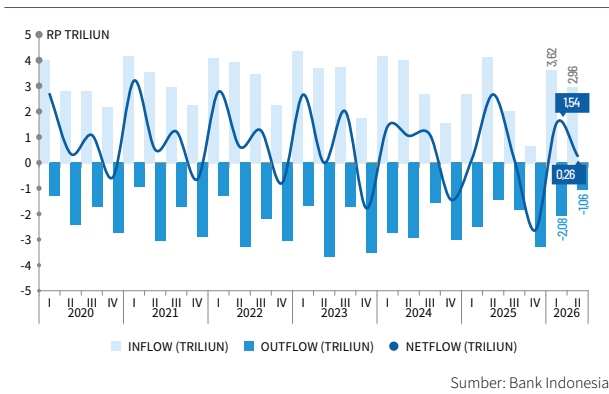
Transaksi belanja menggunakan kartu ATM/debit pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp1,01 triliun, terkontraksi sedalam 7,83% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 13,07% (yoy). Sejalan dengan itu, penarikan uang tunai pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp12,37 triliun atau terkontraksi 3,12% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sedalam 6,64% (yoy) atau sebesar Rp12,67 triliun.

Di sisi lain, transaksi belanja menggunakan kartu kredit pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp445 miliar atau tumbuh 10,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,61% (yoy) dengan nilai transaksi sebesar Rp423 miliar.

4.1.4 Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan II 2026, aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan mengalami *net inflow* sebesar Rp0,26 triliun.

Kondisi tersebut serupa dengan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp1,54 triliun (Grafik 4.3). Kondisi *net inflow* terjadi seiring meningkatnya penggunaan transaksi digital, yang tercermin dari pertumbuhan transaksi non-tunai di masyarakat.



Grafik 4.3 Penarikan dan Setoran Uang Kartal Melalui Bank Indonesia di Kalimantan Selatan

4.2 PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI DAN KEUANGAN INKLUSIF

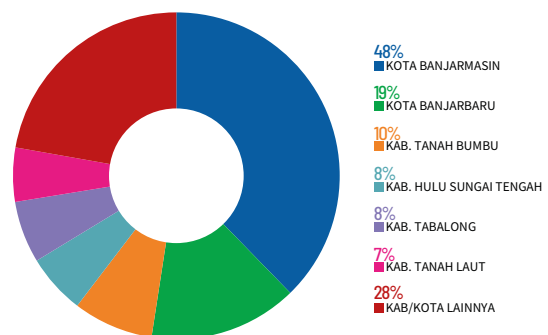
4.2.1 Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran terus mendorong Gerakan Nasional Non tunai (GNNT) melalui penggunaan instrumen non tunai (elektronifikasi), baik di lingkungan Pemerintah Daerah, masyarakat, serta penyaluran bantuan sosial. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kalimantan Selatan sejak semester II 2025 tercatat sebesar 100% digital, berhasil mempertahankan pencapaian yang sama pada semester II 2024. Pencapaian tersebut didorong oleh implementasi kanal pembayaran digital pada transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan daerah dengan memanfaatkan berbagai kanal pembayaran seperti QRIS, *e-commerce*, *Electronic Data Capture* (EDC), serta kanal pembayaran lainnya. Upaya elektronifikasi tersebut meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat aspek transparansi transaksi keuangan pemerintah daerah, mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, serta memberikan kemudahan bertransaksi. Sampai dengan triwulan laporan, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan telah berada dalam kategori digital.

4.2.2 Implementasi QRIS di Wilayah Kalimantan Selatan

Hingga triwulan II 2026, jumlah *merchant* yang telah memiliki QRIS di Kalimantan Selatan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah *merchant* yang memiliki QRIS tumbuh 34,33% (yoy) atau sebanyak 619,80 ribu *merchant*, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh 24,64% (yoy) atau mencapai 461,41 ribu *merchant*. Peningkatan tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam mendorong akseptasi pembayaran digital di masyarakat. Secara spasial, jumlah *merchant* QRIS terbanyak terdapat di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru (Grafik 4.4).



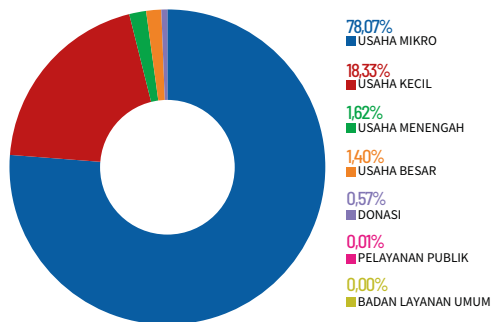
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.4 Jumlah *Merchant* QRIS Berdasarkan Kota/Kabupaten

Dominasi jumlah *merchant* QRIS di kedua kota ini sejalan dengan posisi kedua daerah yang merupakan sentra ekonomi (Banjarmasin) serta sentra pemerintahan (Banjarbaru) di Provinsi Kalimantan Selatan. Tingginya aktivitas ekonomi pada dua kota tersebut juga ditopang banyaknya *merchant* pusat hiburan dan belanja yang telah memanfaatkan QRIS sebagai kanal pembayaran untuk mempermudah transaksi masyarakat. Selain itu, akseptasi QRIS yang tinggi juga merupakan hasil kolaborasi yang baik antara Bank Indonesia, Penyedia Jasa Pembayaran, dan Pemerintah Daerah dalam memperkenalkan QRIS sebagai alternatif pembayaran non tunai yang CeMuMuAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal).

Berdasarkan skala usaha, Usaha Mikro (UMI) tercatat sebagai segmen usaha yang memiliki jumlah *merchant* QRIS terbanyak. Pada triwulan II 2026, tercatat sebanyak 482,32 ribu *merchant* kategori UMI atau sebesar 78,07%

dari total jumlah *merchant* QRIS, diikuti oleh Usaha Kecil (UKE) dengan 113,21 ribu *merchant* (18,33%) (Grafik 4.5).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.5 Jumlah *Merchant* QRIS Menurut Skala Usaha

Untuk meningkatkan volume transaksi dan pengguna baru QRIS, dilakukan berbagai upaya sosialisasi maupun edukasi oleh KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan. Pada triwulan II 2026, KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan sosialisasi dan edukasi seputar QRIS, Cinta Bangsa dan Paham Rupiah (CBP), dan Perlindungan Konsumen (PeKA) ke berbagai sekolah dan universitas di Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai kemudahan dan keunggulan transaksi digital yang ditawarkan oleh QRIS, termasuk aspek perlindungan konsumen. Pelaksanaan kampanye tersebut bertujuan memperluas akseptasi QRIS, peningkatan literasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) serta CBP Rupiah. Selain itu, sebagai upaya mendorong transformasi ekonomi digital di Kalimantan Selatan, telah dilakukan rangkaian kegiatan Festival Antasari (Akselerasi dan Transformasi Digital Terkini) 2026.

Selanjutnya, hingga triwulan II 2026, terdapat 887.552 pengguna QRIS di Kalimantan Selatan, tumbuh 15,09% (yoy), tumbuh akseleratif dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,16% (yoy).

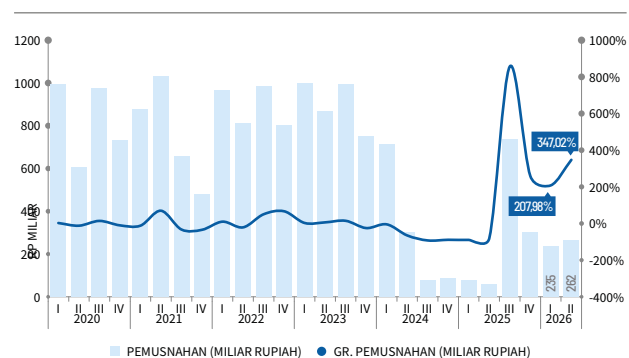
4.3 UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa menciptakan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan layanan sistem pembayaran tunai. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain kerja

sama penukaran uang pecahan kecil dengan perbankan; optimalisasi kas titipan dan kas keliling; dan melakukan supervisi terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank. KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pengawasan rutin secara langsung (*on-site inspection*) maupun tidak langsung (*off-site inspection*) terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank sebagai upaya menanggulangi risiko Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Saat ini, terdapat 1 KUPVA Bukan Bank terdaftar di wilayah Kalimantan Selatan.

4.3.1 Penyediaan Uang Rupiah

Bank Indonesia secara rutin melakukan kegiatan penarikan uang Rupiah yang tidak layak edar, pengolahan uang Rupiah, serta menggantinya dengan uang Rupiah layak edar sebagai bentuk penerapan *clean money policy*. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat. Penerapan *clean money policy* melalui pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar pada triwulan II 2026 mencapai Rp262 miliar, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp234 miliar (Grafik 4.6).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.6 Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

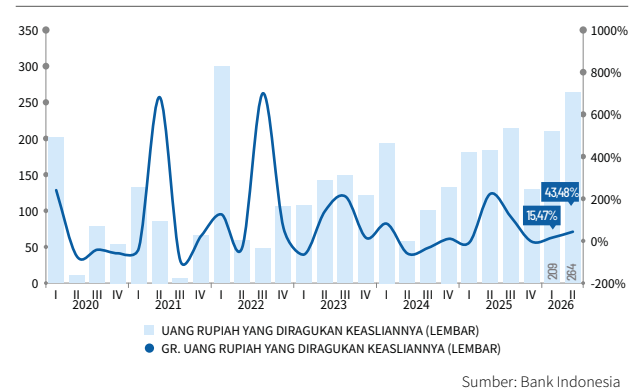
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan ketersediaan uang kartal di masyarakat, KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen melaksanakan program pelayanan perkasas yang semakin baik. Salah satu di antaranya melalui program kas keliling dan kemitraan layanan yang bertujuan menyerap langsung uang tidak layak edar di masyarakat serta menjaga ketersediaan uang Rupiah layak edar.

Selanjutnya, dalam upaya menjaga ketersediaan uang Rupiah, saat ini terdapat 2 (dua) lokasi kas titipan yang terletak di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Total distribusi uang dari Kas Titipan selama triwulan II 2026 sebesar Rp558,11 miliar atau terkontraksi 41,73% (yoy), kontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 17,63% (yoy) atau sebesar Rp661,38 miliar. Sementara itu, total penukaran uang oleh masyarakat di loket Bank Indonesia pada triwulan laporan sebesar Rp13,70 miliar atau kontraksi 23,32% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 80,05% (yoy) atau sebesar Rp17,86 miliar.

4.3.2 Penanganan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya

Jumlah uang Rupiah yang diragukan keasliannya pada triwulan II 2026 meningkat. Pada triwulan laporan, temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya mencapai 264 lembar atau tumbuh 43,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 15,47% (yoy) atau sebanyak 209 lembar (Grafik 4.7). Peningkatan pertumbuhan jumlah uang Rupiah yang diragukan keasliannya tersebut seiring dengan aliran uang masuk melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. KPwBI Kalimantan Selatan secara aktif melakukan berbagai langkah untuk meminimalkan

persebaran uang Rupiah yang diragukan keasliannya, yaitu dengan konsisten meningkatkan fitur keamanan uang, mendorong keterjangkauan dan ketersediaan Uang Layak Edar (ULE) secara luas di masyarakat, mendorong penggunaan pembayaran non tunai guna meminimalkan peluang pemalsuan uang, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri keaslian uang Rupiah. Selain itu, dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam mencegah, mendeteksi serta menanggulangi peredaran uang palsu di wilayah Kalimantan Selatan, pada April 2026 telah dibentuk Forum BOTASUPAL (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu) wilayah Kalimantan Selatan. Hal ini juga dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah dan mendukung terciptanya sistem pembayaran yang aman dan terpercaya.



Grafik 4.7 Perkembangan Temuan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya

05

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan





Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan pada Semester I 2026 berada pada level yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Semester I 2025. Hal tersebut terkonfirmasi dari penurunan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada Semester I 2026 didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Optimisme daya beli masyarakat pada triwulan II 2026 masih terjaga. Hal ini tercermin dari Nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 123,45, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 116,71.

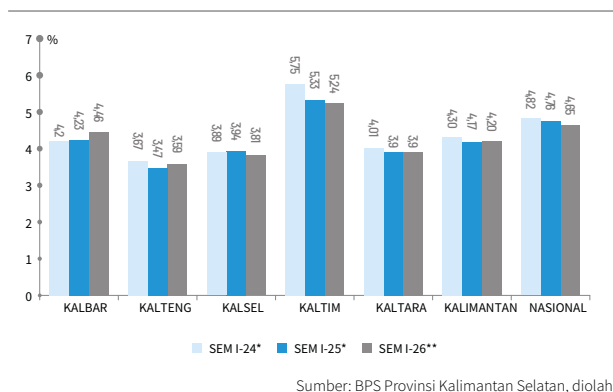
Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 76,10, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,19. Peningkatan IPM Kalimantan Selatan bersumber dari peningkatan seluruh dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH), serta pengetahuan yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Standar Hidup Layak (pengeluaran per kapita). Lebih lanjut, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan menunjukkan tren menurun sepanjang Semester I 2021 hingga Semester I 2026. Pada Semester I 2026, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 165,41 ribu orang dengan persentase sebesar 3,63%, lebih rendah dibandingkan Semester sebelumnya.

5.1 KONDISI KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan pada Semester I 2026 berada pada level yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Semester I 2025. Hal tersebut terkonfirmasi dari penurunan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Pada Semester I 2026, TPT tercatat sebesar 3,81%, lebih rendah dibandingkan Semester I 2025 sebesar 3,94%. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja, yang didukung oleh meningkatnya serapan tenaga kerja pada beberapa sektor utama (Tabel 5.1).

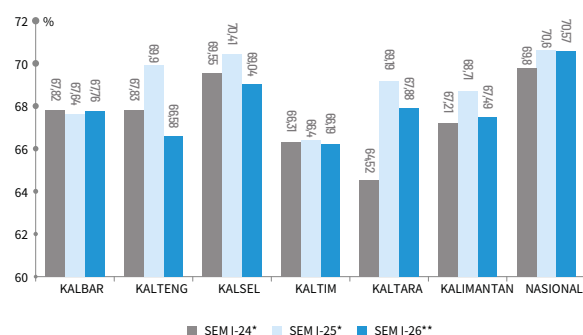
Secara spasial provinsi di Kalimantan, TPT mengalami peningkatan menjadi 4,20%, lebih tinggi dibandingkan Semester I 2025 sebesar 4,17%. Peningkatan TPT pada Semester I 2026 berasal dari Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur mengalami penurunan sedangkan Provinsi Kalimantan Utara terpantau stabil. Hal ini berbeda dengan kondisi TPT Nasional yang mengalami penurunan dari 4,76% pada Semester I 2025 menjadi 4,65% pada Semester I 2026. Dalam tiga tahun terakhir, TPT Kalimantan Selatan selalu di bawah TPT nasional (Grafik 5.1), mencerminkan kinerja pasar kerja daerah yang relatif lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Selatan tetap terjaga, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja (Tabel 5.1) dan peningkatan TPAK (Grafik 5.2).



Grafik 5.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Semester I 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Semester I 2025. TPAK pada periode Semester I 2026 sebesar 69,04%, lebih rendah dibandingkan Semester tahun lalu tercatat sebesar 70,41%. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK Perempuan Semester I 2026 menurun sebesar 5,34% (yoy), sementara itu TPAK Laki-laki meningkat sebesar 0,25% (yoy) dibandingkan data Semester I 2025.

Apabila ditinjau secara spasial, TPAK Provinsi Kalimantan Selatan menempati posisi tertinggi di Pulau Kalimantan, yakni sebesar 69,04%, disusul oleh Kalimantan Utara sebesar 67,88%, Kalimantan Barat sebesar 67,76%, Kalimantan Tengah tercatat 66,58%, dan terakhir Kalimantan Timur sebesar 66,19%. Meskipun demikian, capaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan TPAK nasional yang sebesar 70,57% (Grafik 5.2). Lebih lanjut, TPAK Kalimantan Selatan mengalami sedikit penurunan dibandingkan semester yang sama di tahun lalu akibat adanya efisiensi pada beberapa pelaku usaha.



Grafik 5.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada Semester I 2026 meningkat dibandingkan dengan Semester I 2025. Pada periode tersebut, jumlah penduduk usia kerja tercatat sebesar 3,24 juta jiwa atau meningkat sebanyak 60,45 ribu jiwa dibandingkan Semester I 2025. Di sisi lain, jumlah penduduk angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 2,13 ribu jiwa dibandingkan Semester I 2025. Sementara itu, jumlah penduduk bukan angkatan kerja meningkat sebesar 57,86 ribu jiwa pada Semester I 2026.

Tabel 5.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan

URAIAN	SEM I-23*	SEM I-24*	SEM I-25*	SEM I-26**	PERUBAHAN	
	RIBU JIWA	RIBU JIWA	RIBU JIWA	RIBU JIWA	RIBU JIWA	PERSEN
Penduduk Usia Kerja	3.108,53	3.139,07	3.186,06	3.246,51	60,45	1,90
1. Penduduk Angkatan Kerja	2.161,29	2.183,30	2.243,44	2.241,31	-2,13	-0,10
a. Bekerja	2.075,99	2.098,39	2.154,97	2.155,97	1,00	0,05
b. Pengangguran	85,30	84,91	88,49	85,34	-3,15	-3,56
2. Penduduk Bukan Angkatan Kerja	947,25	955,77	942,61	1.000,47	57,86	6,14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,53	69,55	70,41	69,04		-1,95
Laki-Laki (%)	83,92	83,79	84,95	85,16		0,25
Perempuan (%)	54,91	55,10	55,66	52,69		-5,34
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,95	3,89	3,94	3,81		-3,30
Perkotaan (%)	4,16	4,28	4,03	3,98		-1,24
Pedesaan (%)	3,62	3,29	3,81	3,53		-7,35

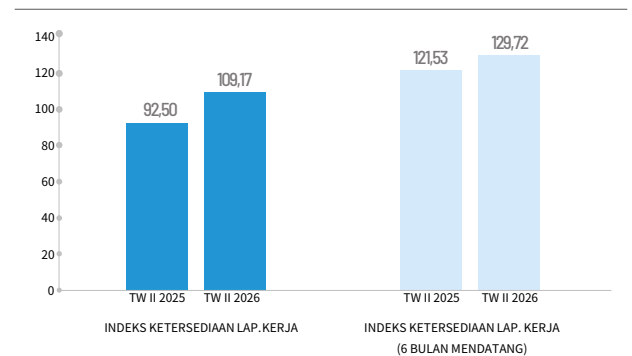
Sumber: BRS Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2025, BPS Kalsel (diolah)

Kenaikan pada kelompok bukan angkatan kerja ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk usia kerja belum berpartisipasi aktif dalam pasar tenaga kerja, baik karena melanjutkan pendidikan, mengurus rumah tangga, atau belum memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia kerja belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Selatan.

Indikator ketenagakerjaan menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja di Kalimantan Selatan relatif kuat.

Nilai Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja triwulan II 2026 tercatat sebesar 109,17, meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2025 sebesar 92,50. Sementara itu, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja untuk enam bulan mendatang juga mengalami peningkatan dari 121,53 pada triwulan II 2025 menjadi 129,72 pada triwulan II 2026. Berdasarkan hasil survei konsumen persepsi ketersediaan lapangan kerja membaik seiring kenaikan UMK, pembukaan lowongan formal, serta ekspansi usaha kecil dan besar, sehingga meningkatkan optimisme penyerapan tenaga kerja. (Grafik 5.3).

Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada Semester I 2026 didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Pada periode tersebut, LU Pertanian menjadi penyerap tenaga kerja



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3 Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja

terbesar sebesar 31,70%, diikuti oleh LU Perdagangan sebesar 17,00%, dan LU Industri Pengolahan sebesar 7,46%. LU Pertanian masih mampu menyerap tambahan tenaga kerja seiring fokus program swasembada pangan dari pemerintah seperti cetak sawah maupun optimasi lahan sehingga meningkatkan permintaan tenaga kerja pada lapangan usaha tersebut.

Selain itu, peningkatan aktivitas KI/KEK di Kalimantan Selatan turut mendorong penambahan tenaga kerja pada lapangan usaha industri pengolahan.

5.2 KONDISI KESEJAHTERAAN

5.2.1 Daya Beli Masyarakat

Optimisme daya beli masyarakat pada triwulan II 2026 masih terjaga. Hal ini tercermin dari Indeks Penghasilan Konsumen saat ini yang tercatat sebesar 126,81, lebih tinggi dibandingkan 118,47 pada triwulan

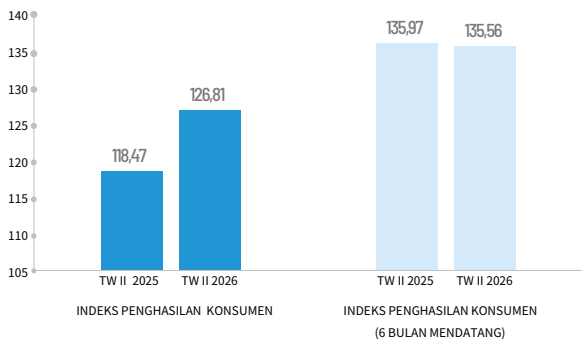
Tabel 5.2 Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	SEM I-25*	SEM I-26**	PERUBAHAN (%)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	31,42	31,70	0,28
Perdagangan Besar dan Eceran	19,12	17,00	-2,12
Industri	7,27	7,46	0,19
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	7,20	6,98	-0,22
Pendidikan	6,75	7,09	0,34
Administrasi Pemerintahan	5,71	6,04	0,33
Pertambangan dan Penggalian	4,89	4,99	0,10
Konstruksi	4,67	5,12	0,45
Jasa Lainnya	3,83	4,40	0,57
Pengangkutan dan Pergudangan	3,23	3,57	0,34
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas sosial	1,98	2,13	0,15
Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Keuangan dan Asuransi dan Real estat	1,76	1,18	-0,58
Jasa Profesional dan Perusahaan	1,23	1,52	0,29
Pengadaan Listrik, Gas dan Treatment Air, Sampah dan Daur Ulang	0,93	0,82	-0,11

*: posisi data Februari
 **: posisi data Mei

Sumber: BPS Kalsel (diolah)

II 2025. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran Rp5–6 juta dan usia 30–40 tahun, yang relatif stabil secara pendapatan. Di samping itu, ekspektasi masyarakat terhadap penghasilan di masa mendatang sedikit menurun, tercermin dari Indeks Penghasilan Konsumen enam bulan mendatang turun dari 135,97 pada triwulan II 2025 menjadi 135,56 pada triwulan II 2026. Penurunan ini dikarenakan pelaku usaha cenderung menunda rekrutmen pegawai serta mengurangi tenaga kerja untuk menekan biaya operasional (Grafik 5.4).



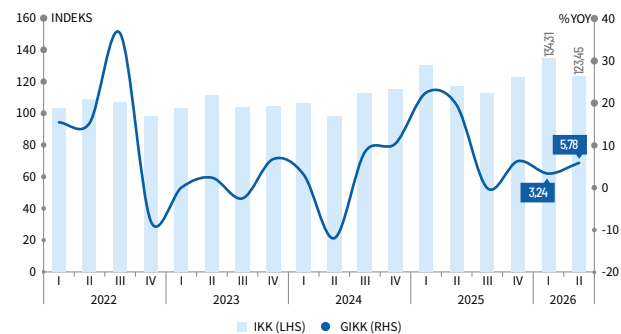
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.4 Indeks Penghasilan Konsumen

Optimisme daya beli masyarakat pada triwulan II 2026 masih terjaga.

Hal ini tercermin dari Nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 123,45, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 116,71 (Grafik 5.5). Keyakinan konsumen sepanjang triwulan II 2026 terjaga sejalan dengan pergerakan IKE dan IEK. Komponen pembelian barang tahan lama juga mengalami peningkatan sepanjang triwulan II 2026 seiring konsumsi masyarakat yang masih solid.

Lebih lanjut, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) mengalami peningkatan, yang mencerminkan persepsi masyarakat bahwa kondisi ekonomi saat ini relatif membaik. Hal tersebut seiring dengan Indeks Ekspektasi Ekonomi (IEK) yang menguat, mencerminkan optimisme masyarakat pada periode mendatang.



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

5.2.2 Nilai Tukar Petani

Pada triwulan II 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan tercatat sebesar 130,71, lebih tinggi dibanding triwulan I 2026 yang sebesar 121,10 (Tabel 5.3).

Sejalan dengan harga yang diterima petani (It) lebih tinggi dari indeks harga yang dibayar petani (Ib) sehingga kesejahteraan petani Kalimantan Selatan relatif masih berada pada level yang menguntungkan.

Peningkatan Indeks Harga yang Diterima (It) oleh petani secara triwulanan didorong oleh peningkatan NTP pada seluruh sektor kecuali peternakan. NTP Tanaman Pangan meningkat dari 109,08 pada triwulan I 2026 menjadi 114,06 pada triwulan II 2026 (naik 4,57%, qtg), sementara NTP Hortikultura meningkat 13,80% (qtg), NTP Tanaman Perkebunan Rakyat naik dari 150,33 menjadi 170,89 pada triwulan II 2026 (naik 13,67%, qtg). Kenaikan tersebut

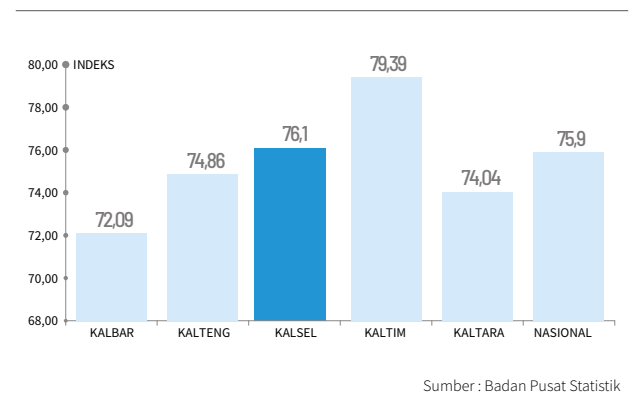
menunjukkan adanya perbaikan harga komoditas kelapa sawit dan hortikultura yang dihasilkan oleh petani di tengah harga global yang tinggi. Di sisi lain, NTP Peternakan dan Perikanan mengalami penurunan dari 108,52 menjadi 102,40 pada triwulan II 2026 (menurun 5,63%, qtt).

Dengan demikian, kesejahteraan petani Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 masih terjaga, sejalan dengan meningkatnya kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi rumah tangga. Secara tahunan, NTP juga tumbuh 14,70% (yoy), mencerminkan daya beli petani sangat kuat di tengah fluktuasi harga pangan dan biaya produksi.

5.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 76,10, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,19 (Tabel 5.4). Peningkatan IPM Kalimantan Selatan bersumber dari seluruh komponen penyusunnya. Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 74,18 tahun pada 2024 menjadi 74,49 tahun pada 2025, sejalan dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan naik dari Rp13,399 juta menjadi Rp13,757 juta, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dan perbaikan kesejahteraan ekonomi rumah tangga di Kalimantan Selatan.

Di sisi lain, dimensi pendidikan menunjukkan perkembangan positif, tercermin dari Harapan Lama Sekolah (HLS) yang meningkat dari 12,87 tahun menjadi 13,12 tahun, serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang naik dari 8,62 tahun menjadi 8,81 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal. Secara umum, IPM Kalimantan Selatan telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dan berstatus tinggi dengan capaian IPM di atas 70 meski masih berada di bawah Kalimantan Timur untuk wilayah Kalimantan. Selama periode 2020–2025, IPM Kalimantan Selatan rata-rata tumbuh sebesar 0,81% per tahun dan berada di atas nilai 70 sejak tahun 2020 (Grafik 5.6).



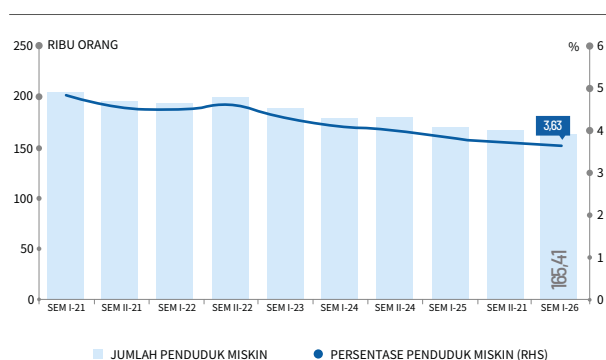
Grafik 5.6 IPM Provinsi di Kalimantan dan Nasional

Tabel 5.3 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)

SEKTOR, KELOMPOK DAN SUBKELOMPOK	2024				2025				2026		PERUBAHAN	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	%QTQ	%YOY
Nilai Tukar Petani												
Tanaman Pangan	115,85	103,99	102,48	99,33	104,20	99,43	102,23	104,82	109,08	114,06	4,57	14,72
Hortikultura	101,72	99,74	99,23	97,88	109,81	104,38	102,57	96,10	99,47	113,19	13,80	8,44
Tanaman Perkebunan Rakyat	122,79	133,61	135,86	148,12	154,51	142,56	143,98	149,31	150,33	170,89	13,67	19,87
Peternakan	105,06	106,75	105,78	106,06	107,00	105,67	104,68	106,72	108,51	102,40	-5,63	-3,09
Perikanan	100,83	99,73	98,87	98,86	98,26	98,73	97,08	97,24	98,68	99,27	0,60	0,55
Gabungan												
Nilai Tukar Petani	115,59	113,19	112,74	115,43	120,69	113,96	115,53	118,30	121,10	130,71	7,94	14,70
Indeks Harga yang diterima petani (%)	137,75	137,40	135,63	140,41	144,12	140,54	142,69	146,85	151,96	172,38	13,43	22,65
Indeks Harga yang dibayar petani (%)	119,16	121,38	120,30	121,64	121,20	123,33	123,52	124,13	125,48	128,65	2,52	4,31
a. Indeks Konsumsi Rumah Tangga	119,57	122,38	120,87	122,71	120,04	125,42	124,72	125,48	127,29	130,83	2,78	4,31
b. Indeks BPPBM	118,33	119,23	119,32	119,28	119,61	120,69	121,00	121,04	121,08	123,81	2,25	2,58

Sumber: BPS Kalsel (diolah)

Lebih lanjut, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan menunjukkan tren menurun sepanjang Semester I 2021 hingga Semester I 2026. Pada Semester I 2026, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 165,41 ribu orang dengan persentase sebesar 3,63%, lebih rendah dibandingkan Semester sebelumnya. Perkembangan tersebut mencerminkan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat secara bertahap, meskipun upaya pengentasan kemiskinan tetap perlu diperkuat agar penurunannya berkelanjutan.



Sumber : BPS, Diolah

Grafik 5.7 Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan

Tabel 5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PERGERAKAN
Umur harapan hidup saat lahir (UHH)	Tahun	73,28	73,43	73,70	73,97	74,18	74,49	
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	12,52	12,81	12,82	12,86	12,87	13,12	
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,29	8,34	8,46	8,55	8,62	8,81	
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp. 000	12.032	12.143	12.469	12.953	13.399	13.757	
IPM		73,09	73,45	74,00	74,66	75,19	76,10	
Pertumbuhan IPM	% yoy		0,49	0,75	0,89	0,71	1,21	

Sumber: BPS Kalsel (diolah)



06 **Prospek Perekonomian**





Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,6% – 5,4% (yoy). Pertumbuhan positif ini ditopang oleh prospek kinerja LU Pertambangan seiring dengan tingginya harga batu bara global dan LU Industri Pengolahan yang tumbuh tinggi sejalan dengan program percepatan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri dan program ekonomi kerakyatan (a.l. MBG dan KDKMP).

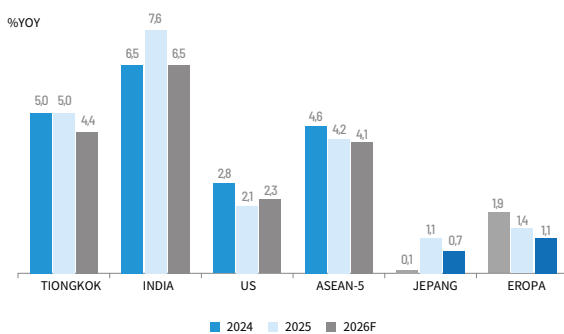
Dari sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh tumbuhnya kinerja LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. Kinerja LU Pertambangan diperkirakan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan seiring dengan harga batu bara global yang diperkirakan tetap berada pada level tinggi seiring dengan berlanjutnya eskalasi di Timur Tengah. Sementara itu, Kinerja LU Industri Pengolahan tetap menjadi motor pertumbuhan didorong oleh meningkatnya aktivitas hilirisasi (a.l. biji besi dan turunan nikel) dan kebijakan B50 pemerintah yang akan dimulai pada tahun 2026. Sementara itu, LU Konstruksi juga diperkirakan meningkat seiring dengan *low base program* ekonomi kerakyatan (a.l. MBG dan KDKMP) serta berlanjutnya program pembangunan Jembatan Pulau Laut dengan total anggaran besar.

Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Kalimantan Selatan ditopang oleh peningkatan kinerja Konsumsi Pemerintah, PMTB, dan Ekspor. Kinerja Konsumsi Pemerintah diperkirakan meningkat seiring dengan akselerasi dan peningkatan aktivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kalimantan Selatan. Kemudian kinerja Investasi diperkirakan meningkat seiring peningkatan aktivitas hilirisasi, program ekonomi kerakyatan dan berlanjutnya proyek besar (a.l. Jembatan Pulau Laut). Selanjutnya, Kinerja Ekspor diperkirakan meningkat dengan didominasi oleh bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, logam mulia, kayu, serta produk kimia.

Secara keseluruhan tahun 2026, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2025 dan berada dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy). Perkiraan tekanan inflasi yang lebih rendah disebabkan penurunan pada beberapa kelompok, terutama dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya diperkirakan lebih rendah sejalan dengan peningkatan harga emas dunia yang diperkirakan lebih terbatas seiring dengan ekspektasi suku bunga The Fed yang masih *higher for longer* pada tahun 2026. Selanjutnya, dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diperkirakan lebih rendah sejalan dengan harga aneka rokok yang tidak mengalami kenaikan harga seiring Harga Jual Eceran (HJE) dan cukai rokok yang tidak mengalami perubahan pada tahun 2026. Tekanan inflasi lebih lanjut diantisipasi melalui program stabilisasi harga pangan termasuk penyaluran beras SPHP, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, dan pemanfaatan pangan lokal dalam program MBG.

6.1 PRAKIRAAN KONDISI MAKRO EKONOMI

Secara umum, perekonomian dunia diprakirakan melemah sejalan dengan memburuknya kondisi dan prospek ekonomi global akibat dampak perang di Timur Tengah dengan ketidakpastian penyelesaian konflik yang terus meningkat. Berbagai indikator menunjukkan bahwa harga minyak dan komoditas dunia meningkat tinggi dan diikuti dengan disrupsi rantai pasok perdagangan antarnegara, sehingga menekan kinerja perekonomian global secara luas. Lebih lanjut, prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diprakirakan melambat menjadi 3,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan prakiraan sebelumnya sebesar 3,3% (yoy). Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diprakirakan tumbuh 1,8% (yoy) pada 2026, sementara negara berkembang diprakirakan tumbuh 3,9% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Tiongkok, salah satu mitra dagang utama Kalimantan Selatan, diprakirakan melambat menjadi 4,4% (yoy) pada 2026, lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,0% (yoy), di tengah berbagai tekanan eksternal dan domestik yang masih berlanjut. Di sisi lain, perekonomian India, yang juga merupakan mitra dagang utama Kalimantan Selatan, diprakirakan tumbuh 6,5% (yoy) pada 2026, lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh 7,6% (yoy) (Grafik 6.1).



Sumber: World Economic Outlook Apr 2026, International Monetary Fund

Grafik 6.1 Kondisi Negara Mitra Dagang Tahun 2025 dan Prospek Pertumbuhan 2026

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 diprakirakan tetap solid mendekati batas atas proyeksi pada kisaran 4,6% – 5,4% (yoy).

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ditopang oleh pertumbuhan

kinerja LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. Kinerja LU Pertambangan tahun 2026 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan kinerja tahun 2025 yang mengalami kontraksi 0,03% (yoy). Revisi kinerja LU Pertambangan tersebut sejalan dengan realisasi produksi dua triwulan pertama yang mengalami pertumbuhan positif seiring dengan tingginya harga batu bara global. Sementara itu, Peningkatan LU Industri Pengolahan seiring dengan prakiraan peningkatan aktivitas hilirisasi (a.l. biji besi dan turunan nikel) di KI/KEK Kalimantan Selatan. Mulai berproduksinya *smelter pig iron* di Kawasan Industri pada triwulan I 2026 dan rencana penambahan lini produksi kedua di semester II 2026 diprakirakan akan mendorong kinerja LU Industri Pengolahan. Selain itu rencana produksi prekursor nikel yang diprakirakan akan dimulai antara triwulan III–IV di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan turut menjadi pendorong kinerja LU Industri Pengolahan. Selanjutnya, program mandatory B40 dan kebijakan penerapan B50 pemerintah yang akan dimulai pada 1 Juli tahun 2026 di tengah peningkatan jumlah tanaman sawit yang menghasilkan diprakirakan meningkatkan permintaan produk turunan pengolahan sawit di tahun 2026. LU Konstruksi diprakirakan meningkat seiring dengan aktivitas investasi sektor swasta yang diprakirakan meningkat dan aktivitas konstruksi sektor pemerintah yang lebih akseleratif (a.l. Jembatan Pulau Laut, gerai KDKMP, dan dapur MBG).

Dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekonomi Kalimantan Selatan terutama ditopang oleh peningkatan kinerja Konsumsi Pemerintah, PMTB dan Ekspor. Kinerja Konsumsi Pemerintah diprakirakan tumbuh positif sejalan dengan *low base effect* dan akselerasinya program ekonomi kerakyatan (a.l. MBG dan KDKMP). Penurunan pendapatan TKDD setelah adanya kebijakan realokasi anggaran diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan realisasi spending pemerintah pada anggaran sosial seperti belanja bansos dan subsidi untuk ketahanan pangan dan energi, realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan KDKMP. Akselerasi program ekonomi kerakyatan ini juga diprakirakan menopang tingkat konsumsi dan mendukung terjaganya optimisme masyarakat di Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut, Kinerja PMTB diperkirakan meningkat seiring dengan aktivitas industri hilirisasi di KI/KEK dan program ekonomi kerakyatan. Berlanjutnya pengerjaan berbagai proyek *multi years* baik pembangunan infrastruktur oleh pemerintah maupun swasta, antara lain perbaikan jalan, pembangunan bendungan, jembatan, irigasi, pembangunan pusat perbelanjaan dan kantor pemerintah daerah, berlanjutnya pembangunan swasta khususnya di Kawasan Investasi (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pembangunan proyek strategis di Kalimantan Selatan diperkirakan meningkatkan kinerja PMTB di tahun 2026.

Sementara itu, peningkatan kinerja ekspor diperkirakan didorong oleh peningkatan produksi CPO dan turunannya serta mulai berproduksinya *smelter pig iron* dan nikel pada tahun 2026. Dari sisi domestik, kebijakan peningkatan bea ekspor CPO menjadi 12,5% dan mandatory program B50 diperkirakan dapat mengurangi keunggulan kompetitif CPO Indonesia di pasar global, sehingga membatasi potensi ekspor ke negara-negara mitra dagang utama.

Kinerja impor Kalimantan Selatan diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan prakiraan peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi tahun 2026 di Kalimantan Selatan. Akselerasi impor tersebut diperkirakan didorong impor barang modal dan manufaktur terutama mesin, alat berat, dan kapal. Sementara itu, impor bahan baku industri juga diperkirakan masih meningkat, seiring masih tingginya kebutuhan bahan baku dalam proses pengolahan industri turunan CPO, terutama untuk biodiesel.

6.2 PRAKIRAAN INFLASI

Tekanan inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada keseluruhan tahun 2026 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 dan berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Penurunan tersebut terutama didorong oleh terbatasnya kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan ekspektasi suku bunga The Fed yang tetap *higher for longer*, serta dukungan kebijakan fiskal berupa insentif pajak impor bea masuk bahan baku, subsidi energi

dalam APBN 2026, dan insentif tarif tiket pesawat pada periode libur sekolah dan Natal-Tahun Baru. Dari sisi produksi, penambahan luas lahan pertanian melalui program Cetak Sawah Rakyat (CSR) turut mendukung ketersediaan pasokan pangan sepanjang tahun.

Penurunan tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Hal ini sejalan dengan terbatasnya kenaikan harga emas perhiasan, serta kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring Harga Jual Eceran (HJE) dan cukai rokok yang tidak mengalami perubahan pada tahun 2026, ditopang program stabilisasi harga pangan termasuk penyaluran beras SPHP, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, dan pemanfaatan pangan lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi lain, tekanan inflasi pada kelompok Transportasi diperkirakan meningkat sejalan dengan berlanjutnya kenaikan harga energi global akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada harga avtur dan BBM nonsubsidi. Selanjutnya, komoditas pangan seperti beras, sayuran hortikultura, dan daging ayam ras berpotensi memberikan tekanan seiring prakiraan *El Niño* dan musim kemarau yang panjang, kenaikan harga pakan, serta peningkatan permintaan pada periode Natal dan Tahun Baru.

Strategi pengendalian inflasi melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi bagian penting dalam menyelesaikan permasalahan struktural disparitas harga antarwilayah dan antarwaktu, serta inefisiensi tata niaga pangan. Kendala logistik dan distribusi, termasuk risiko menurunnya tinggi muka air sungai pada musim kemarau, masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan KAD secara efisien. Oleh karena itu, pembentukan KAD secara formal perlu didorong, baik untuk meningkatkan kepastian pasokan di Kalimantan Selatan sebagai pembeli maupun kepastian penyerapan pasokan di sentra produksi, dengan meningkatkan keterlibatan BUMD Pangan melalui skema business to business yang dilengkapi transfer teknologi kepada petani lokal.

**Tabel 6.1** Risiko PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

FAKTOR PENDORONG/PENAHAN	ARAH
Peningkatan harga batu bara global dampak krisis energi akibat berlanjutnya ketegangan Iran – Amerika	↑
Peningkatan aktivitas konstruksi dan investasi seiring dengan berlanjutnya PSN Jembatan Pulau Laut dan penambahan lini produksi smelter di KI/KEK	↑
Peningkatan aktivitas produksi dan hilirisasi di KI/KEK seiring dengan rencana produksi pig iron dan prekursor nikel	↑
Program ekonomi kerakyatan (a.l MBG dan KDKPM) yang diperkirakan lebih akseleratif dan low base 2025	↑
Ketidakpastian perekonomian global dampak peningkatan tensi geopolitik timur tengah	↓
Dampak pengalihan aset kebun sawit yang disita kepada PT. Agrinas	↓
Pemangkasan RKAB dan pencabutan izin operasi perusahaan tambang batu bara	↓
Fenomena <i>El Nino</i> yang dapat memicu kekering dan berdampak pada produktivitas pertanian dan gangguan jalur perdagangan	↓

Tabel 6.2 Risiko Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

FAKTOR PENDORONG/PENAHAN	ARAH
Berlanjutnya tekanan harga energi global akibat eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah hingga akhir tahun yang berpotensi mendorong kembali kenaikan harga avtur dan BBM nonsubsidi secara persisten.	↑
Kerusakan lahan pertanian jangka menengah akibat karhutla berkepanjangan yang dapat menekan produksi tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan Selatan.	↑
Potensi penyesuaian cukai hasil tembakau (CHT) yang berlaku efektif di 2026 dapat memicu kenaikan harga eceran rokok.	↑
Lonjakan peningkatan harga emas dampak <i>US Treasury Bond</i> buy back oleh pemerintah Amerika Serikat.	↑
Moderasi tekanan <i>imported inflation</i> apabila kondisi nilai tukar rupiah menguat seiring meningkatnya fundamental perekonomian dalam negeri yang kuat, mendorong aliran modal masuk ke pasar domestik.	↓
Program stabilisasi harga pokok pangan khususnya tempe dan tahu dengan subsidi Rp2.000 per kg ketika harga kedelai di atas harga acuan berpotensi menahan kenaikan harga nasi dan lauk pauk.	↓





Daftar Istilah

Administered Price (AP)

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.

BI 7 Days Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

BI RTGS

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, merupakan penyelesaian kewajiban bayar-membayar (*settlement*) yang dilakukan secara *online* atau seketika untuk setiap intruksi transfer dana.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

BU BBN

Merupakan singkatan dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati, yakni perusahaan atau organisasi yang terlibat dalam bisnis bahan bakar nabati, seperti biodiesel, di Indonesia.

CPO

CPO singkatan dari *Crude Palm Oil* atau minyak sawit mentah yang dihasilkan melalui proses ekstraksi dari daging buah kelapa sawit.

CSR

Singkatan dari Cetak Sawah Rakyat, merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani melalui penciptaan lahan sawah baru di daerah-daerah yang potensial.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.

Ekspor dan Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah maupun valas. Terminologi FDR untuk bank syariah sementara LDR untuk bank konvensional.

Indeks Ekspektasi Konsumen

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Daftar Istilah

Inflasi Inti

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang), serta ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.

Inflow

Uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi.

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

MtM

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF)

Ratio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi NPF dan pembiayaan untuk bank syariah, sedangkan NPL dan kredit untuk bank konvensional.

Oplah

Singkatan dari Optimalisasi Lahan, merupakan program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya produksi padi dan jagung, serta mendukung swasembada pangan.

Outflow

Aliran keluar uang kartal dari Kantor Bank Indonesia.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

QtQ

Quarter to quarter. Perbandingan antara data suatu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

TBS

Singkatan dari Tandan Buah Segar, adalah buah kelapa sawit yang sudah matang dan siap dipanen.

TPID, TPIP

Merupakan singkatan dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kotat. TPID dan TPIP merupakan anggota dari TPIN (Tim Pengendalian Inflasi Nasional) yang terbentuk atas dasar Keputusan Presiden No 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

YoY

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



Tim Penyusun

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PENANGGUNG JAWAB

Haris Munandar

Aloysius Donanto H. W.

EDITOR

Irfan Farulian

Prayudhi Azwar

Mukti Rigowo

Andy Saptono

Rony Ferdiansyah

TIM PENULIS

Mohammad Aly Fikry

Rizki Firdaus

Rizki Adi Pratama

Tata Yoni Permana

Rivaldi

Prima Putra Pamungkas

Putri Juniarti

Prima Mega Purwatama

Yosia El Gibort

Maya Agustina

Dewi Rahmawati

M. Shaza Febri R

Ahmad Zainudin

Gusti Tasya Meilania

Marliana

Cornelia Puspita Sari Tresno

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah dan Provinsi

Jl. Lambung Mangkurat No.15 Banjarmasin Telp. +62 511 3352027

Fax. +62 511 3354678

Email:

prima_putra@bi.go.id

rivaldi@bi.go.id



Laporan Perekonomian Kalsel

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jl. Lambung Mangkurat No. 15
Banjarmasin 70111
Telp. (0511) 4368182 Fax (0511) 3354678

